

**HUBUNGAN ANTARA DANA PERIMBANGAN DENGAN
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PULAU JAWA TAHUN 2006-2010**

**ELA MARINA
8105092788**



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
KONSENTRASI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013**

***CORRELATION BETWEEN BALANCING FUND WITH
FINANCIAL PERFORMANCE OF LOCAL GOVERNMENTS IN
JAVA PERIOD 2006-2010***

**ELA MARINA
8105092788**



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Education Accomplishment

***STUDY PROGRAM OF ECONOMY EDUCATION
CONCENTRATION IN ACCOUNTING EDUCATION
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND ADMINISTRATION
FACULTY OF ECONOMIC
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2013***

ABSTRAK

Ela Marina. *Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2006-2010*. Skripsi. Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh keterkaitan mengenai hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Data dikumpulkan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI berupa laporan keuangan per tahun se-Pulau Jawa. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Data dana perimbangan dan kinerja keuangan dengan alat ukur rasio efektivitas didapat dalam laporan realisasi anggaran.

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah $\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$. Dari persamaan tersebut, dilakukan uji persyaratan liliefors didapat $L_{hitung} < L_{tabel}$ ($0,0546 < 0,0967$). Hal itu berarti data berdistribusi normal. Pada uji keberartian regresi di dapat $F_{hitung} (10,37) > F_{tabel} (3,69)$ yang dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi berarti. Sedangkan untuk uji kelinieran regresi diperoleh hasil $F_{hitung} (0,97) < F_{tabel} (2,61)$ yang menandakan bahwa persamaan regresi linier. Hasil uji koefisien korelasi dengan menggunakan *product moment* dari Pearson diperoleh nilai $r_{xy} = -0,34$, hal ini berarti terdapat hubungan yang negatif antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Dari perhitungan uji keberartian korelasi didapat $t_{hitung} (3,22) > t_{tabel} (1,67)$. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh angka 11,23% sehingga dapat dikatakan bahwa dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 11,23%.

Kata kunci : Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah, Rasio Efektivitas

ABSTRACT

Ela Marina .Correlation Between Balancing Fund With Financial Performance of Local Governments in Java Period 2006-2010. Skripsi. Jakarta : Concentration in Accounting Education, Department of Economics and Administration, Faculty of Economic, State University of Jakarta, 2013.

The purpose of this research is to get correlation between balancing fund with financial performance of local governments.

The data was collected from BPK-RI as financial statement. The a sampling using purposive sampling technique. Balancing fund and financial performance of local governments with efectivity ratio from budget realization statement.

Regression equation in this research is $\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$. From this equation test requirements analysis conducted by the normality test error estimate the regression of Y on X obtained by Liliefors Lhitung < Ltabel (0,0546 < 0,09670). It mean the data are normally distributed. On the meaningful of regressions test we got the result Fhitung (10,37) > Ftabel (3,69) which can be conclude that the regression model is means. As for the liniarity test obtained Fhitung 0,97) < Ftabel (2,61) indicating that the regression equation is linear. The test results by using a correlation coefficient of Pearson product moment values obtained $r_{xy} = -0,34$. This means there is a negative relationship between balancing fund with financial performance of local governments. From the correlation meaningful test calculations $t_{hitung} (3,22) > t_{tabel} (1,67)$. Indicating a significant relationship between balancing fund with financial performance of local governments. From the calculation results obtained 11,23% coefficient of determination so that it can be said that the task balancing fund with financial performance of local governments as 11,23%

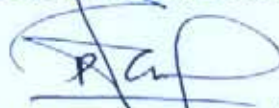
Keywords : Balancing Fund, Financial Performance of Local Governments, Efectivity Ratio

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

“Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa Tahun 2006-2010”

Ela Marina
(8105092788)

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dedi Purwana, BS, M.Bus
NIP. 19671207 1992 03 1001

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. <u>Dr. Saparuddin, SE, M.Si</u> NIP. 19770115 200501 1 001	Ketua		23 Juli 2013
2. <u>Erika Takidah, M.Si</u> NIP. 19751111 200912 2 001	Sekretaris		29 Juli 2013
3. <u>M. Yasser Arafat, SE., MM</u> NIP. 19710413 200112 1 001	Penguji Ahli		23 Juli 2013
4. <u>Santi Susanti, S.Pd, M.Ak</u> NIP. 19770113 2005 01 2002	Pembimbing I		19 Juli 2013
5. <u>Susi Indriani, M.S.Ak</u> NIP. 19760820 2009 12 2001	Pembimbing II		19 Juli 2013

Tanggal Lulus : 17 Juli 2013

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dengan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Juli 2013

Yang membuat pernyataan

METERAI
TEMDEL
1409080146249899
PENGANTARA BUKTI
6000 DJP



Ela Marina

No.Reg 8105092788

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tersayang yang senantiasa tiada henti mendukung dan mendoakan hingga karya ini terselesaikan dengan baik karena ridho-Nya dan ridho mereka.

Terkadang, untuk bisa melihat keindahan bintang di langit, kita memerlukan kegelapan malam sebagai perantaranya. Yakinlah . . .

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan..”

–Al Insyirah : 6

Tahukah kita bahwa orang yang paling menderita adalah orang yang seringkali merasa sendiri dan kesepian di dunia ini. Ingatlah, sesungguhnya Allah bersama kita. Tidakkah manusia menyadari itu?

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yg paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman.”

– Al Imran : 139

Semoga karya sederhana ini bermanfaat, ketahuilah bahwa tidak ada perjuangan yang tidak disertai usaha, doa, dan airmata.

KATA PENGANTAR



Assalaamu`alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini bisa penulis selesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpah curah kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan kita agar selalu tetap berada di jalan-Nya.

Skripsi yang berjudul **“Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2006-2010”** ini ditulis untuk memenuhi sebagian prasyarat guna mencapai gelar sarjana S-1 dalam bidang Pendidikan Akuntansi di Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi UNJ. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Santi Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan Akuntansi sekaligus dosen pembimbing pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, bahkan sangat membantu penulis untuk menemukan tema penelitian sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Susi Indriani, SE, MS.Ak selaku sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Dr. Saparudin, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi.
4. Drs. Nurdin Hidayat, MM. M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
5. Drs. Dedi Purwana, ES, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kontribusi ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan peneliti.
7. Para staf bagian Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi, terima kasih atas kerja sama dan bantuannya dalam memberikan informasi administrasi untuk peneliti.
8. Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK RI Pusat yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan data penelitian untuk skripsi ini.
9. Keluarga tercinta; Bapak dan Mamah yang menjadi tujuan utama untuk menyelesaikan skripsi ini, adikku Romi dan seluruh saudara-saudara di Jakarta dan Solo yang selalu menyayangi, mendoakan, dan menjadi sumber semangat terbesar untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. *The Members*; Devi, Hamidah, Andrian, Arya, Habib, dan Geraldly yang selama ini menjadi teman seperjuangan dan senantiasa memberikan

semangat untuk selalu saling membantu dalam hal apapun selama menjalani perkuliahan. Semoga Allah melindungi kita semua setelah pendidikan ini terselesaikan.

11. Pendidikan Akuntansi Reguler 2009; kelas impian dimana saya bertemu dengan teman-teman yang begitu hebat membantu, mendukung, dan saling menyemangati hingga penghujung semester perkuliahan.

12. Almamaterku.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dan keridaan dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun semangat sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Wassalamu `alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Perumusan Masalah	13
E. Kegunaan Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORETIK	
A. Deskripsi Konseptual	15
1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
a. Kinerja	15
b. Keuangan Daerah	16
c. Rasio Kinerja Keuangan Daerah	20
d. Pemerintah Daerah	25
2. Dana Perimbangan	30
a. Pengertian Dana Perimbangan	30
b. Tujuan Dana Perimbangan	31
c. Jenis-jenis Dana Perimbangan	33
d. Alokasi Dana Perimbangan	34

B. Hasil Penelitian yang Relevan	38
C. Kerangka Teoretik	41
D. Perumusan Hipotesis	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Metode Penelitian	45
D. Konstelasi Hubungan Antar Variabel	46
E. Populasi dan Sampling	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Dana Perimbangan (X)	48
a. Definisi Konseptual	48
b. Definisi Operasional	49
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	49
a. Definisi Konseptual.....	49
b. Definisi Operasional.....	49
G. Teknik Analisa Data	50
1. Mencari Persamaan Regresi	50
2. Uji Persyaratan Analisis	51
a. Uji Normalitas Galat Taksiran	51
b. Uji Linearitas Regresi	52
3. Uji Hipotesis	53
a. Uji Keberartian Regresi	53
b. Uji Koefisien Korelasi	55
c. Uji Keberartian Koefisien Korelasi	57
d. Uji Koefisien Determinasi	58
H. Hipotesis Statistika	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	
1. Kinerja Keuangan Pemda (Variabel Y)	59
2. Dana Perimbangan (Variabel X)	62

B. Pengujian Hipotesis	
1. Persamaan Regresi	65
2. Pengujian Persyaratan Analisis	
a. Uji Normalitas Galat Taksiran	66
b. Uji Linieritas Regresi	66
3. Pengujian Hipotesis Penelitian	
a. Uji Keberartian Regresi	67
b. Uji Koefisien Korelasi	68
c. Uji Keberartian Koefisien Korelasi	68
d. Uji Koefisien Determinasi	69
C. Pembahasan	85
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Implikasi	74
C. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1	Daftar Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa	81
2	Data Penelitian (Tahun 2006-2010)	85
3	Contoh Perhitungan Data Variabel	100
4	Data Populasi Terjangkau	101
5	Data Sampel Variabel X	104
6	Data Sampel Variabel Y	106
7	Data Sampel Variabel X dan Y	108
8	Perhitungan Grafik Histogram	110
9	Daftar Distribusi Frekuensi X dan.....	111
10	Histogram X dan Y	112
11	Perhitungan Mean, Varians, dan STDV Var X.....	113
12	Perhitungan Mean, Varians, dan STDV Var Y.....	115
13	Analisis Data.....	117
14	Persamaan Regresi.....	118
15	Grafik Persamaan Regresi.....	120
16	Uji Normalitas Galat Taksiran.....	121
17	Perhitungan Uji Normalitas	124
18	Kesimpulan Uji Normalitas.....	125
19	Uji Linieritas dan Keberartian Regresi.....	126
20	Anova Linier.....	128
21	Kesimpulan Uji Linier dan Keberartian Regresi....	129
22	Uji Koefisien Korelasi.....	130
23	Uji Keberartian Koefisien Korelasi.....	132
24	Koefisien Determinasi.....	133
25	Tabel Nilai-nilai r.....	134
26	Tabel Liliefors.....	135
27	Tabel Kurva Normal Z.....	136

28	Tabel Distribusi t.....	137
29	Tabel Distribusi F.....	138
30	Surat Permohonan Izin Penelitian.....	141
31	Formulir Permohonan Informasi Publik.....	142
32	Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen.....	143
33	Laporan Keuangan.....	144
34	Daftar Riwayat Hidup.....	147

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
III.1	Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah	50
III.2	Tabel Anava Uji Kolinieran Regresi	54
IV.1	Distribusi Frekuensi Rasio Efektivitas	60
IV.2	Distribusi Frekuensi Dana Perimbangan	63
IV.3	Tabel ANOVA	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
I.1	Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2013	8
II.1	Kerangka Pemikiran	43
III.1	Hubungan Antar Variabel	46
IV.1	Grafik Histogram Variabel Y	61
IV.2	Grafik Histogram Variabel X	64
IV.3	Grafik Persamaan Linier	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah merupakan gambaran yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami suatu daerah. Pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintah daerah dapat tercermin melalui laporan keuangan daerah yang mampu menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut secara jelas. Berdasarkan kinerjanya, akan menunjukkan kesiapan dan kematangan masing-masing daerah untuk meningkatkan potensinya dalam rangka mensukseskan sistem desentralisasi. Namun, justru peningkatan kinerja lah yang menjadi permasalahan saat ini dikarenakan oleh beberapa hal sehingga pembangunan daerah pun terganggu bahkan memburuk.

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Penyerahan wewenang ini disebut dengan desentralisasi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Namun, nampaknya otonomi daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan. Bahkan kekuasaan di daerah

melahirkan raja-raja kecil yang justru mengalienasi kepentingan masyarakatnya. Munculnya konflik dan tindak kekerasan di daerah merupakan salah satu bukti kegagalan pemerintah daerah memahami kondisi masyarakatnya. Fakta ini sekaligus menghambat terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pusat, khususnya oleh Presiden bagi kepentingan daerah. Program nasional yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat terkendala oleh kepentingan segelintir elit daerah, termasuk penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini semua terjadi karena distribusi kekuasaan (otonomi daerah) dipahami sepenuhnya sebagai tujuan, bukan jalan atau cara untuk mendekatkan negara pada masyarakat¹. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia masih belum berjalan optimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan.

Kecenderungan pemekaran daerah dalam beberapa tahun terakhir ini secara langsung ataupun tidak langsung belum optimal memberikan pengaruh terhadap derajat kesejahteraan masyarakat di daerah induk maupun daerah otonom baru. Sehingga hal itu memerlukan penyempurnaan pengaturan yang dapat menjamin bahwa pemekaran yang terjadi saat ini dan akan datang akan bermanfaat bagi masyarakat². Berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri selama tiga tahun hanya 22% daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78% gagal³.

¹ <http://id.berita.yahoo.com/konflik-sosial-bukti-kegagalan-otonomi-daerah-001546786.html>

(Diakses 21 April 2013 pukul 20.00 WIB).

² <http://www.siwalimanews.com/post/otonomi-daerah-di-indonesia-belum-berjalan-optimal>

(Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).

³ <http://www.kemendagri.go.id/news/2012/06/18/otonomi-daerah-78-daerah-pemekaran-gagal>

(Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).

Munculnya konflik dan tindak kekerasan di daerah merupakan salah satu bukti kegagalan pemerintah daerah memahami kondisi masyarakatnya. Fakta ini sekaligus menghambat terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pusat, khususnya oleh Presiden bagi kepentingan daerah. Program nasional yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat terkendala oleh kepentingan segelintir elit daerah, termasuk penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini semua terjadi karena distribusi kekuasaan (otonomi daerah) dipahami sepenuhnya sebagai tujuan, bukan jalan atau cara untuk mendekatkan negara pada masyarakat. Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia masih belum berjalan optimal, sehingga tujuan dari kebijakan tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing dengan sistem desentralisasi.

Di era otonomi, masing-masing daerah berlomba-lomba memperbaiki sistem pelayanan publik di tingkat daerah. Perbaikan pelayanan publik tersebut akan terwujud apabila ada *political will* dari pimpinan yang didukung oleh bawahan atau para pegawai daerah ataupun sebaliknya, kesadaran itu muncul dari bawahan yang kemudian diakomodasi dan didukung oleh atasan. Hal tersebut tentunya mampu meningkatkan kualitas daerah dalam mengemban tugasnya untuk mengurus daerahnya guna mewujudkan kesuksesan otonomi. Begitu juga dalam hal peningkatan daya saing daerah, membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah sehingga apa yang dimiliki daerah dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat daerah. SDM-SDM di daerah khususnya yang bekerja di pemerintahan daerah, turut menentukan mampu tidaknya suatu daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan demikian, orang-orang yang duduk dalam pemerintahan daerah atau biasa disebut dengan PNS daerah, haruslah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, tidak hanya tugas harian tetapi juga mampu menciptakan program-program baru dan inovatif di pemerintahan daerah.

Kondisi selama ini, PNS di daerah diterima hanya melalui seleksi secara umum, belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintahan, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan kepada mereka tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam penentuan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Selain itu, banyak sekali kasus KKN yang terjadi di daerah ketika perekrutan PNS. Tidak sedikit dari mereka membayar ratusan juta kepada calo agar mereka bisa diterima sebagai PNS. Sehingga kinerja mereka bukan berdasarkan keahlian serta motivasi untuk berkontribusi kepada daerah, dampak buruknya dirasakan oleh masyarakat yang tidak memperoleh pelayanan dengan baik. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli dan inovatif dalam struktur pemerintahan daerah, membuat pemerintah daerah mandek, monoton, dalam menjalankan program daerah seperti program sebelumnya menjadikan daya saing daerah pun lemah, yang terjadi adalah

tujuan dari otonomi daerah tidak dapat terwujud pada suatu daerah⁴. Secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif pada kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerahnya.

Jumlah PNS yang dirasa tidak efisien dalam hal jumlahnya serta kualitasnya yang masih buruk, menimbulkan dampak lain dalam pemerintahan yaitu semakin memperbesar anggaran belanja pegawai. Idealnya, prioritas alokasi APBD adalah untuk program-program pembangunan namun ternyata banyak daerah-daerah yang alokasi APBD persentasenya lebih besar pada belanja pegawai. Sehingga kurangnya SDM-SDM yang berkualitas dan kapabel ditingkat daerah menyebabkan daerah tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, Dana Alokasi Umum dari pusat, juga tidak dapat dialokasikan secara efisien dalam menciptakan program-program pembangunan maupun perbaikan pelayanan masyarakat⁵. Dengan demikian, anggaran yang tersedia lebih dialokasikan pada belanja pegawai, bukan untuk pembangunan daerah, karena kurangnya kemampuan mereka dalam menggunakan anggaran secara efektif dan efisien dan berimbas pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk.

Di sisi lain, penyelenggaraan desentralisasi ini tentu saja memerlukan sumber pendanaan yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan

⁴ http://logowa.ui.ac.id/w/287_pentingnya-sdm-yang-berkualitas-dalam-pemerintahan/ (Diakses 8 April 2013 pukul 11.17 WIB).

⁵ http://logowa.ui.ac.id/w/287_pentingnya-sdm-yang-berkualitas-dalam-pemerintahan/ (Diakses 8 April 2013 pukul 11.17 WIB).

diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan yang diimpahkan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu, semakin besar PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Beberapa fakta diantaranya terjadi di wilayah Pemkot Batu dimana besarnya nilai investasi sekaligus nilai peningkatan kesejahteraan yang luar biasa tidak sebanding dengan besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan hasil survey lembaga pengkajian ekonomi Pemprop Jatim perkembangan investasi kabupaten dan kota se Jawa Timur, Kota Batu menempati rangking 2 setelah Kota Malang. Yakni, sebesar 6,91 persen atau mencapai Rp 700 miliar sampai pada tahun ini. Sedangkan sangat ironis pada pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Target sebesar Rp 30 miliar sampai dengan bulan

ini baru tercapai sekitar 26 persen saja. Bahkan pencapaian PAD itu sendiri hanya pada kisaran Rp 23 miliar saja.⁶

Selanjutnya di Semarang, Pendapatan Asli Daerah tergolong rendah yang berasal dari sejumlah retribusi di tahun 2012 karena tercatat masih terdapat kekurangan sekitar Rp 12 miliar. Pendapatan retribusi justru di bawah target dari target Rp 96 miliar sedangkan yang tercapai Rp 84 miliar dan belum diselidiki dengan jelas apa penyebabnya⁷. Contoh lain pada kota Kendal, segi kemampuan keuangan daerah, potensi anggaran pembangunan Kendal 2010 mencapai Rp.894,841 miliar, rinciannya APBD Kendal Rp. 828,122 miliar, bantuan Pemprov Jateng Rp.30,128 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat Rp 36,591 miliar. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kendal masih rendah, hanya Rp.75,733 miliar. Rendahnya pendapatan asli menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan pusat dan provinsi masih besar⁸. Itulah beberapa fakta mengenai rendahnya potensi beberapa daerah untuk mengembangkan pembangunan daerahnya sehingga Pendapatan Asli Daerah lah yang mengalami efek cukup besar karena hal tersebut.

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap struktur APBD. Dana Perimbangan berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhannya dengan mempertimbangkan kondisi,

⁶<http://www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962fb99c1bf6fae47db4e157d147cca0a41> (Diakses 20 Mei 2013 pukul 6.41 WIB).

⁷<http://www.ind-one-sia.com/news/read/1/1162274/DPRD-KOTA-SEMARANG-SOROTI-RENDAHNYA-PAD-RETRIBUSI.html> (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).

⁸http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=9409&mid=beritautama&sort_index=readed_count&order_type=desc (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).

potensi, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Saat ini, Dana Perimbangan menjadi suatu permasalahan dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya. Dimana Dana Perimbangan dianggap suatu bentuk ketidakmandirian pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dan meningkatkan pembangunan melalui pendapatan asli daerahnya sendiri. Dilihat dari komposisi sumber pendapatan tiap daerah (kabupaten/kota), dana perimbangan ini mempunyai peran yang sangat besar. Contohnya di tahun 2009, proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah secara nasional hampir mencapai 75% (DJPK, 2009 – diolah). Dari angka tersebut jelaslah bahwa daerah sangat tergantung pada dana perimbangan tersebut guna menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunannya. Sedangkan dari data terbaru mengenai transfer ke daerah pada tahun anggaran 2013, terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan salah satu bentuk transfer dana perimbangan sangat mendominasi transfer yang di alokasikan oleh pemerintah pusat sebanyak 58,86% (DJPK, 2013 – diolah).

Gambar I.1



(Sumber: djpk.depkeu.go.id – diolah)

Berdasarkan fakta tersebut, Dana Perimbangan saat ini justru semacam memberikan insentif terhadap inefisiensi belanja pegawai. Pada APBD 2011 misalnya, terdapat separuh lebih daerah (297 Kabupaten/Kota) yang memiliki belanja pegawai di atas 50%. DAU yang pada dasarnya diberikan bagi daerah untuk mengalokasikan sesuai kebutuhan daerah, justru habis terserap untuk pegawai. Di sisi lain, besaran alokasi DAU yang seharusnya diterima daerah, selalu kurang dari yang dimandatkan UU. Tercatat, Rp.52,2 trilyun selisih DAU pada tahun 2011 seharusnya diterima oleh daerah⁹. Hal ini menggambarkan adanya penyalahgunaan dana perimbangan yang dialokasikan untuk setiap daerah.

Hal ini menyebabkan laporan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin tidak jelas. Tahun 2009, pemerintah pusat mentransfer Rp. 309 trilyun kepada pemerintah daerah. Dari data yang didapat pada tahun 2009, sekitar 503 pemerintah daerah hanya 13 pemda yang laporan keuangannya mendapat hasil audit wajar tanpa pengecualian. Audit kinerja keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah setiap tahun menunjukkan tren meningkat. Tahun 2000, dana yang ditransfer ke daerah Rp 33,1 triliun, tetapi pada 2008 melonjak menjadi Rp 292,4 triliun dan 2009 mencapai Rp 309 triliun. Dana itu termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta dana otonomi khusus dan penyesuaian bagi daerah tertentu¹⁰. Berdasarkan fakta yang telah

⁹ http://www.seknasfitra.org/v1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=114&lang=in (Diakses 10 April 2013 pukul 18:02 WIB).

¹⁰ Harian Kompas. Diterbitkan hari Selasa, 31 Agustus 2010. Hal:5.

dipaparkan, mengenai pengalokasian dana perimbangan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Kasus-kasus mengenai peranan dana perimbangan dalam menggambarkan kondisi kinerja keuangan daerah nampaknya menjadi perhatian lebih untuk diteliti. Berbeda dengan PAD yang memang merupakan penerimaan daerah yang berasal dari kemampuan daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan potensinya seperti penerimaan pajak dan retribusi. Semakin baik potensi daerah dalam menghasilkan PAD, tentu semakin baik pula kinerjanya. Namun, potensi daerah dalam menghasilkan PAD tidak selamanya dikatakan baik jika dilihat kondisinya pendukungnya, yaitu keberadaan transfer dana pemerintah pusat terutama dana perimbangan yang terbukti seringkali melebihi 50% dibanding dana transfer lainnya. Apabila dana perimbangan menunjukkan nilai yang tinggi, tentu potensi daerah dalam menghasilkan PAD menjadi pertimbangan bahkan memunculkan pemikiran negatif terhadap kelangsungan pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan keadaan ini, nampak jelas bahwa dana perimbangan cukup mempengaruhi perkembangan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur pembangunannya masing-masing.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah di audit oleh BPK. Subjek yang akan diteliti yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Jawa sebanyak 118 Kabupaten/Kota. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia

muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini berada pusat pemerintahan, yang merupakan pusat kegiatan politik dan administrasi negara. Di Pulau Jawa terkonsentrasi sumber daya manusia Indonesia. Jumlah penduduk di Pulau mencapai 57,5% dimana paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 43.053.732 jiwa di tahun 2010. Di wilayah ini pun, fasilitas pendidikannya paling luas dan beragam, dan menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan berbagai ilmu pengetahuan dasar dan terapan¹¹. Bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa memang pulau yang strategis untuk melaksanakan segala kegiatan baik perindustrian maupun pemerintahan.

Namun, bertentangan dengan fakta diatas berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dimana diungkapkan bahwa sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) di Jawa diketahui nyaris bangkrut karena tidak mempunyai anggaran untuk membiayai operasional pemerintahan. Kenyataan tersebut berasal dari data hasil kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lembaga survei dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah daerah yang nyaris bangkrut ini sebagian besar berada di Pulau Jawa dan salah satu faktornya yaitu sebagian Pemda lebih besar biaya stafnya dibanding belanja modal¹². Meskipun memang hal ini dibantah oleh Mendagri bahwa tidak ada barometer yang dapat menunjukkan bahwa suatu Pemda bisa dikatakan bangkrut,

¹¹ <http://navperencanaan.com/appe/whypromotion/viewjawa> (Diakses 10 April 2013 pukul 20:02 WIB).

¹² <http://daerah.sindonews.com/read/2012/11/27/12/691985/banyak-pemda-akan-bangkrut> (Diakses 11 April 2013 pukul 08:00 WIB).

namun data yang diperoleh tersebut menunjukkan tidak cakupnya Pemda di Pulau Jawa dalam mengalokasi anggaran yang telah disediakan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya. Padahal dengan potensi daerah yang terbilang baik dan transfer dana APBN sudah dialokasikan untuk menunjang kinerja sesuai dengan potensi daerah tersebut, namun masih saja terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, timbul suatu pertanyaan mengenai keterkaitan transfer dana pusat berupa dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya:

1. Ketidaksiapan dalam pelaksanaan sistem desentralisasi
2. SDM yang kurang efisien
3. Kelebihan belanja pegawai
4. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5. Ketergantungan pada Dana Perimbangan

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dari beberapa faktor yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa kinerja keuangan daerah merupakan suatu alat ukur keberhasilan pemerintah daerah yang dipengaruhi beberapa faktor. Namun mengingat terbatasnya waktu dan data penelitian yang tersedia, peneliti membatasi permasalahan pada “Hubungan Antara Dana Perimbangan Dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa” dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas yang merupakan salah satu alat pengukuran kinerja keuangan daerah yang akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota?”

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber informasi yang akan memberikan pemahaman tentang hubungan dana perimbangan

dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota dan dapat dijadikan referensi guna menindaklanjuti penelitian terkait.

2. Praktis

- a. Bagi Peneliti, menambah wawasan peneliti terutama tentang akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu mata perkuliahan wajib untuk meneliti masalah dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa.
- b. Bagi Mahasiswa Pendidikan Akuntansi pada khususnya dan seluruh civitas akademika Universitas Negeri Jakarta pada umumnya, sebagai bahan masukan, tambahan wawasan, serta bahan kajian tentang dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
- c. Bagi Pelaku atau praktisi, sebagai bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan dan berguna sebagai acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
- d. Bagi Pembaca, sebagai sumber untuk menambah wawasan mengenai dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Kinerja

Menurut Robbins dalam Rai mengatakan bahwa: “kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama¹³”. Sedangkan menurut Ahuya dalam Rai (2008:41) bahwa: “kinerja adalah cara seseorang atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas¹⁴”. Selain itu, terdapat pula faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi kinerja. Yuwono dalam Tangkilisan mengemukakan:

“Faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi, dan kepemimpinan yang efektif¹⁵”.

Dari kedua definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum, terlihat bahwa istilah kinerja mengarah pada dua hal, yaitu proses dan hasil yang dicapai.

¹³ I Gusti Agung Rai, *Audit Kinerja Pada Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 40.

¹⁴ *Ibid.*, hal 41.

¹⁵ Hessel N.S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2007), hal 180.

b. Keuangan Daerah

Kinerja suatu pemerintahan daerah tentunya di nilai daerah kemampuan masing-masing daerah untuk mengembangkan potensinya yang dapat tercermin dari kondisi keuangan daerahnya. Mamesah dalam Halim mengungkapkan, keuangan daerah dapat diartikan sebagai:

“Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku¹⁶”.

Dari definisi tersebut, terdapat dua hal yang ditegaskan oleh Halim, yaitu¹⁷:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

¹⁶ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 19.

¹⁷ *Ibid.*, hal 20

Halim juga menambahkan bahwa: “kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah¹⁸”. Dapat dikatakan bahwa keuangan daerah merupakan suatu wujud dan cerminan kinerja pemerintahan suatu daerah.

Sebagaimana keuangan negara, keuangan daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Disamping itu, pengurusan akuntansi keuangan daerah juga dibagi menjadi dua, yakni pengurusan umum dan pengurusan khusus, seperti halnya pada keuangan Negara. Pengurusan umum dibagi menjadi dua, yaitu otorisator dan ordonator. Demikian pula pengurusan khusus juga berkaitan dengan kewajiban perbendaharaan.

Kuangan daerah perlu di tatabukukan dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggung jawabkan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan

¹⁸ *Ibid.*, hal 24.

keputusan serta perencanaan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan realisasi anggaran
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung disebut sebagai pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah¹⁹:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah.

2. Badan Eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan Keuangan Daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit pemerintah daerah dan lainnya.

3. Badan Pengawas Keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah

¹⁹ *Ibid.*, hal. 22.

Daerah. Yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, BPKP, dan BPK.

4. Investor, Kreditor, dan Donatur

Badan atau organisasi baik pemerintahan, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah.

5. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain.

6. Rakyat

Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan Pemerintah Daerah atau yang menerima produk dan jasa dari Pemerintah Daerah.

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Dengan demikian, keuangan daerah harus dikelola sebaik mungkin sehingga mampu menggambarkan keadaan daerah yang sebenarnya dan bisa dipertanggungjawabkan ke berbagai pihak.

c. Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Namun, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisa rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD, diantaranya²⁰:

²⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 127.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan

seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

4. Rasio Aktivitas (Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat di formulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang di perlukan untuk mencapai pertumbuhan yang di targetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

5. *Debt Service Coverage Ratio*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman)}}$$

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan

Sumber Daya Alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan penjumlahan angsurang pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi pontesi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan rasio-rasio diatas, dapat ditelusuri kinerja keuangan pemerintah daerah dari berbagai sisi dan aspek yang mendukung penilaian atas perkembangan pembangunan masing-masing daerah.

d. Pemerintah Daerah

Menurut Djaenuri, di mana pemerintah daerah merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh didalamnya ada komponen-komponen, yaitu kepala daerah, DPRD, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, serta perangkat otonom lain yang masing-masing memiliki fungsi tertentu yang saling terkait dan saling bergantung berdasarkan asas-asasnya.

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah

administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan pemerintahan daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang dilaksanakan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang tersebut mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah.

Selain itu, menurut Kansil dan Kansil²¹ diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan beberapa asas dan hal-hal terkait, diantaranya:

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

²¹ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal 141.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Lata belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi.

3. Asas Tugas Perbantuan

Asas tugas perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

4. Kepala Daerah

Menurut UU tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dimaksud dengan pemerintah daerah ialah kepala daerah, yaitu kepala daerah pada umumnya, seperti gubernur, bupati, dan walikotamadya, serta DPRD. Kedudukan kepala daerah memimpin bidang eksekutif. Mengingat luasnya tugas yang dihadapi oleh kepala daerah, perlu diadakan wakil kepala daerah. Akan tetapi, karena kondisi daerah berbeda-beda, pengisian jabatan wakil kepala daerah diadakan menurut kebutuhan. Tugas utama kepala daerah ialah memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab penuh atas jalannya pemerintah daerah.

5. Pemilihan Kepala Daerah

Tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala daerah tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat I dari sekurang-kurangnya tiga orang calon dan sebanyak-banyaknya lima orang calon. Hasil pemilihan DPRD itu sekurang-kurangnya dua orang calon, disampaikan oleh DPRD kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Presiden mengangkat salah seorang diantara kedua calon itu sebagai gubernur kepala daerah tingkat I.
- b. Kepala daerah tingkat II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD tingkat II dari sekurang-kurangnya tiga orang calon dan

sebanyak-banyaknya lima orang calon. Hasil pemilihan DPRD itu sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang calon, diajukan oleh DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur kepala daerah tingkat I. Salah seorang diantara kedua calon itu diangkat sebagai kepala daerah tingkat II (bupati atau wali – kotamadya).

6. Hak dan Kewajiban Kepala Daerah

Hak dan kewajiban kepala daerah diantaranya :

- a. Menjalankan pimpinan pemerintahan daerah sebagai kepala wilayah.
- b. Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sesuai dengan kedudukan Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
- c. Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD sekurang-kurangnya sekali setahun agar DPRD dapat mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
- d. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan sehubungan dengan hak dan kewajiban kepala daerah sebagai pimpinan daerah.

Atas dasar pemikiran asas dan sistem, sejalan dengan prinsip otonomi tersebut, dijalankan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa

untuk menangani urusan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional²². Itulah makna pelaksanaan otonomi daerah yang sebenar-benarnya berdasarkan asas dan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap pemerintah daerah.

2. Dana Perimbangan

a. Pengertian Dana Perimbangan

Secara mendasar, Suparmoko mengatakan: “Dana perimbangan merupakan salah satu pendapatan/penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”²³.

Lebih khusus lagi, Halim mengemukakan bahwa:

“Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah²⁴”.

Pernyataan tersebut diperjelas oleh Djaenuri yang mengatakan bahwa:

²² Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal 9.

²³ Suparmoko, *Ekonomi Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), hal 41.

²⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 19.

“Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik²⁵”.

Sidik pun menambahkan bahwa: “Dana Perimbangan adalah penerimaan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi²⁶”.

Dalam definisi yang lebih rinci, Nucholis mengatakan bahwa:

“Dana perimbangan adalah dana yang merupakan bagian daerah yang berasal dari dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus²⁷”.

Berdasarkan beberapa definisi diatas mengenai dana perimbangan, dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerahnya masing-masing.

b. Tujuan Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan hasil kebijakan pusat di bidang desentralisasi fiskal (*fiscal balance*) antara pusat dan daerah. Hanif

²⁵ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal 100.

²⁶ Mahfud Sidik. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta, 2002).

²⁷ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Grasindo), hal. 185.

Nurcholis menjabarkan tujuan dana perimbangan/kebijakan fiskal tersebut diantaranya²⁸:

1. Untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan anggaran pembangunan yang memadai.
2. Untuk mengintensifkan aktivitas dan kreativitas perekonomian masyarakat daerah yang berbasis pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah.
3. Untuk mendukung terwujudnya good governance, tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis, efektif, dan efisien.

Sedangkan menurut Colfer dkk, dana perimbangan dimaksudkan untuk beberapa tujuan sebagai berikut²⁹:

1. Mengatasi ketidakseimbangan vertikal antar tingkat pemerintah (bagi hasil dan dana alokasi umum).
2. Menyamakan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
3. Mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional.
4. Mendorong pencapaian pelayanan dan standar minimum.
5. Merangsang mobilisasi pendapatan.

²⁸ Ibid.,

²⁹ Carol J.P. Colfer, *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan* (Jakarta: Harapan Prima), hal. 176

Berdasarkan beberapa tujuan diatas, dana perimbangan dialokasikan guna meningkatkan pertumbuhan suatu daerah, mengatasi ketidakseimbangan kemampuan fiskal tiap pemerintah daerah dan tentunya mendorong terwujudnya kesuksesan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

c. Jenis-Jenis Dana Perimbangan

Halim mengemukakan, Dana Perimbangan dipisahkan menjadi lima jenis, yaitu³⁰:

1. Bagi Hasil Pajak, terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan pasal 21.
2. Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri atas provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah Negara, landrent, dan penerimaan dari iuran eksplorasi.
3. Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Estimasi untuk perhitungan anggaran DAU dihitung berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang berasal dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai

³⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hal 65.

kebutuhan tertentu. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

5. Dana Darurat, terdiri atas Dana Kontingensi.

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dibagi menjadi tiga pokok penting yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

d. Alokasi Dana Perimbangan

Pengalokasian dana perimbangan untuk pemerintahan daerah telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun ketetapan pemerintah, sebagai berikut:

1. Dana Bagian Daerah³¹

a. Bagian Daerah dari Penerimaan PBB

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian daerah dari PBB dibagi menjadi 16,2% untuk daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk

³¹ Op.Cit.,

biaya pemungutan yang disalurkan ke rekening kas negara dan daerah.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan Negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah, dengan rincian 16% untuk daerah provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil. Sedangkan bagian pemerintah pusat dari penerimaan bea ini dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

c. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.

1) Sektor kehutanan

Penerimaan negara dari SDA sektor kehutanan terdiri atas penerimaan iuran hak pengusaha hutan dan penerimaan provisi sumber daya hutan. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak pengusaha hutan dibagi dengan perincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan bagian daerah

penerimaan negara provinsi sumber daya hutan dibagi dengan perincian 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

2) Sektor pertambangan umum

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum terdiri dari penerimaan iuran tetap (*land-rent*) dan penerimaan iuran eksplorasi serta eksploitasi. Bagian daerah dari penerimaan negara iuran tetap dibagi menjadi 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota penghasil. Sedangkan bagian daerah dari penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi dibagi menjadi 16% untuk provinsi yang bersangkutan, 32% untuk kabupaten/kota penghasil, dan 32% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3) Sektor perikanan

Penerimaan negara dari sumber daya sektor perikanan terdiri atas penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari penerimaan ini dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

2. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada daerah, DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU. DAU bagi masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh daerah di seluruh Indonesia. Rumusnya dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$= \text{jumlah dana alokasi untuk daerah} \times \frac{\text{bobot daerah yang bersangkutan}}{\text{jumlah bobot dari seluruh daerah}}$$

Bobot daerah ditetapkan berdasarkan kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah.

3. Dana Alokasi Khusus

Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Kriteria teknis sektor/kegiatan yang dapat dibiayai dari DAK ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Sektor yang tidak dapat

dibiayai dari DAK adalah biaya administrasi, biaya penyiapan proyek fisik, biaya penelitian, biaya pelatihan, biaya perjalanan pegawai daerah dan lain-lain biaya umum sejenis.

Berdasarkan ketentuan diatas, pembagian berbagai jenis dana perimbangan telah disesuaikan berdasarkan fungsi dan kebutuhan masing-masing daerah yang berhak menerima transfer dari pusat berupa dana perimbangan tersebut.

B. Hasil Penelitian Relevan

Untuk menunjang hasil penelitian mengenai hubungan dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan dapat dijadikan acuan, diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh” oleh Ebit Julitawati (Universitas Syiah Kuala). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dimana hasil pengujian diperoleh nilai koefisien regresi (β_2) $\neq 0$ yaitu -0,003, berdasarkan hipotesis yang telah ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1% perubahan variable Dana Perimbangan

maka secara relative akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah sebesar 0,3%.

2. Penelitian yang berjudul “Analisis Dana Perimbangan dan Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Provinsi di Indonesia” oleh Ihyaul Ulum. Penelitian dilakukan untuk kurun waktu 2001-2003. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa DP 2001 berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah 2002. Dari model summary diperoleh nilai R Square (R^2) = 67,4% yang berarti bahwa DP 2001 dapat menjelaskan belanja daerah 2002 sebesar 67,4%. Sedangkan sisanya 32,6% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. Dari output hasil regresi diperoleh nilai t (hitung) sebesar 6,897. Pengujian two tails pada $\alpha = 5\%$ dan derajat bebas (df) $n - 1 = 24$, diperoleh nilai t (table) sebesar 2,064 sehingga dihasilkan $t(\text{hitung}) > t(\text{table})$. Dengan demikian, maka hipotesis yang menyatakan bahwa (H_0) DP tidak berpengaruh terhadap belanja daerah ditolak. Demikian pula untuk data tahun 2002 dan 2003.
3. Penelitian yang berjudul “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kemiskinan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat” oleh Andros Hasugian (Institut Pertanian Bogor). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan Analisis Regresi dengan Metode pendugaan *Ordinary Least Square* (OLS) terhadap data panel yaitu penggabungan antara data *time series* periode sebelum desentralisasi fiskal (1998 - 2000) dan periode masa desentralisasi fiskal (2001 - 2004) dengan *cross section* kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian dengan

menggunakan metode deskriptif menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan tingkat kemandirian lebih baik ketika sebelum desentralisasi fiskal. Indikasi tersebut dilihat dengan rasio PAD terhadap penerimaan daerah, sedangkan laju pengurangan kemiskinan lebih cepat pada masa desentralisasi fiskal. Hasil penelitian analisis regresi dengan metode panel data yang menganalisis peranan mekanisme transfer terhadap tingkat kemandirian menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan satu persen rasio DAU terhadap penerimaan maka akan menurunkan tingkat rasio PAD terhadap penerimaan sebesar 0,02 persen. Demikian juga dengan variabel dummy desentralisasi fiskal yang negatif dan signifikan yang artinya rasio PAD terhadap penerimaan relatif lebih kecil pada masa desentralisasi fiskal. Hasil penelitian analisis regresi dengan metode panel data yang menganalisis pengaruh dari penerimaan daerah berupa DAU, PAD, bagi hasil terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa dana transfer berupa DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Tetapi variabel dummy negative dan signifikan, yang artinya persentase penduduk miskin pada masa desentralisasi fiskal relatif lebih kecil. Hal ini menandakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memang berpihak pada kemiskinan.

4. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah” oleh Yulian Rinawaty Taaha. Penelitian ini dilakukan dengan merinci jenis dana perimbangan sehingga ada 3 variabel x yang diujikan terhadap y, yaitu

DBH, DAU, dan DAK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dana perimbangan dialokasikan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur ekonomi berdasarkan kebutuhan dapat mendorong kegiatan produksi barang atau jasa sehingga ekonomi daerah akan tumbuh.

5. Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat” oleh Al Fino Losa. Hasil penelitian dari perhitungan rasio-rasio keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola keuangan daerahnya masih belum begitu baik. Walaupun sudah dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, namun kabupaten/kotanya masih sangat kurang baik dalam kemandirian karena rendahnya PAD dibandingkan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

C. Kerangka Teoretik

Dalam era desentralisasi, setiap pemerintahan daerah memang dituntut agar menumbuh kembangkan kemandirian dalam meningkatkan potensi daerahnya sebagai wujud kinerja yang baik dan suatu bentuk kesiapan dalam menghadapi otonomi daerah. Sumber penerimaan daerah terbesar berasal dari pendapatan asli daerah dan transfer dari pusat, misalnya dana perimbangan.

Dalam penelitian kali ini, lebih dititik beratkan pada dana perimbangan yang merupakan sumber penerimaan yang dialokasikan dari pusat sebagai penunjang kebutuhan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah sudah cukup erat kaitannya secara positif terhadap kinerja keuangan daerah karena memang potensi yang dihasilkan masing-masing mampu menggambarkan pertumbuhan daerah tersebut. Namun, berbeda dengan dana perimbangan yang berasal dari transfer dana APBN dan pengalokasiannya diatur oleh undang-undang sesuai dengan potensi dan kebutuhan tiap daerah. Walaupun begitu, dana perimbangan dapat dipertimbangkan keberadaannya sebagai penunjang kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan gambaran perubahan suatu pembangunan daerah tersebut.

Sjafrizal mengungkapkan bahwa: “Perubahan penerimaan (berupa PAD dan dana perimbangan) dan belanja daerah akan langsung mempengaruhi kinerja pembangunan daerah yang bersangkutan³²”. Beberapa hal pun diungkapkan oleh Pheni Chalid, salah satunya menyatakan bahwa: “Pemberian kewenangan yang luas dalam perimbangan keuangan daerah akan berpotensi memunculkan sikap euphoria dari daerah yang akan menyebabkan daerah kurang memperhatikan kinerja keuangan³³”. Selain itu, Sigrid Widagdo memaparkan bahwa kapasitas kabupaten dan kota pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan kinerja dalam otonomi daerah tergantung pada dana

³² Sjafrizal, *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*.

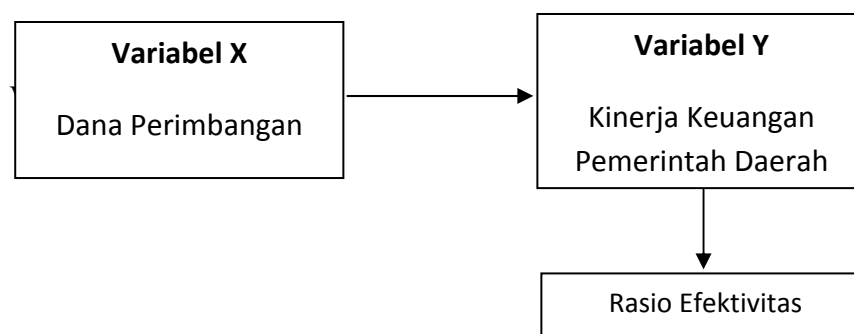
³³ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan* (Jakarta: Kemitraan, 2005), hal 12.

perimbangan yang diberikan oleh pusat³⁴. Peneliti menyimpulkan ada keterkaitan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan teori yang menghubungkan keduanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menduga bahwa apabila dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah itu nilainya cukup tinggi, dengan kata lain apabila ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pusat tinggi, akan menyebabkan rendahnya kemandirian suatu daerah yang akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah suatu daerah. Walaupun memang dana perimbangan fungsinya sebagai pemerataan potensi suatu daerah, terkadang pengalokasiannya seringkali disalahgunakan dan membuat suatu daerah semakin tergantung pada asupan dari pusat.

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran



³⁴ Sigid Widagdo Sabiq Al-Fauzi, dkk. "Policy Recommendations on Revision of Regional Fiscal Balance Funding", Seknas Fitra – Indonesian Forum for Budget Transparency.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan terdapat hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data empiris atau fakta yang sah (valid), benar dan dapat dipercaya (*reliable*) dengan pembuktian secara empiris mengenai hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa pada tahun 2006 - 2010.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan mulai dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 2013. Waktu tersebut dipilih karena merupakan waktu yang paling efektif bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan dengan mengambil data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah di audit yang peneliti dapatkan di Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berlokasi di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Pusat, Jalan Gatot Subroto Kab. 31 Jakarta Pusat 10210.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi kasus dengan pendekatan korelasional. Metode studi kasus merupakan penelitian yang memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat, serta

karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum³⁵.

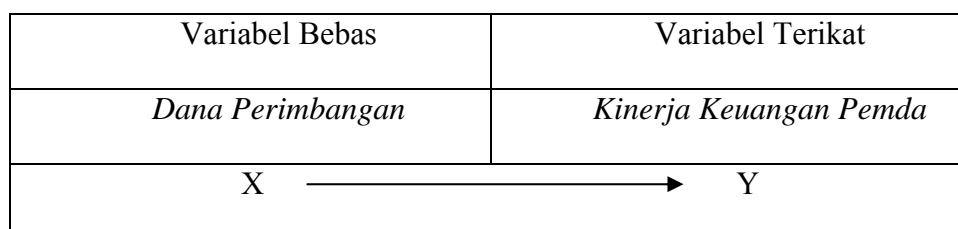
Sedangkan pendekatan korelasional bertujuan untuk membuktikan (berlandaskan pada data yang ada) apakah benar antara variabel yang satu dengan variabel lainnya terdapat hubungan³⁶. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara dana perimbangan sebagai variabel bebas dengan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel terikat.

D. Konstelasi Hubungan Antar Variabel

Konstelasi hubungan antar variabel digunakan untuk memberikan arah atau gambaran dari penelitian tersebut. Adapun variabel dari penelitian ini adalah Dana Perimbangan (Variabel X) dan Kinerja Keuangan Pemda (Variabel Y). Bentuk konstelasi hubungan antar variabel sebagai berikut :

Gambar III.1

Hubungan Antar Variabel



³⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004), hal. 10.

³⁶ Darwyan Syah, Supardi, Abd. Aziz Hasibuan, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), hal. 95

Keterangan :

X = Variabel bebas yaitu Dana Perimbangan

Y = Variabel Terikat yaitu Kinerja Keuangan Pemda

→ = Arah Hubungan

E. Populasi dan Sampling

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁷. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di Pulau Jawa sebanyak 118 Kabupaten/Kota.

Teknik pengambilan populasi terjangkau berdasarkan kriteria pertimbangan tertentu³⁸. Kriteria yang menjadi pertimbangan untuk menentukan populasi terjangkau dalam penelitian ini diantaranya:

1. LKPD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2006-2010

³¹ Sugiyono. *Metode penelitian bisnis* (Bandung : PT. Alfabeta, 2008), hal. 115.

³² *Ibid.*, hal. 392.

Dari kriteria tersebut, ditentukan populasi terjangkau sebanyak 106 kabupaten/kota di Pulau Jawa. Dari keseluruhan jumlah populasi terjangkau sebanyak 106 kabupaten/kota, berdasarkan teknik *simple random sampling* dengan tabel *Isaac* dan *Michael* (tingkat kesalahan 5%), jumlah pemerintah daerah yang menjadi sampel adalah 84 kabupaten/kota.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *expost facto*, yakni data yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Data yang digunakan pada penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya.

Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan yang didapat dari observasi singkat di Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK-RI. Data seperti ini disebut sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain dan yang akan digunakan oleh peneliti untuk proses lebih lanjut.

1. Dana Perimbangan (Variabel X)

a. Definisi Konseptual

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah,

yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

b. Definisi Operasional

Dana perimbangan dapat diperoleh dari jumlah DBH, DAU, dan DAK yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran setiap pemerintah daerah.

2. Kinerja Keuangan Pemda

a. Definisi Konseptual

Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah

b. Definisi Operasional

Kinerja keuangan dapat diukur dengan perhitungan rasio keuangan pemerintah daerah seperti rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, DSCR, serta rasio pertumbuhan. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan rasio efektivitas untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Rumusnya:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penertmaan PAD}}{\text{Target Penertmaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill}}$$

Tabel III.1
Kriteria Penilaian Efektivitas Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

(dalam Bisma, 2010)

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan melakukan uji regresi dan korelasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mencari Persamaan Regresi

$$\hat{Y} = a + bX \quad ^{39}$$

Dimana :

$$a = \frac{(\sum Y) (\sum X^2) - (\sum X) (\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

³³Sudjana, *Metode Statistika, Edisi Keenam* (Bandung : Tarsito), hal. 312.

Keterangan :

\dot{Y} = nilai terikat yang diramalkan

$\sum X$ = jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$ = jumlah skor dalam sebaran Y

a = variabel terikat sesungguhnya

b = koefisien

$\sum XY$ = jumlah hasil perkalian X dan Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum Y^2$ = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n = jumlah sampel

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas Galat Taksiran

Uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilakukan terhadap galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors, pada taraf signifikan (α) = 0,05 dengan rumus sebagai berikut :⁴⁰

$$L_{hitung} = | F(Z_i) - S(Z_i) |$$

Keterangan :

L_{hitung} = harga mutlak terbesar

⁴⁰ *Ibid.* hal. 466.

$F(Z_i) =$ Peluang angka baku

$S(Z_i) =$ Proporsi Angka Baku

Dengan Hipotesis Statistik :

H_0 : galat taksiran berdistribusi normal

H_1 : galat taksiran tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujian:

Terima H_0 , jika $L_{hitung} < L_{tabel}$

Tolak H_0 , jika $L_{hitung} > L_{tabel}$

Jika $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_0 diterima, berarti galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas Regresi

Uji linieritas regresi ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh merupakan bentuk linier atau non linier antara variabel X and variabel Y. Perhitungan regresi adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{S^2(TC)}{S^2(E)} \quad ^{41}$$

F_{tabel} dicari dengan menggunakan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k) $\alpha = 0,05$.

⁴¹ *Ibid.* hal. 332.

Hipotesis Statistik :

Ho : Model regresi linier

Hi : Model regresi tidak linier

Kriteria pengujian :

Ho diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, berarti model regresi linier

Ho ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model regresi tidak linier

3. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi

Digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh berarti atau tidak dengan kriteria $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis penelitian yang menyatakan ada hubungan antara variabel X dan Y dapat diterima.

Perhitungan keberartian regresi adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{S^2 \text{ reg}}{S^2 \text{ res}} \quad ^{42}$$

F_{tabel} dicari dengan menggunakan dk pembilang dan dk penyebut $(n - 2)$ pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$

Hipotesa statistik :

Ho = Koefisien arah regresi tidak berarti

⁴² *Ibid.* hal. 328.

H_i = Koefisien arah regresi berarti

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka regresi tidak berarti

H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka regresi berarti

Untuk mengetahui signifikansi persamaan regresi diatas, digunakan daftar analisis varians (ANOVA) bersama dengan pengujian kelinieran regresi, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2

Tabel Anava Untuk Uji Kelinieran Regresi

Variabel (X) dan Variabel (Y)

Sumber Variasi	Dk	JK	KT	Fh	Ftabel
Total	N	$\sum Y^2$	$\sum Y^2$	—	—
Regresi (a)	1	$(\sum Y)^2/n$	$(\sum Y)^2/n$		
Regresi (b/a)	1	$JK_{reg} = JK(b/a)$	$S^2_{reg} = JK(b/a)$	S^2_{reg}	$F(1-\alpha)(1, n-2)$
Residu (r)	n-2	$JK_{reg} = \sum(Y - \hat{Y})^2$	$S^2_{reg} = \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{n-2}$	S^2_{reg}	

Tuna Cocok	$k - 2$	JK (TC)	$S^2_{TC} = \frac{JK (TC)}{k - 2}$	$\frac{S^2_{TC}}{S^2_e}$	F (1- α) (k -2), (n-k)
Kekeliruan	$n - k$	JK (E)	$S^2_e = \frac{JK (E)}{n - k}$		

Keterangan :

JK = Jumlah kuadrat

KT = Rata-rata jumlah kuadrat

dk = derajat kebebasan

Hipotesis Statistik :

Ho = Regresi Linier

Hi = Regresi tidak linier

b. Uji Koefisien Korelasi

Digunakan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel penelitian dengan menggunakan rumus Product Moment Pearson sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n(\sum X^2) - (\sum X)^2)(n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

r_{xy} = tingkat keterkaitan hubungan (koefisien korelasi)

$\sum X$ = jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$ = jumlah skor dalam sebaran Y

$\sum XY$ = jumlah hasil perkalian X dan Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum Y^2$ = jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n = jumlah sampel

Analisis korelasi ini berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuatnya hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Nilai koefisien korelasi r berkisar -1 sampai $+1$ yang berarti nilai $r > 0$ terjadi hubungan linier positif, yaitu semakin besar nilai variabel X (independen), makin besar nilai variabel Y (dependen), atau makin kecil nilai variabel X maka kecil pula nilai variabel Y.

Hipotesis statistik :

$H_0 : \rho = 0$, berarti tidak ada hubungan variabel X dan variabel Y

$H_1 : \rho > 0$, berarti ada hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y

Kriteria Pengujian

Jika $r = 0$, berarti tidak ada hubungan antara variabel X dan Y

Jika $r > 0$, berarti ada hubungan positif antara variabel X dan Y

Jika $r < 0$, berarti ada hubungan negative antara variabel X dan Y

c. Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t)

Untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi digunakan uji t dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad 43$$

Keterangan :

t_{hitung} : skor signifikan koefisien korelasi

r : koefisien korelasi product moment

n : banyaknya sampel / data

t : skor signifikan koefisien data

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel tersebut, maka terlebih dahulu harus dicari harga t pada tabel nilai. Hal ini dilakukan dengan melihat derajat kebebasan (dk) = $n - 2$ dan taraf signifikan satu arah yang sudah ditentukan dengan tingkat kepercayaan sekitar 95% (resiko kesalahan yang secara statistic dinyatakan dengan $\alpha = 0,05$)

Hipotesis Statistik :

H_0 : tidak ada hubungan yang berarti

H_1 : terdapat hubungan yang berarti

Kriteria pengujian :

Terima H_0 bila $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$

Tolak H_0 bila $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka koefisien korelasi berarti.

⁴³ *Ibid.* hal. 377

d. Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besarnya variansi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat dihitung dengan menggunakan rumus angka persentase. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{KD = r^2_{xy} \times 100 \% }^{44}$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

r^2_{xy} = Koefisien Korelasi product moment

H. Hipotesis Statistika

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis statistika sebagai berikut:

$$H_0 : r_{xy} = 0$$

$$H_a : r_{xy} \neq 0$$

Pada $\alpha = 0,05$.

Keterangan : x = Dana Perimbangan

y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

⁴⁴ J. Supranto, *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Kelima* (Jakarta : Erlangga, 1993) hal. 146

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data hasil penelitian dimaksudkan untuk menyajikan gambaran umum pengolahan data masing-masing variabel. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi diberi simbol X, dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi diberi simbol Y, yakni Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan rasio efektivitas. Sampel ditentukan berdasarkan rata-rata mulai dari tahun 2006-2010 sehingga didapatkan 84 kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa (lampiran 7 hal. 108).

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efektivitas)

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu pembagian antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dan anggaran Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada masing-masing daerah mulai dari tahun 2006-2010, setelah itu di ambil nilai rata-ratanya untuk dijadikan data penelitian variabel Y. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, data rasio efektivitas terbesar diperoleh dari Kabupaten Sampang (Jawa Timur) sebesar 1,32 atau 132% sedangkan rasio terkecil sebesar 0,89 atau 89% yang diperoleh dari Kabupaten Lebak (Banten).

Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel Y, yakni rasio efektivitas sebagai alat ukur kinerja keuangan pemda. Data rasio efektivitas untuk variable Y ini mempunyai rata-rata sebesar 1,09, standar deviasi (S) sebesar 0,807, dan varians (S^2) sebesar 0,0065, serta jumlah seluruh data adalah 91,85, dengan nilai terbesar 1,32 serta nilai terkecil 0,89 (lampiran 12 hal 115).

Dari data yang ada dibuatlah distribusi frekuensi untuk variabel Y dengan cara menghitung range, banyaknya kelas interval, panjang kelas interval dan juga panjang kelas dengan menggunakan rumus Sturges. Range dari variabel Y adalah sebesar 0,43 dengan banyak kelas interval (K) adalah 7 kelas dengan menggunakan rumus Sturges ($K= 1+3,3 \log n$) dan panjang kelas interval adalah 0,06 (lampiran 10 hal 110).

Data selengkapnya tentang rasio efektivitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini.

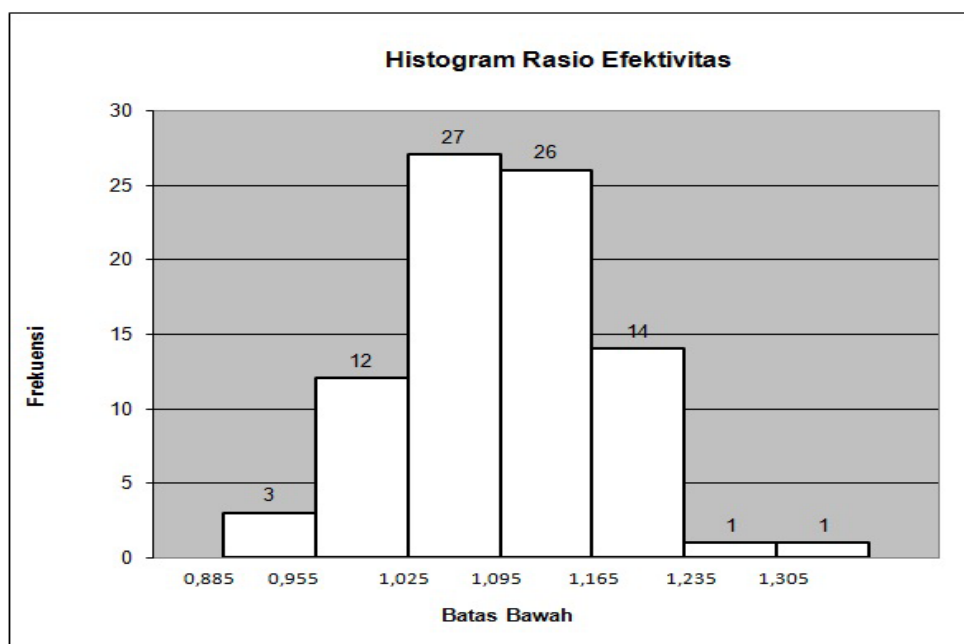
DISTRIBUSI FREKUENSI RASIO EFEKTIVITAS

No	Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi	Frek Relatif
1	0,89	-	0,95	0,885	0,955	3	3,57%
2	0,96	-	1,02	0,955	1,025	12	14,29%
3	1,03	-	1,09	1,025	1,095	27	32,14%
4	1,10	-	1,16	1,095	1,165	26	30,95%
5	1,17	-	1,23	1,165	1,235	14	16,67%
6	1,24	-	1,30	1,235	1,305	1	1,19%
7	1,31	-	1,38	1,305	1,385	1	1,19%
Jumlah						84	100%

Sumber: Data penelitian diolah tahun 2013

Pada tabel tersebut digambarkan bahwa yang memiliki frekuensi terbanyak ada pada kelas interval antara 1,03 - 1,09 yaitu sebanyak 27 sampel (32,14%). Hal ini menunjukkan bahwa 32,14% sampel nilai rasio efektivitas berada pada rentang tersebut. Sedangkan nilai yang memiliki frekuensi terkecil ada pada kelas interval 1,24 - 1,30 dan 1,31 – 1,38 dengan nilai rasio efektivitas masing-masing sebanyak 1 sampel (1,19%) pada rentang ini. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa 1,19% sampel nilai rasio efektivitas berada pada rentang tersebut.

Dari data distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan grafik histogram untuk Rasio Efektivitas, sebagai berikut:



Gambar IV. 1

Grafik Histogram Variabel Y (Rasio Efektivitas)

Sumber: Data penelitian diolah tahun 2013

Berdasarkan gambar histogram di atas terlihat bahwa frekuensi tertinggi berada pada kelas ketiga dengan batas nyata 1,025 – 1,095 sedangkan frekuensi terendah berada pada kelas keenam dan ketujuh dengan batas nyata 1,305 - 1,385.

2. Dana Perimbangan

Data Dana Perimbangan di dapat dari laporan realisasi anggaran setiap kabupaten/kota yang merupakan hasil penjumlahan antara DBH, DAU, dan DAK mulai dari tahun 2006-2010, setelah itu di ambil nilai rata-rata setiap sampel (kabupaten/kota) untuk dijadikan data penelitian variabel Y. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diperkecil untuk menyesuaikan dengan variable terikat (Y), masing-masing data dibulatkan dalam seratus milyar. Sehingga data Dana Perimbangan terbesar diperoleh dari Kabupaten Cianjur (Jawa Barat) sebesar (dibulatkan seratus milyar) sedangkan Dana Perimbangan terkecil sebesar 2,699 atau 2,70 yang diperoleh dari Kota Salatiga (Jawa Tengah).

Berikut dapat dijabarkan deskripsi statistik dari variabel X, yakni Dana Perimbangan. Data Dana Perimbangan untuk variable X ini mempunyai rata-rata sebesar 6,07, standar deviasi (S) sebesar 1,72, dan varians (S^2) sebesar 2,94, serta jumlah seluruh data adalah 510,08, dengan nilai terbesar 9,62 serta nilai terkecil 2,70 (lampiran 11 hal 113).

Dari data yang ada dibuatlah distribusi frekuensi untuk variabel X dengan cara menghitung range, banyaknya kelas interval, panjang kelas interval dan juga panjang kelas dengan menggunakan rumus Sturges. Range dari variabel X adalah sebesar 6,92 dengan banyak kelas interval (K) adalah 7 kelas dengan menggunakan rumus Sturges ($K = 1 + 3,3 \log n$) dan panjang kelas interval adalah 1,05 (lampiran 10 hal 110).

Data selengkapnya tentang Dana Perimbangan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini.

DISTRIBUSI FREKUENSI DANA PERIMBANGAN

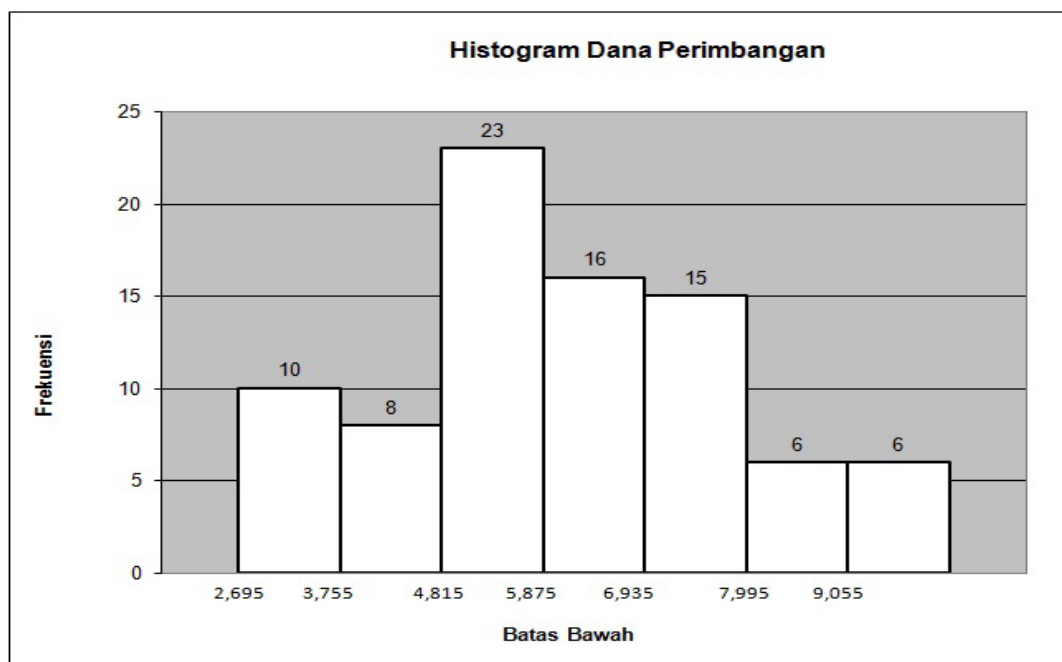
No	Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi	Frek Relatif
1	2,70	-	3,75	2,695	3,755	10	11,90%
2	3,76	-	4,81	3,755	4,815	8	9,52%
3	4,82	-	5,87	4,815	5,875	23	27,38%
4	5,88	-	6,93	5,875	6,935	16	19,05%
5	6,94	-	7,99	6,935	7,995	15	17,86%
6	8,00	-	9,05	7,995	9,055	6	7,14%
7	9,06	-	10,11	9,055	10,115	6	7,14%
Jumlah						84	100%

Sumber: Data penelitian diolah tahun 2013

Pada tabel tersebut digambarkan bahwa yang memiliki frekuensi terbanyak ada pada kelas interval antara 4,82 - 5,87 yaitu sebanyak 23 sampel (27,38%). Hal ini menunjukkan bahwa 27,38% sampel nilai Dana Perimbangan berada pada rentang tersebut. Sedangkan nilai yang memiliki frekuensi terkecil ada pada kelas interval 8,00 – 9,05 dan 9,06 – 10,11 dengan nilai Dana Perimbangan masing-masing sebanyak 6 sampel (7,14%) pada

rentang ini. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa 7,14% sampel nilai Dana Perimbangan berada pada rentang tersebut.

Dari data distribusi frekuensi di atas dapat digambarkan grafik histogram untuk Rasio Efektivitas, sebagai berikut:



Gambar IV.2

Grafik Histogram Variabel X (Dana Perimbangan)

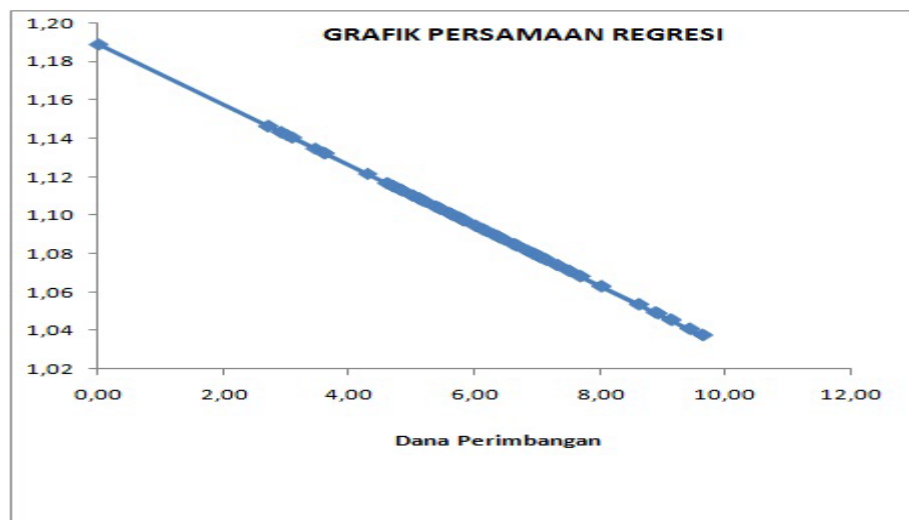
Sumber: Data penelitian diolah tahun 2013

Berdasarkan gambar histogram di atas terlihat bahwa frekuensi tertinggi berada pada kelas ketiga dengan batas nyata 4,815 – 5,875 sedangkan frekuensi terendah berada pada kelas keenam dan ketujuh dengan batas nyata 9,055 – 10,115.

B. Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana yang bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana dana perimbangan mempunyai hubungan fungsional dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hubungan yang didapat pada umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik. Persamaan regresi linier $\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$ (lampiran 14 hal 118). Grafik persamaan regresi linier sederhana $\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$ dapat dilihat dibawah ini :



Gambar IV. 3

Grafik Persamaan Linier

Sumber: Data penelitian diolah tahun 2013

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa regresi berbentuk linier, dimana $a = 1,19$ dan $b = -0,02$ maka dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan satu skor X akan menurunkan nilai Y sebesar 0,02 pada konstanta 1,19.

2. Uji Persyaratan Analisis

a. Uji Normalitas Galat Taksiran

Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah galat taksiran Y dan X berdistribusi normal atau tidak. Pengujian galat taksiran dengan menggunakan uji liliefors pada taraf signifikan ($\alpha = 0,05$) untuk sampel sebanyak 84 dari masing-masing hasil rata-rata setiap kabupaten/kota di Pulau Jawa dengan kriteria pengujian data berdistribusi normal, apabila $L_o < L_t$ dan jika sebaliknya maka galat taksiran regresi Y atas X tidak berdistribusi normal.

Dari hasil perhitungan uji normalitas data (lampiran 16 hal 121) dapat diperoleh nilai L_{hitung} terbesar 0,0546 dan L_{tabel} $n = 84$ pada taraf signifikan $\alpha = 0,05$ adalah 0,0967. Karena $L_{hitung} < L_{tabel}$ maka H_o diterima, artinya galat taksiran Y atas X berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas Regresi

Uji kelinieran regresi bertujuan untuk mengetahui apakah regresi yang digunakan linier atau tidak. Kriteria pengujian, terima H_o jika F_{hitung} (F_h) $< F_{tabel}$ (F_t) dan tolak H_o jika (F_h) $> (F_t)$, dimana H_o adalah model regresi linier dan H_a adalah model regresi berarti/signifikan, maka dalam hal ini kita harus menolak H_o . Hasil perhitungan menunjukkan (F_h) $0,97 < F_t$ (2,61) ini berarti H_o diterima dan model regresi linier. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tabel ANOVA (lampiran 20 dan 21 hal 129).

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Keberartian Regresi

Dalam uji hipotesis terdapat uji keberartian regresi yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan berarti atau tidak. Kriteria pengujian yaitu diterima H_0 jika $F_{hitung} (F_o) < F_{tabel} (F_t)$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} (F_o) > F_{tabel} (F_t)$, dimana H_0 adalah model regresi tidak berarti dan H_a adalah model regresi berarti/signifikan, maka dalam hal ini kita harus menolak H_0 .

Berdasarkan hasil perhitungan F_o sebesar 10,37 dan untuk F_t adalah 3,69, sehingga dalam pengujian ini dapat disimpulkan bahwa $(F_o) 10,37 > (F_t) 3,96$ ini berarti H_0 ditolak dan sampel dinyatakan memiliki regresi berarti. Pengujian dilakukan dengan tabel ANOVA. (lampiran 20 dan 21 hal 129).

Tabel IV. 3

Tabel ANOVA

Untuk Uji Keberartian dan Uji Kelinieran Regresi

ANOVA LINIER						
Sumber Variasi	dk	JK	KT	F H	F Tabel	
Total	84					
Regresi (a)	1	100,43	100,43			
Regresi (b/a)	1	0,06	0,06			<i>Ho harus ditolak</i>
Residu	$n-2=(84-2=82)$	0,48	0,01	10,37	3,96	Regresi berarti
Tuna Cocok	$k-2=(74-2=72)$	0,42	0,01			<i>Ho tidak harus ditolak</i>
Kekeliruan (e)	$n-k=(84-74=10)$	0,06	0,01	0,97	2,61	Regresi linier

Keterangan:

JK: Jumlah Kuadrat

KT: Kuadrat Tengah (rata-rata kuadrat)

dk: Derajat Kebebasan

b. Uji Koefisien Korelasi

Pengujian koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui besar atau kuatnya hubungan antara variabel X dan variabel Y. Penelitian ini menggunakan rumus koefisien korelasi *product moment* dari Pearson.

Dari hasil perhitungan diperoleh $r_{xy} = -0,34$. Ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemda (dengan alat ukur rasio efektivitas) karena $r_{xy} < 0$, maka H_0 diterima. Yang berarti jika Dana Perimbangan meningkat maka Kinerja Keuangan Pemda akan mengalami penurunan. (lampiran 22 hal 131).

c. Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Pengujian keberartian koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan antara variabel X dan variabel Y dengan menggunakan uji t dengan taraf dk (82). Kriteria pengujian, tolak H_0 jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat korelasi yang signifikan, terima H_0 jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka korelasi yang terjadi tidak berarti (tidak signifikan).

Dari hasil perhitungan diperoleh t_{hitung} (t_h) 3,22 sedangkan t_{tabel} dengan taraf 0,05 dan dk 82, diperoleh nilai sebesar 1,67, karena t_h 3,22 sedangkan t_{tabel} 1,67 maka H_0 diterima (lampiran 23 hal 133). Jadi, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah negatif dan signifikan.

d. Uji Koefisien determinasi

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi suatu variabel terhadap variabel lainnya, dalam penelitian ini adalah seberapa besar variasi Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda. Koefisien determinasi ini dinyatakan dalam prosentase. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi didapat sebesar 11,23% (lampiran 24 hal 134). Hal ini berarti bahwa besar kecilnya kinerja keuangan pemda hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan dana perimbangan. Pengaruhnya sebesar 11,23% dan sisanya sebesar 88,77% dipengaruhi oleh faktor lain.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diatas hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model persamaan regresi adalah $\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$. Pengujian normalitas menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi yang dipakai adalah data berdistribusi normal. Hasil uji kelinieran dan keberartian regresi menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dipakai adalah berbentuk linier dan berarti. Selanjutnya dari perhitungan koefisien

korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemda. Di mana setiap peningkatan dana perimbangan akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemda, walaupun pengaruhnya masih tergolong rendah. Korelasi antar variabel penelitian ini pun diperkuat dengan keberartian korelasi yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup berarti (signifikan).

Hubungan negatif antar variabel ini dikarenakan keberadaan dana perimbangan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah serta meminimalkan terjadinya defisit sehingga apabila dana perimbangan yang tercermin tergolong besar, akan menyebabkan ketidakmandirian suatu daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati (Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala) pada tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Hasil pengujian secara parsial, diperoleh nilai koefisien regresi (B_2) $\neq 0$ yaitu -0,003, berdasarkan hipotesis yang telah ditetapkan maka ditarik kesimpulan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya setiap 1% perubahan variabel Dana Perimbangan maka secara relatif akan mempengaruhi penurunan kinerja

keuangan pemerintah sebesar 0,3%.⁴⁵ Hasil penelitian ini memiliki makna sejalan dengan hasil yang diujikan oleh peneliti.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.

Meskipun penelitian telah dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan, peneliti menyadari ada keterbatasan-keterbatasan yang dialami dan tidak sepenuhnya hasil penelitian ini mencapai tingkat kebenaran yang mutlak. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang peneliti alami dalam meneliti hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemda ini antara lain adalah sebagai berikut:

⁴⁵ Ebit Julitawati, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh”, *Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, ISSN 2302-0164 Vol. 1 Tahun I No. 1, Agustus 2012 p. 1-15.

1. Terbatasnya penggunaan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya di dapat dari nilai rata-rata daerah di setiap tahunnya, dikarenakan begitu banyaknya populasi yang akan di ujikan apabila semuanya dijadikan sampel.

2. Terbatasnya variabel yang diteliti

Dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti satu variabel saja yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu hanya menggunakan dana perimbangan sedangkan masih terdapat banyak variabel lain yang juga berpengaruh besar terhadap kinerja keuangan pemda.

3. Jumlah data dan periode penelitian

Jumlah data dan periode penelitian yang digunakan cukup banyak, yaitu kabupaten/kota di Pulau Jawa dalam 5 periode tahun. Apabila perhitungan sampel berdasarkan populasi seluruh tahun tentu akan terlalu banyak dengan keterbatasan penggunaan teknologi untuk mengolah data. Sehingga data sampel setiap variabel berdasarkan rata-rata, tidak menggambarkan per satuan tahun/periode nya.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data statistik, deskripsi, analisis, dan interpretasi data yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2006 – 2010.

Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti. Kedua variabel tersebut memiliki korelasi negatif sebesar $-0,34$ dan signifikan sebesar $3,22$, yakni apabila dana perimbangan mengalami peningkatan, akan mempengaruhi penurunan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sedangkan berdasarkan koefisien determinasinya, dana perimbangan pun mempengaruhi kinerja keuangan walaupun dari seluruh hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara kedua variabel masih tergolong dalam kategori rendah.

Berdasarkan hal tersebut, penerimaan dana perimbangan yang semakin besar menggambarkan keadaan suatu daerah yang masih rendah potensinya untuk meningkatkan kinerjanya, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang tergambar dalam rasio efektivitas. Terlihat bahwa masih terdapat ketergantungan akan bantuan dari pemerintah pusat untuk untuk wilayah

Pulau Jawa walaupun tingkatannya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa tergolong wilayah yang sangat potensial dalam urusan pengembangan wilayahnya. Pulau Jawa adalah pulau yang memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia terkonsentrasi di wilayah ini. Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini berada pusat pemerintahan, yang merupakan pusat kegiatan politik dan administrasi negara.

Dana perimbangan yang seringkali mendominasi penerimaan beberapa daerah yang disebabkan karena kurang maksimalnya kinerja yang dicapai. Keberadaannya yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah serta meminimalkan terjadinya defisit sehingga apabila dana perimbangan yang tercermin tergolong besar, akan menyebabkan ketergantungan akan bantuan pusat untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya.

B. Implikasi

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang dilihat dari rasio efektivitas. Rasio efektivitas merupakan gambaran mengenai kondisi penerimaan pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu faktor yang berperan besar dalam perubahan kinerja keuangan suatu daerah. Dengan

demikian, bisa dikatakan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh di mana apabila penerimaan dana perimbangan tersebut tinggi, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan dikarenakan terlalu bergantungnya suatu daerah terhadap bantuan dari pusat.

Hal ini menggambarkan di tengah kepesatan potensi Pulau Jawa sebagai wilayah yang tingkat kemajuannya cukup tinggi, masih terdapat sedikit ketergantungan beberapa daerahnya terhadap dana perimbangan. Dengan kata lain, masih ada beberapa daerah di Pulau Jawa yang memiliki potensi rendah dalam meningkatkan kinerjanya. Penyebabnya antara lain daerah yang terkena bencana dalam jangka panjang (misalnya Kabupaten Sidoarjo) dan daerah-daerah yang terletak didaerah pedesaan atau jauh dari pusat perniagaan. Penyebab lainnya pun dikarenakan pendapatan asli daerah yang rendah sehingga kinerja cenderung rendah pula disertai dengan penyalahgunaan dana yang menyebabkan kondisi keuangan daerah semakin memburuk.

C. Saran

Untuk mengevaluasi kondisi yang telah dicapai berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan daerahnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan asli daerah sendiri sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat pun tidak terlalu besar.
2. Bagi pemerintah daerah, diharapkan untuk mengelola keuangannya dengan baik agar dana perimbangan yang pada awalnya digunakan untuk menunjang kekurangan daerah, justru malah terpakai untuk belanja pegawai.
3. Bagi pemerintah pusat, diharapkan adanya suatu prosedur yang jelas dan terarah mengenai pengalokasian dan penggunaan dana perimbangan yang disalurkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana perimbangan.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan sampel dari pulau lain dengan menggunakan beberapa rasio lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah seperti rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio pertumbuhan, DSCR, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, Pheni. *Keuangan Daerah Investasi dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta: Kemitraan, 2005.
- Colfer, Carol J.P. *Pelajaran dari Desentralisasi Kehutanan*. Jakarta: Harapan Prima.
- Djaenuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- Julitawati, Ebit. Jurnal Akuntansi. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2012.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rai, I Gusti Agung. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sidik, Mahfud. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah: Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta, 2002.
- Sjafrizal. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. _____
- Sudjana. *Metode Statistika*. Edisi Enam. Bandung: Tarsito, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : PT. Alfabeta, 2008.
- Suparmoko. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Supranto, J. *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Kelima*. Jakarta : Erlangga, 1993.
- Syah, Darwyan, Supardi, Abd. Aziz Hasibuan. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Gaung Persada Press, 2007.
- Tangkilisan, Hessel N.S. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Sumber dari internet :

- Widianto, Willy. *Konflik Sosial Bukti Kegagalan Otonomi Daerah*. 2012.
<http://id.berita.yahoo.com/konflik-sosial-bukti-kegagalan-otonomi-daerah/001546786.html> (Diakses 21 April 2013 pukul 20.00 WIB).

- Harian Siwalima. *Otonomi Daerah di Indonesia Belum Berjalan Optimal*. 2012. <http://www.siwalimanews.com/post/otonomi-daerah-di-indonesia-belum-berjalan-optimal> (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).
- Kemendagri. *Otonomi Daerah-78% Daerah Pemekaran Gagal*. 2012. <http://www.kemendagri.go.id/news/2012/06/18/otonomi-daerah-78-daerah-pemekaran-gagal> (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).
- Handini, R. Shela. *Pentingnya SDM yang Berkualitas Dalam Pemerintahan*. 2010. http://logowa.ui.ac.id/w/287_pentingnya-sdm-yang-berkualitas-dalam-pemerintahan/ (Diakses 8 April 2013 pukul 11.17 WIB).
- Tribun News. *PAD Bone Menurun Drastis*. 2012. <http://id.berita.yahoo.com/pad-bone-menurun-drastis-081511670.html> (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).
- Istibsaroh, Nur. *DPRD Kota Semarang Soroti Rendahnya PAD Retribusi*. 2013. <http://www.ind-one-sia.com/news/read/1/1162274/DPRD-KOTA-SEMARANG-SOROTI-RENDAHNYA-PAD-RETRIBUSI.html> (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).
- Pemprov Jateng. *Kabupaten Kendal Mampu Wujudkan Kawasan Ekonomi Khusus*. 2010. http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=9409&mid=beritautama&sort_index=readed_count&order_type=desc (Diakses 22 April 2013 pukul 02.10 WIB).
- Farhan, Yuna. *Buruk Rupa Perimbangan Keuangan, Buruk Pula Kesejahteraan Rakyat Daerah*. 2011 http://www.seknasfitra.org/v1/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=114&lang=in (Diakses 10 April 2013 pukul 18:02 WIB).
- Kemendagri. *Keunggulan Pulau Jawa*. <http://navperencanaan.com/appe/whypromotion/viewjawa> (Diakses 10 April 2013 pukul 20:02 WIB).
- Steven, Ronald. *Banyak Pemda akan bangkrut?*. 2012 <http://daerah.sindonews.com/read/2012/11/27/12/691985/banyak-pemda-akan-bangkrut> (Diakses 11 April 2013 pukul 08:00 WIB).

<http://www.djpk.depkeu.go.id>

<http://www.jatimprov.go.id/site/kabupaten-kota/>

<http://jabarprov.go.id/index.php/subMenu/1067>

<http://www.jatengprov.go.id>

Media cetak :

Harian Kompas. *Keuangan Daerah Tidak Jelas*. Diterbitkan hari Selasa, 31 Agustus 2010. Hal:5.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR JUMLAH KABUPATEN DAN KOTA MENURUT PROVINSI

No	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Jumlah Kabupaten	Jumlah Kota	Total
11	31	DKI Jakarta	1	5	6
12	32	Jawa Barat	17	9	26
13	33	Jawa Tengah	29	6	35
14	34	DI Yogyakarta	4	1	5
15	35	Jawa Timur	29	9	38
16	36	Banten	4	4	8
total					118

Daftar Kabupaten dan Kotamadya di Provinsi DKI Jakarta

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3101	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	10.18	1.53
2	3171	Kotamadya Jakarta Selatan	154.32	23.24
3	3172	Kotamadya Jakarta Timur	182.70	27.51
4	3173	Kotamadya Jakarta Pusat	52.38	7.89
5	3174	Kotamadya Jakarta Barat	124.44	18.74
6	3175	Kotamadya Jakarta Utara	139.99	21.08
	3100	Provinsi DKI Jakarta	664.01	100.00

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3201	Kabupaten Bogor	2,710.62	7.66
2	3202	Kabupaten Sukabumi	4,145.70	11.72
3	3203	Kabupaten Cianjur	3,840.16	10.85
4	3204	Kabupaten Bandung	1,767.96	5.00
5	3205	Kabupaten Garut	3,074.07	8.69
6	3206	Kabupaten Tasikmalaya	2,551.19	7.21
7	3207	Kabupaten Ciamis	2,424.71	6.85
8	3208	Kabupaten Kuningan	1,110.56	3.14
9	3209	Kabupaten Cirebon	984.52	2.78
10	3210	Kabupaten Majalengka	1,204.24	3.40
11	3211	Kabupaten Sumedang	1,518.33	4.29
12	3212	Kabupaten Indramayu	2,040.11	5.77
13	3213	Kabupaten Subang	1,893.95	5.35

14	3214	Kabupaten Purwakarta	825.74	2.33
15	3215	Kabupaten Karawang	1,652.20	4.67
16	3216	Kabupaten Bekasi	1,224.88	3.46
17	3217	Kabupaten Bandung Barat	1,305.77	3.69
18	3271	Kota Bogor	118.50	0.33
19	3272	Kota Sukabumi	48.25	0.14
20	3273	Kota Bandung	167.67	0.47
21	3274	Kota Cirebon	37.36	0.11
22	3275	Kota Bekasi	206.61	0.58
23	3276	Kota Depok	200.29	0.57
24	3277	Kota Cimahi	39.27	0.11
25	3278	Kota Tasikmalaya	171.61	0.49
26	3279	Kota Banjar	113.49	0.32
	3200	Provinsi Jawa Barat	35,377.76	100.00

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3301	Kabupaten Cilacap	2,124.47	6.48
2	3302	Kabupaten Banyumas	1,335.30	4.07
3	3303	Kabupaten Purbalingga	677.55	2.07
4	3304	Kabupaten Banjarnegara	1,023.73	3.12
5	3305	Kabupaten Kebumen	1,211.74	3.69
6	3306	Kabupaten Purworejo	1,091.49	3.33
7	3307	Kabupaten Wonosobo	981.41	2.99
8	3308	Kabupaten Magelang	1,102.93	3.36
9	3309	Kabupaten Boyolali	1,008.45	3.07
10	3310	Kabupaten Klaten	658.22	2.01
11	3311	Kabupaten Sukoharjo	489.12	1.49
12	3312	Kabupaten Wonogiri	1,793.67	5.47
13	3313	Kabupaten Karanganyar	775.44	2.36
14	3314	Kabupaten Sragen	941.54	2.87
15	3315	Kabupaten Grobogan	2,013.86	6.14
16	3316	Kabupaten Blora	1,804.59	5.50
17	3317	Kabupaten Rembang	887.13	2.70
18	3318	Kabupaten Pati	1,489.19	4.54
19	3319	Kabupaten Kudus	425.15	1.30
20	3320	Kabupaten Jepara	1,059.25	3.23
21	3321	Kabupaten Demak	900.12	2.74
22	3322	Kabupaten Semarang	950.21	2.90
23	3323	Kabupaten Temanggung	837.71	2.55
24	3324	Kabupaten Kendal	1,118.13	3.41

25	3325	Kabupaten Batang	788.65	2.40
26	3326	Kabupaten Pekalongan	837.00	2.55
27	3327	Kabupaten Pemalang	1,118.03	3.41
28	3328	Kabupaten Tegal	876.10	2.67
29	3329	Kabupaten Brebes	1,902.37	5.80
30	3371	Kota Magelang	16.06	0.05
31	3372	Kota Surakarta	46.01	0.14
32	3373	Kota Salatiga	57.36	0.17
33	3374	Kota Semarang	373.78	1.14
34	3375	Kota Pekalongan	45.25	0.14
35	3376	Kota Tegal	39.68	0.12
	3300	Provinsi Jawa Tengah	32,800.69	100.00

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi DI. Yogyakarta

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3401	Kabupaten Kulon Progo	586.28	18.71
2	3402	Kabupaten Bantul	508.13	16.22
3	3403	Kabupaten Gunung Kidul	1,431.42	45.69
4	3404	Kabupaten Sleman	574.82	18.35
5	3471	Kota Yogyakarta	32.50	1.04
	3400	Provinsi DI. Yogyakarta	3,133.15	100.00

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3501	Kabupaten Pacitan	1,389.92	2.91
2	3502	Kabupaten Ponorogo	1,305.70	2.73
3	3503	Kabupaten Trenggalek	1,147.22	2.40
4	3504	Kabupaten Tulungagung	1,055.65	2.21
5	3505	Kabupaten Blitar	1,336.48	2.80
6	3506	Kabupaten Kediri	1,386.05	2.90
7	3507	Kabupaten Malang	3,530.65	7.39
8	3508	Kabupaten Lumajang	1,790.90	3.75
9	3509	Kabupaten Jember	3,092.34	6.47
10	3510	Kabupaten Banyuwangi	5,782.40	12.10
11	3511	Kabupaten Bondowoso	1,525.97	3.19
12	3512	Kabupaten Situbondo	1,669.87	3.49
13	3513	Kabupaten Probolinggo	1,696.21	3.55
14	3514	Kabupaten Pasuruan	1,474.02	3.08
15	3515	Kabupaten Sidoarjo	634.38	1.33
16	3516	Kabupaten Mojokerto	717.83	1.50

17	3517	Kabupaten Jombang	1,115.09	2.33
18	3518	Kabupaten Nganjuk	1,224.25	2.56
19	3519	Kabupaten Madiun	1,037.58	2.17
20	3520	Kabupaten Magetan	688.84	1.44
21	3521	Kabupaten Ngawi	1,295.98	2.71
22	3522	Kabupaten Bojonegoro	2,198.79	4.60
23	3523	Kabupaten Tuban	1,834.15	3.84
24	3524	Kabupaten Lamongan	1,782.05	3.73
25	3525	Kabupaten Gresik	1,191.25	2.49
26	3526	Kabupaten Bangkalan	1,001.44	2.10
27	3527	Kabupaten Sampang	1,233.08	2.58
28	3528	Kabupaten Pamekasan	792.24	1.66
29	3529	Kabupaten Sumenep	1,998.54	4.18
30	3571	Kota Kediri	63.40	0.13
31	3572	Kota Blitar	32.57	0.07
32	3573	Kota Malang	145.28	0.30
33	3574	Kota Probolinggo	56.67	0.12
34	3575	Kota Pasuruan	35.29	0.07
35	3576	Kota Mojokerto	16.47	0.03
36	3577	Kota Madiun	33.92	0.07
37	3578	Kota Surabaya	350.54	0.73
38	3579	Kota Batu	136.74	0.29
	3500	Provinsi Jawa Timur	47,799.75	100.00

Daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

No.	Kode	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase thdp Luas Provinsi (%)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2,746.89	28.43
2	3602	Kabupaten Lebak	3,426.56	35.46
3	3603	Kabupaten Tangerang	1,011.86	10.47
4	3604	Kabupaten Serang	1,734.28	17.95
5	3671	Kota Tangerang	153.93	1.59
6	3672	Kota Cilegon	175.50	1.82
7	3673	Kota Serang	266.71	2.76
8	3674	Kota Tangerang Selatan	147.19	1.52
	3600	Provinsi Banten	9,662.92	100.00

Sumber: <http://indonesiadata.co.id>

LAMPIRAN 2

Data Penelitian Tahun 2006

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bandung	136.408.772.000,00	137.532.999.196,23	1.455.354.087.137,00
2	Kabupaten Bekasi	153.960.320.641,00	172.659.680.141,97	702.888.808.083,00
3	Kabupaten Bogor	222.372.952.000,00	230.103.978.513,00	1.087.193.696.438,00
4	Kabupaten Ciamis	30.984.042.315,00	36.207.946.469,00	862.517.030.514,00
5	Kabupaten Cianjur	65.142.186.799,15	60.622.839.474,69	781.716.523.079,00
6	Kabupaten Cirebon	88.828.419.480,00	92.348.943.457,00	836.321.588.902,00
7	Kabupaten Garut	62.543.259.126,00	62.952.615.115,00	978.396.385.248,00
8	Kabupaten Indramayu	45.204.531.285,00	51.147.530.185,90	797.609.520.519,00
9	Kabupaten Kuningan	35.878.671.897,00	35.732.696.856,50	598.363.006.295,00
10	Kabupaten Majalengka	46.813.604.644,91	50.043.010.324,46	611.069.317.365,00
11	Kabupaten Karawang	79.863.242.250,00	112.643.722.347,00	746.395.861.565,00
12	Kabupaten Purwakarta	51.398.226.634,00	51.781.137.454,00	449.461.980.381,00
13	Kabupaten Subang	47.639.652.395,00	58.626.201.058,00	675.508.047.413,00
14	Kabupaten Sukabumi	47.460.085.000,00	53.645.183.151,00	778.584.932.812,00
15	Kabupaten Sumedang	62.259.510.810,87	71.954.644.787,00	620.209.027.261,00
16	Kabupaten Tasikmalaya	22.846.209.826,81	35.440.800.921,30	800.748.249.084,00
17	Kota Bandung	238.305.532.000,00	253.882.919.542,87	1.139.910.819.397,00
18	Kota Banjar	14.743.118.080,00	18.541.972.851,00	225.167.569.575,00
19	Kota Bekasi	143.168.711.613,00	145.730.557.611,44	724.327.482.518,00
20	Kota Bogor	63.353.915.442,00	69.300.010.034,00	390.618.179.647,00
21	Kota Cimahi	51.565.020.920,00	50.325.670.467,00	282.017.171.765,00
22	Kota Cirebon	58.074.335.115,00	54.066.030.168,00	362.592.289.395,00
23	Kota Depok	68.631.174.736,00	67.218.328.356,49	428.046.089.723,00
24	Kota Sukabumi	40.260.643.000,00	43.564.078.599,00	284.478.215.352,00
25	Kota Tasikmalaya	47.458.577.000,00	49.402.378.700,34	421.265.704.328,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Banjarnegara	34.714.417.634,00	43.899.815.043,00	508.823.878.944,00
2	Kabupaten Banyumas	68.835.633.400,00	85.499.779.470,00	676.406.556.626,00
3	Kabupaten Batang	25.156.165.000,00	31.030.139.653,00	384.259.617.416,00
4	Kabupaten Blora	31.966.607.000,00	36.490.526.771,00	501.479.083.785,00
5	Kabupaten Boyolali	52.487.248.702,00	59.307.283.906,00	568.245.881.577,00
6	Kabupaten Brebes	43.268.202.000,00	47.995.353.586,00	666.403.958.331,00
7	Kabupaten Cilacap	59.953.206.000,00	78.895.457.229,00	756.291.312.404,00
8	Kabupaten Demak	29.768.463.300,00	33.811.855.276,00	464.057.166.943,00
9	Kabupaten Grobogan	38.088.981.214,00	41.912.109.850,00	566.609.671.356,00
10	Kabupaten Jepara	52.631.057.000,00	54.110.689.680,00	508.391.757.366,00

11	Kabupaten Karanganyar	36.634.670.700,00	46.052.120.123,00	501.675.627.794,00
12	Kabupaten Kebumen	42.309.994.000,00	92.533.083.135,00	621.253.257.378,00
13	Kabupaten Kendal	57.193.768.400,00	63.330.008.493,00	509.212.142.036,00
14	Kabupaten Klaten	35.864.742.000,00	33.919.999.845,00	692.153.369.053,00
15	Kabupaten Kudus	53.491.680.068,00	51.311.619.700,16	475.539.077.133,00
16	Kabupaten Magelang	53.618.072.000,00	62.226.400.207,00	601.169.686.113,00
17	Kabupaten Pati	59.152.047.000,00	66.128.698.439,00	610.513.155.926,00
18	Kabupaten Pekalongan	26.720.072.000,00	30.803.316.110,00	444.512.762.559,00
19	Kabupaten Pemalang	54.160.894.000,00	59.457.261.933,00	550.720.405.167,00
20	Kabupaten Purbalingga	42.521.949.000,00	47.632.931.727,00	437.578.150.310,00
21	Kabupaten Purworedjo	36.565.600.089,00	32.024.960.588,00	484.520.560.386,00
22	Kabupaten Rembang	36.246.692.000,00	39.875.926.531,00	436.050.622.607,00
23	Kabupaten Semarang	60.549.632.636,00	66.625.755.644,00	468.636.796.209,00
24	Kabupaten Sragen	44.622.142.000,00	52.019.759.755,00	565.911.944.399,00
25	Kabupaten Sukoharjo	35.724.137.450,00	44.008.080.723,00	505.263.085.040,00
26	Kabupaten Tegal	47.079.397.000,00	53.852.887.454,00	569.673.938.910,00
27	Kabupaten Temanggung	38.603.942.681,00	31.643.817.256,00	424.485.786.156,00
28	Kabupaten Wonogiri	44.947.249.364,00	47.864.477.636,00	608.529.365.644,00
29	Kabupaten Wonosobo	25.533.351.000,00	30.618.484.033,00	430.488.712.395,00
30	Kota Magelang	29.389.593.000,00	36.954.055.592,81	253.545.555.274,00
31	Kota Semarang	215.620.647.610,00	224.822.679.542,00	796.384.046.779,00
32	Kota Surakarta	74.709.440.000,00	78.637.865.549,00	431.666.955.420,00
33	Kota Pekalongan	17.574.372.157,00	20.427.641.016,00	246.208.410.726,00
34	Kota Tegal	59.647.411.000,00	63.725.637.475,00	218.054.950.157,00
35	Kota Salatiga	29.770.340.000,00	32.449.466.498,00	240.234.010.983,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bangkalan	29.545.756.863,33	28.727.154.355,37	504.008.138.130,78
2	Kabupaten Banyuwangi	39.815.687.352,00	53.725.937.573,73	752.198.352.345,33
3	Kabupaten Blitar	30.034.439.550,00	35.767.439.074,42	627.235.657.555,10
4	Kabupaten Bojonegoro	45.963.054.493,49	44.811.490.462,59	657.998.353.907,58
5	Kabupaten Bondowoso	22.180.939.672,00	23.570.350.539,08	413.520.860.730,48
6	Kabupaten Gresik	86.596.007.236,46	101.602.882.176,89	546.956.192.602,78
7	Kabupaten Jember	53.189.640.812,73	67.376.342.213,35	874.661.235.907,54
8	Kabupaten Jombang	56.102.699.653,00	66.303.981.352,24	554.385.237.164,58
9	Kabupaten Kediri	43.818.617.641,70	53.470.810.803,73	676.627.245.840,73
10	Kabupaten Lamongan	39.294.555.300,00	43.058.501.192,83	609.802.181.824,87
11	Kabupaten Lumajang	38.159.879.100,00	45.999.080.044,01	491.736.798.587,23
12	Kabupaten Madiun	21.792.536.902,00	24.270.699.290,73	466.596.870.054,08
13	Kabupaten Magetan	28.263.525.500,00	31.396.279.819,79	499.867.090.256,78
14	Kabupaten Malang	58.478.510.000,00	69.651.783.859,98	946.184.614.888,26
15	Kabupaten Mojokerto	18.548.038.000,00	20.588.253.666,62	256.318.959.429,78

16	Kabupaten Nganjuk	9.580.802.540,00	52.045.924.054,47	578.633.652.388,77
17	Kabupaten Ngawi	16.097.673.751,00	20.248.348.420,48	527.711.825.392,40
18	Kabupaten Pamekasan	29.568.703.895,00	34.421.162.750,14	453.702.751.905,20
19	Kabupaten Pasuruan	59.505.489.457,62	64.662.002.633,37	591.868.992.389,79
20	Kabupaten Ponorogo	30.242.636.048,00	35.639.052.182,47	531.986.043.650,70
21	Kabupaten Probolinggo	22.224.192.000,00	32.188.565.275,17	530.569.115.170,00
22	Kabupaten Sampang	13.095.021.875,00	19.617.722.793,98	418.263.261.859,78
23	Kabupaten Sidoarjo	160.315.879.933,99	178.026.166.944,00	802.814.422.863,06
24	Kabupaten Situbondo	17.908.671.896,86	23.029.415.454,41	424.074.161.241,96
25	Kabupaten Sumenep	34.905.022.610,00	38.991.458.833,70	569.095.677.666,58
26	Kabupaten Trenggalek	21.387.825.295,00	23.420.083.038,79	462.169.533.870,48
27	Kabupaten Tuban	57.820.550.140,00	78.358.570.804,27	567.003.244.760,86
28	Kabupaten Tulungagung	34.558.616.097,00	37.984.246.718,87	611.830.904.619,71
29	Kota Batu	11.119.524.102,45	11.065.945.714,30	213.231.708.747,00
30	Kota Kediri	49.323.094.065,00	52.906.292.845,54	427.905.607.871,78
31	Kota Madiun	18.485.922.000,00	19.362.751.778,53	269.236.865.642,78
32	Kota Malang	30.871.262.802,50	32.123.673.031,21	484.053.106.747,24
33	Kota Mojokerto	18.548.038.000,00	20.588.253.666,62	256.318.959.429,78
34	Kota Pasuruan	14.014.785.008,00	20.757.929.815,34	239.021.211.965,78
35	Kota Probolinggo	4.719.214.100,00	5.392.873.370,00	271.728.621.270,78
36	Kota Surabaya	524.973.925.275,00	538.369.935.680,00	1.173.847.572.708,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Kulon Progo	30.074.914.284,76	35.203.275.122,35	394.744.066.201,00
2	Kabupaten Bantul	31.779.625.336,79	44.005.310.869,67	555.614.340.014,95
3	Kabupaten Gunung Kidul	30.235.598.650,00	29.801.036.248,67	496.521.378.289,46
4	Kabupaten Sleman	75.792.320.330,00	90.710.095.117,40	560.768.371.448,00
5	Kota Yogyakarta	95.257.494.000,00	96.419.456.304,52	397.150.853.946,12

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Pandeglang	25.666.449.000,00	19.256.374.470,00	540.993.895.105,00
2	Kabupaten Lebak	33.479.668.750,00	36.756.673.922,00	558.384.447.337,00
3	Kabupaten Tangerang	246.846.682.381,00	231.338.787.866,00	1.026.412.048.931,00
4	Kabupaten Serang	90.486.910.395,00	99.003.600.322,00	623.383.467.870,00
5	Kota Tangerang	122.228.416.207,00	131.857.486.293,95	493.883.955.178,00
6	Kota Cilegon	104.750.459.700,00	112.242.853.817,00	245.308.350.248,00

Data Penelitian Tahun 2007

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bandung	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	1.519.650.675.014,00
2	Kabupaten Bekasi	165.986.698.872,00	196.320.104.849,44	798.411.987.466,00
3	Kabupaten Bogor	267.698.550.000,00	265.371.324.234,35	1.182.448.317.646,00
4	Kabupaten Ciamis	51.977.822.219,00	54.711.929.114,00	901.417.451.456,00
5	Kabupaten Cianjur	70.392.516.981,00	69.277.703.810,00	900.121.946.166,00
6	Kabupaten Cirebon	113.778.155.384,70	100.692.757.876,00	801.518.681.776,00
7	Kabupaten Garut	79.510.324.318,00	76.880.011.092,00	1.059.197.960.456,00
8	Kabupaten Indramayu	46.268.564.000,00	47.704.563.196,00	783.987.115.369,00
9	Kabupaten Kuningan	42.826.079.397,00	43.507.886.549,00	645.819.164.607,00
10	Kabupaten Majalengka	46.579.791.678,55	46.020.646.259,00	682.539.224.157,00
11	Kabupaten Karawang	99.256.298.319,00	121.414.897.648,00	840.659.182.647,00
12	Kabupaten Purwakarta	54.137.200.522,00	50.324.496.708,00	465.783.130.616,00
13	Kabupaten Subang	50.351.940.278,60	55.628.451.145,00	750.538.114.758,00
14	Kabupaten Sukabumi	62.313.042.000,00	66.799.344.793,34	932.137.876.016,00
15	Kabupaten Sumedang	74.038.757.571,49	69.493.500.676,00	641.760.956.303,00
16	Kabupaten Tasikmalaya	29.170.929.239,50	34.725.529.177,00	838.933.281.339,00
17	Kota Bandung	281.981.582.739,00	287.249.534.045,00	1.097.176.115.472,00
18	Kota Banjar	22.944.875.315,00	23.615.908.225,45	336.382.501.601,00
19	Kota Bekasi	166.283.245.632,00	171.045.088.714,99	703.242.987.764,00
20	Kota Bogor	71.687.047.669,00	79.819.169.545,00	457.400.189.168,00
21	Kota Cimahi	56.033.235.423,00	55.851.469.205,00	333.948.767.156,00
22	Kota Cirebon	60.149.741.350,00	62.785.311.466,00	380.267.141.300,00
23	Kota Depok	75.457.361.773,64	86.345.667.454,00	514.781.124.577,00
24	Kota Sukabumi	44.019.844.000,00	49.464.332.552,00	334.292.251.204,00
25	Kota Tasikmalaya	56.083.901.000,00	58.604.933.911,17	437.189.278.042,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Banjarnegara	41.058.286.000,00	44.872.943.821,00	533.980.012.916,00
2	Kabupaten Banyumas	84.943.310.176,00	96.386.444.659,00	715.730.127.218,00
3	Kabupaten Batang	28.416.713.000,00	30.968.198.154,00	437.572.485.283,00
4	Kabupaten Blora	30.732.453.000,00	41.620.458.144,00	572.589.364.573,00
5	Kabupaten Boyolali	61.446.847.000,00	67.461.523.228,00	602.054.731.837,00
6	Kabupaten Brebes	44.432.782.000,00	65.143.359.664,00	716.573.217.010,00
7	Kabupaten Cilacap	70.878.010.000,00	82.143.538.311,00	872.609.934.041,00
8	Kabupaten Demak	28.495.393.064,00	34.892.163.617,00	524.308.321.108,00
9	Kabupaten Grobogan	47.359.543.857,00	53.458.621.480,00	631.220.514.573,00
10	Kabupaten Jepara	57.610.457.000,00	64.342.554.250,00	550.746.666.539,00
11	Kabupaten Karanganyar	53.050.726.320,00	56.923.919.078,00	537.018.340.868,00

12	Kabupaten Kebumen	52.469.399.582,00	54.260.879.712,00	672.981.634.926,00
13	Kabupaten Kendal	70.716.653.060,00	75.781.451.178,00	533.302.725.702,00
14	Kabupaten Klaten	45.034.305.944,66	42.533.395.946,00	728.760.540.210,00
15	Kabupaten Kudus	54.911.956.000,00	55.181.618.104,48	522.470.022.913,00
16	Kabupaten Magelang	64.255.206.029,00	70.074.706.177,00	634.337.010.050,00
17	Kabupaten Pati	60.001.045.000,00	69.152.375.409,40	647.003.971.234,00
18	Kabupaten Pekalongan	37.117.857.216,00	42.341.231.906,00	486.164.793.901,00
19	Kabupaten Pemalang	52.026.512.000,00	55.835.580.243,00	579.326.009.919,00
20	Kabupaten Purbalingga	51.593.414.000,00	52.727.439.340,00	488.217.133.556,00
21	Kabupaten Purworedjo	41.900.725.800,00	44.187.840.276,00	546.332.435.227,00
22	Kabupaten Rembang	40.029.635.000,00	42.255.838.407,00	437.253.201.427,00
23	Kabupaten Semarang	66.494.527.974,00	70.860.500.623,00	530.422.051.377,00
24	Kabupaten Sragen	54.025.636.000,00	65.257.982.596,00	589.545.059.123,00
25	Kabupaten Sukoharjo	38.621.230.250,00	42.449.908.063,00	535.324.822.730,00
26	Kabupaten Tegal	58.073.801.000,00	63.363.141.231,00	597.762.487.323,00
27	Kabupaten Temanggung	36.020.006.006,00	34.884.602.048,00	454.999.372.867,00
28	Kabupaten Wonogiri	43.408.292.000,00	50.329.495.080,00	642.073.551.671,00
29	Kabupaten Wonosobo	31.976.440.000,00	36.582.606.528,00	466.009.740.151,00
30	Kota Magelang	30.969.916.000,00	35.814.844.996,19	276.703.274.596,00
31	Kota Semarang	222.447.630.197,00	238.237.998.997,00	773.906.285.389,00
32	Kota Surakarta	88.034.379.000,00	89.430.977.982,00	451.279.770.315,00
33	Kota Pekalongan	21.781.570.947,00	25.750.108.695,00	287.414.311.252,00
34	Kota Tegal	58.119.094.000,00	62.259.146.681,00	267.742.567.259,00
35	Kota Salatiga	32.118.484.000,00	36.192.748.028,00	253.276.996.203,00

N o	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bangkalan	29.200.955.015,00	29.206.086.670,72	551.245.007.379,00
2	Kabupaten Banyuwangi	48.991.503.286,00	61.103.267.230,61	811.191.558.955,00
3	Kabupaten Blitar	38.052.514.664,39	42.669.991.051,72	691.795.644.958,87
4	Kabupaten Bojonegoro	45.971.173.919,53	56.462.090.334,23	668.674.182.353,00
5	Kabupaten Bondowoso	30.374.184.174,66	30.178.867.621,79	460.487.813.538,00
6	Kabupaten Gresik	114.309.545.858,00	115.311.154.262,29	571.328.119.972,00
7	Kabupaten Jember	68.752.732.073,85	78.000.265.431,68	982.842.955.439,00
8	Kabupaten Jombang	69.170.329.503,00	80.438.355.306,38	596.730.291.514,00
9	Kabupaten Kediri	49.273.910.361,63	57.046.594.939,36	700.049.696.404,00
10	Kabupaten Lamongan	51.362.945.115,00	55.639.143.647,41	659.965.223.305,71
11	Kabupaten Lumajang	48.222.500.000,00	53.685.793.918,98	558.456.064.941,00
12	Kabupaten Madiun	26.413.339.754,00	27.439.735.253,67	493.879.565.658,00
13	Kabupaten Magetan	33.960.183.000,00	37.100.922.507,84	527.038.521.935,00
14	Kabupaten Malang	71.651.826.500,00	84.353.897.087,92	1.013.910.109.904,00
15	Kabupaten Mojokerto	42.939.927.500,00	50.799.369.666,51	560.030.774.264,00

16	Kabupaten Nganjuk	45.332.214.154,20	54.624.853.919,78	625.023.935.580,00
17	Kabupaten Ngawi	21.106.223.831,00	20.735.830.465,98	558.712.272.847,00
18	Kabupaten Pamekasan	30.807.218.180,98	33.477.790.921,02	497.884.166.130,85
19	Kabupaten Pasuruan	60.010.543.432,00	72.066.759.157,06	653.716.806.290,00
20	Kabupaten Ponorogo	35.876.740.204,00	39.100.921.078,06	582.077.813.727,00
21	Kabupaten Probolinggo	29.128.950.000,00	38.060.637.922,05	582.581.481.369,00
22	Kabupaten Sampang	18.114.657.200,00	25.280.747.941,59	465.202.281.611,14
23	Kabupaten Sidoarjo	178.206.361.792,17	190.905.404.878,17	792.540.890.022,00
24	Kabupaten Situbondo	22.780.462.136,12	29.481.697.080,40	455.096.216.059,00
25	Kabupaten Sumenep	37.841.026.967,00	40.923.650.785,56	623.524.165.361,00
26	Kabupaten Trenggalek	26.468.054.645,00	30.975.537.854,00	515.290.886.307,00
27	Kabupaten Tuban	66.179.827.728,74	79.235.378.722,35	577.460.724.956,00
28	Kabupaten Tulungagung	40.152.474.206,00	50.994.780.307,61	659.168.229.084,00
29	Kota Batu	12.802.148.511,75	13.283.274.381,07	237.794.617.054,25
30	Kota Kediri	68.007.922.654,58	72.485.751.709,60	406.271.957.198,00
31	Kota Madiun	19.593.760.000,00	22.444.565.604,67	286.299.474.362,00
32	Kota Malang	80.875.966.418,00	87.115.734.710,46	507.367.762.441,00
33	Kota Mojokerto	17.431.210.700,00	26.061.952.699,82	255.951.219.709,00
34	Kota Pasuruan	14.710.663.884,00	18.331.133.619,84	253.257.608.466,00
35	Kota Probolinggo	28.114.882.900,00	35.428.918.239,12	284.728.369.076,00
36	Kota Surabaya	584.742.410.284,00	607.649.295.691,00	1.174.145.489.791,00

N o	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Kulon Progo	35.344.379.551,00	38.637.833.503,34	441.229.946.509,37
2	Kabupaten Bantul	46.240.676.769,60	57.229.726.493,62	602.943.019.186,00
3	Kabupaten Gunung Kidul	22.228.567.310,00	28.878.356.546,15	532.642.916.441,00
4	Kabupaten Sleman	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	621.561.288.361,00
5	Kota Yogyakarta	104.162.882.000,00	114.098.350.942,31	439.159.224.538,00

N o	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Pandeglang	46.531.050.000,00	41.840.679.158,00	614.238.879.480,00
2	Kabupaten Lebak	51.461.107.636,00	48.937.969.974,00	599.540.142.939,00
3	Kabupaten Tangerang	239.911.906.000,00	285.899.513.074,00	1.104.868.448.843,00
4	Kabupaten Serang	117.303.633.000,00	122.583.540.802,00	747.835.394.703,00
5	Kota Tangerang	133.412.795.107,00	156.523.829.302,02	616.391.578.819,00
6	Kota Cilegon	85.779.891.817,00	92.625.606.151,00	317.495.473.693,00

Data Penelitian Tahun 2008

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bandung	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	1.132.888.252.124,00
2	Kabupaten Bekasi	180.210.510.155,00	249.063.806.936,00	977.738.732.256,00
3	Kabupaten Bogor	290.940.055.000,00	316.635.690.464,00	1.336.366.431.200,00
4	Kabupaten Ciamis	42.374.481.573,00	46.847.498.084,00	1.014.825.032.547,00
5	Kabupaten Cianjur	82.949.311.969,50	77.805.506.963,00	1.000.783.909.665,00
6	Kabupaten Cirebon	119.064.200.652,00	101.512.669.939,00	873.786.725.982,00
7	Kabupaten Garut	88.587.228.645,00	83.306.424.295,00	1.176.755.778.323,52
8	Kabupaten Indramayu	66.453.451.000,00	56.706.255.295,76	865.651.117.721,00
9	Kabupaten Kuningan	48.719.265.217,00	42.825.180.706,00	702.905.179.861,00
10	Kabupaten Majalengka	47.500.377.423,00	47.721.941.970,00	730.072.518.256,00
11	Kabupaten Karawang	118.452.073.807,00	131.785.038.542,00	924.076.915.725,00
12	Kabupaten Purwakarta	62.138.310.325,00	59.429.026.565,00	507.422.380.889,00
13	Kabupaten Subang	61.200.511.067,00	59.251.535.094,00	835.630.516.869,00
14	Kabupaten Sukabumi	73.960.603.202,00	87.402.424.551,00	1.005.322.262.092,00
15	Kabupaten Sumedang	86.056.574.849,00	87.633.522.120,38	703.854.176.364,00
16	Kabupaten Tasikmalaya	37.695.483.605,00	47.194.342.024,00	912.656.608.607,00
17	Kota Bandung	338.376.369.006,00	314.627.155.412,00	1.360.460.067.955,00
18	Kota Banjar	24.399.597.243,00	23.782.320.837,31	266.144.017.905,00
19	Kota Bekasi	178.369.891.660,00	189.492.858.525,12	799.679.143.747,00
20	Kota Bogor	83.098.271.499,00	97.768.134.591,00	520.164.868.769,00
21	Kota Cimahi	62.154.346.389,00	64.964.960.822,00	385.339.766.618,00
22	Kota Cirebon	66.464.629.401,00	63.453.776.189,00	436.898.492.084,00
23	Kota Depok	97.139.989.565,57	112.763.185.732,30	593.140.240.794,00
24	Kota Sukabumi	52.871.774.000,00	65.263.021.093,00	341.106.451.592,00
25	Kota Tasikmalaya	58.684.055.000,00	65.715.623.638,00	487.178.833.482,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Banjarnegara	42.726.838.000,00	46.521.396.931,00	587.833.091.702,00
2	Kabupaten Banyumas	95.370.045.696,00	107.425.765.063,00	770.566.134.090,00
3	Kabupaten Batang	36.024.788.000,00	41.192.714.868,00	491.714.097.395,00
4	Kabupaten Blora	45.377.229.000,00	50.203.192.750,00	615.642.427.406,00
5	Kabupaten Boyolali	58.623.725.000,00	63.725.408.461,00	671.516.649.193,00
6	Kabupaten Brebes	50.025.636.000,00	60.257.982.596,00	580.545.059.123,00
7	Kabupaten Cilacap	85.465.085.000,00	102.780.340.747,00	943.952.955.242,00
8	Kabupaten Demak	36.541.675.821,00	43.820.940.478,00	581.445.539.122,00
9	Kabupaten Grobogan	50.721.201.000,00	59.924.849.995,00	688.986.155.873,00
10	Kabupaten Jepara	62.003.754.000,00	67.984.834.230,00	615.704.970.161,00
11	Kabupaten Karanganyar	58.400.628.420,00	64.470.676.168,00	598.405.031.163,00
12	Kabupaten Kebumen	58.918.121.000,00	58.599.425.036,00	719.568.559.148,00

13	Kabupaten Kendal	64.493.548.351,00	71.684.588.059,00	585.359.370.901,00
14	Kabupaten Klaten	43.910.145.000,00	38.347.614.632,00	851.604.340.823,00
15	Kabupaten Kudus	59.243.316.000,00	71.520.067.976,83	590.952.702.372,00
16	Kabupaten Magelang	71.480.785.686,00	81.203.386.278,00	679.547.310.731,00
17	Kabupaten Pati	66.718.048.500,00	80.677.766.092,01	714.534.542.357,00
18	Kabupaten Pekalongan	39.963.278.319,00	55.278.780.755,50	572.108.603.047,00
19	Kabupaten Pemalang	53.748.798.000,00	66.737.479.207,00	631.081.770.628,00
20	Kabupaten Purbalingga	60.476.433.000,00	63.795.293.807,00	545.954.837.600,00
21	Kabupaten Purworedjo	42.874.969.676,00	51.174.860.039,00	608.506.570.303,00
22	Kabupaten Rembang	53.140.716.000,00	51.150.558.424,00	485.820.547.535,00
23	Kabupaten Semarang	80.056.609.000,00	82.942.880.537,00	594.185.154.322,00
24	Kabupaten Sragen	59.734.994.000,00	65.561.025.869,00	638.420.507.087,00
25	Kabupaten Sukoharjo	41.661.997.750,00	41.785.061.436,69	588.369.601.735,00
26	Kabupaten Tegal	62.168.872.826,00	59.154.639.032,00	675.775.409.534,00
27	Kabupaten Temanggung	38.725.025.765,00	37.923.898.939,00	497.563.580.868,00
28	Kabupaten Wonogiri	43.476.570.500,00	54.129.294.926,00	705.841.541.545,00
29	Kabupaten Wonosobo	36.904.132.928,00	38.158.243.909,00	518.017.994.244,00
30	Kota Magelang	38.213.264.000,00	40.506.552.463,00	302.133.885.989,00
31	Kota Semarang	237.004.661.288,00	267.914.250.403,00	885.911.757.033,00
32	Kota Surakarta	96.199.901.000,00	102.929.501.970,00	513.400.412.439,00
33	Kota Pekalongan	21.838.073.792,00	25.587.659.196,00	325.082.674.833,00
34	Kota Tegal	60.938.389.000,00	69.567.243.716,00	291.459.720.946,00
35	Kota Salatiga	36.597.951.000,00	45.149.901.979,00	277.098.276.684,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bangkalan	33.000.305.919,00	32.106.268.819,67	598.279.424.085,00
2	Kabupaten Banyuwangi	62.784.566.300,00	73.970.832.546,54	888.206.237.315,00
3	Kabupaten Blitar	45.669.309.283,00	49.202.180.155,41	747.871.254.298,00
4	Kabupaten Bojonegoro	55.761.002.870,35	58.690.962.773,99	779.701.133.986,00
5	Kabupaten Bondowoso	29.995.818.008,12	35.371.877.885,00	523.159.205.267,00
6	Kabupaten Gresik	128.022.893.572,00	134.426.191.451,42	689.476.739.052,00
7	Kabupaten Jember	113.611.449.986,37	136.478.799.059,03	1.071.183.738.010,00
8	Kabupaten Jombang	74.279.789.975,41	97.601.053.792,45	672.614.858.969,00
9	Kabupaten Kediri	48.032.713.548,02	61.186.214.010,62	754.475.953.015,00
10	Kabupaten Lamongan	63.332.376.525,00	66.608.873.942,51	742.671.110.057,00
11	Kabupaten Lumajang	55.304.944.400,00	54.974.535.912,05	632.047.464.995,00
12	Kabupaten Madiun	28.693.204.342,00	26.559.118.423,49	587.447.695.397,00
13	Kabupaten Magetan	38.006.304.890,00	39.019.023.997,89	578.334.908.875,00
14	Kabupaten Malang	94.649.110.500,00	100.591.047.740,00	1.134.458.800.131,00
15	Kabupaten Mojokerto	45.864.081.400,00	55.790.363.612,51	629.022.905.593,00
16	Kabupaten Nganjuk	53.988.350.789,00	60.307.557.351,84	685.677.695.228,00
17	Kabupaten Ngawi	18.422.259.666,51	23.670.907.767,01	639.984.673.812,00

18	Kabupaten Pamekasan	34.207.495.254,98	36.957.799.237,87	546.224.654.855,00
19	Kabupaten Pasuruan	65.647.336.587,79	99.963.505.339,98	752.236.998.367,00
20	Kabupaten Ponorogo	39.132.240.270,00	41.850.665.707,56	651.128.373.325,93
21	Kabupaten Probolinggo	33.696.291.000,00	39.688.499.147,86	631.873.892.085,00
22	Kabupaten Sampang	20.479.065.400,00	28.476.318.728,87	525.155.067.769,66
23	Kabupaten Sidoarjo	202.179.688.060,75	213.693.758.966,37	855.643.531.652,00
24	Kabupaten Situbondo	28.119.625.248,13	31.354.710.942,73	511.632.597.222,00
25	Kabupaten Sumenep	42.795.564.165,00	44.178.604.068,09	677.559.508.982,00
26	Kabupaten Trenggalek	31.552.214.793,00	35.187.914.905,19	566.992.411.636,00
27	Kabupaten Tuban	74.412.090.607,28	91.912.061.932,13	634.983.322.728,00
28	Kabupaten Tulungagung	50.870.582.352,61	59.140.300.539,86	743.849.018.632,00
29	Kota Batu	19.323.649.999,69	14.202.630.312,49	274.133.654.159,00
30	Kota Kediri	79.955.454.942,86	74.775.278.043,96	469.739.712.825,00
31	Kota Madiun	22.980.184.000,00	27.014.134.400,86	321.518.670.444,00
32	Kota Malang	82.213.442.771,93	83.495.322.885,05	579.412.291.811,00
33	Kota Mojokerto	18.836.929.600,00	26.276.475.864,33	276.662.005.531,00
34	Kota Pasuruan	23.092.169.487,09	27.183.431.287,29	286.054.667.214,00
35	Kota Probolinggo	32.345.541.867,67	38.030.645.757,41	317.935.886.373,00
36	Kota Surabaya	767.659.691.372,00	729.213.319.344,00	1.289.211.530.816,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Kulon Progo	39.736.227.720,00	42.289.208.476,81	478.584.755.956,63
2	Kabupaten Bantul	59.069.544.315,41	69.800.761.508,85	679.250.090.167,00
3	Kabupaten Gunung Kidul	28.235.053.200,00	32.906.592.912,97	591.432.826.474,77
4	Kabupaten Sleman	106.758.631.343,00	140.631.359.142,43	688.941.478.722,00
5	Kota Yogyakarta	116.895.236.051,00	132.431.571.514,72	504.741.154.863,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Pandeglang	55.428.469.000,00	33.480.446.171,00	697.532.647.336,00
2	Kabupaten Lebak	76.942.599.000,00	50.805.106.176,00	664.171.070.286,00
3	Kabupaten Tangerang	294.773.029.000,00	336.921.813.888,00	1.255.932.366.786,00
4	Kabupaten Serang	135.735.269.322,00	138.558.617.173,00	828.099.046.313,00
5	Kota Tangerang	145.417.607.708,00	181.850.256.965,61	728.775.388.492,00
6	Kota Cilegon	130.670.503.038,00	129.826.408.856,00	364.178.442.009,00

Data Penelitian Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bandung	151.496.194.500,00	153.271.649.974,00	1.444.122.553.979,00
2	Kabupaten Bekasi	236.597.109.948,00	287.299.507.395,00	1.077.791.052.669,00
3	Kabupaten Bogor	321.074.025.000,00	337.903.884.329,00	1.524.291.997.485,00
4	Kabupaten Ciamis	54.246.529.724,00	51.276.555.046,00	1.030.099.884.133,00
5	Kabupaten Cianjur	96.795.837.772,47	93.628.876.481,48	1.041.234.284.764,00
6	Kabupaten Cirebon	114.324.933.879,00	116.095.437.888,00	991.493.640.438,00
7	Kabupaten Garut	101.306.610.538,00	102.702.673.665,00	1.244.187.194.029,00
8	Kabupaten Indramayu	86.320.473.000,00	86.408.586.763,33	924.053.889.388,00
9	Kabupaten Kuningan	62.131.069.971,00	63.573.538.311,00	767.527.055.567,00
10	Kabupaten Majalengka	68.391.614.789,31	68.907.543.309,00	774.396.796.950,00
11	Kabupaten Karawang	124.313.863.804,00	135.599.465.640,00	1.025.587.475.224,00
12	Kabupaten Purwakarta	64.426.624.671,00	64.044.768.371,00	591.169.197.657,00
13	Kabupaten Subang	74.588.544.207,00	67.665.304.446,00	908.769.680.952,00
14	Kabupaten Sukabumi	79.139.208.000,00	80.616.078.322,80	1.142.458.841.028,00
15	Kabupaten Sumedang	109.731.802.606,96	104.172.660.220,71	736.447.411.403,00
16	Kabupaten Tasikmalaya	46.873.279.735,00	49.657.876.201,00	948.170.972.648,00
17	Kota Bandung	369.137.442.213,08	360.152.627.690,00	1.448.863.491.100,00
18	Kota Banjar	26.200.195.805,00	25.849.341.608,00	286.422.900.149,00
19	Kota Bekasi	237.245.806.323,00	231.694.925.185,80	854.402.676.930,00
20	Kota Bogor	102.447.491.431,00	115.921.660.827,00	590.575.801.989,00
21	Kota Cimahi	76.278.639.222,00	75.037.372.353,00	439.802.164.598,00
22	Kota Cirebon	78.936.724.916,00	77.318.391.813,00	474.292.926.583,00
23	Kota Depok	96.889.185.309,51	115.720.347.455,90	655.786.261.787,00
24	Kota Sukabumi	63.134.763.000,00	66.190.680.359,00	377.865.432.876,00
25	Kota Tasikmalaya	69.337.990.000,00	76.505.801.570,00	536.381.538.872,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Banjarnegara	59.012.519.000,00	60.636.814.797,00	609.869.013.184,00
2	Kabupaten Banyumas	69.919.133.029,00	120.520.361.680,84	841.333.701.636,00
3	Kabupaten Batang	41.941.165.642,48	44.643.602.159,48	521.237.716.017,00
4	Kabupaten Blora	50.000.000.000,00	49.696.650.709,00	621.823.359.884,00
5	Kabupaten Boyolali	68.261.319.000,00	70.004.658.137,00	696.575.409.454,00
6	Kabupaten Brebes	74.085.685.000,00	80.275.021.213,00	807.183.028.688,00
7	Kabupaten Cilacap	112.315.457.000,00	120.746.425.475,65	953.955.786.885,00
8	Kabupaten Demak	46.818.818.000,00	50.235.869.718,00	608.024.195.153,00
9	Kabupaten Grobogan	55.867.671.575,00	77.079.602.181,00	695.617.456.551,00
10	Kabupaten Jepara	68.098.430.000,00	71.919.859.343,00	649.650.620.070,00
11	Kabupaten Karanganyar	66.604.710.000,00	66.971.682.994,00	634.208.546.978,00
12	Kabupaten Kebumen	65.872.328.400,00	63.016.363.174,00	750.787.266.182,00

13	Kabupaten Kendal	75.245.362.994,00	76.805.714.198,00	641.676.763.566,00
14	Kabupaten Klaten	66.073.046.000,00	46.603.876.930,00	841.073.104.734,00
15	Kabupaten Kudus	73.709.952.000,00	83.045.780.415,88	599.799.512.219,00
16	Kabupaten Magelang	69.716.027.680,00	75.582.195.900,00	781.337.554.311,00
17	Kabupaten Pati	73.523.592.000,00	90.667.623.138,54	752.673.931.046,00
18	Kabupaten Pekalongan	51.859.714.150,00	58.468.319.642,00	579.120.755.284,00
19	Kabupaten Pemalang	69.871.265.000,00	81.819.333.588,00	685.823.813.995,00
20	Kabupaten Purbalingga	78.971.518.000,00	83.177.000.901,00	552.967.243.889,00
21	Kabupaten Purworedjo	53.700.577.428,00	60.814.316.979,00	634.036.319.961,00
22	Kabupaten Rembang	58.298.074.000,00	56.887.895.318,00	501.618.169.784,00
23	Kabupaten Semarang	92.585.048.000,00	90.389.871.349,00	619.137.565.071,00
24	Kabupaten Sragen	64.516.924.000,00	72.681.309.220,00	636.207.252.277,00
25	Kabupaten Sukoharjo	46.154.694.000,00	48.842.528.340,00	631.388.893.011,00
26	Kabupaten Tegal	67.474.669.000,00	70.859.594.636,00	716.802.303.086,00
27	Kabupaten Temanggung	47.444.822.496,00	47.327.328.141,00	515.228.881.135,00
28	Kabupaten Wonogiri	56.428.607.000,00	57.092.965.296,00	723.506.380.821,00
29	Kabupaten Wonosobo	51.681.992.380,00	46.324.943.517,00	539.252.943.572,00
30	Kota Magelang	45.195.808.000,00	47.704.618.780,00	307.435.557.554,00
31	Kota Semarang	291.142.899.270,00	306.112.422.821,00	1.006.576.475.543,00
32	Kota Surakarta	110.842.157.600,00	101.972.318.682,00	548.324.527.915,00
33	Kota Pekalongan	27.338.979.503,00	32.238.175.787,84	332.018.657.836,00
34	Kota Tegal	74.916.711.000,00	90.840.876.590,00	303.728.258.830,00
35	Kota Salatiga	50.130.034.000,00	53.055.833.309,00	293.570.138.587,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bangkalan	32.722.860.492,08	34.477.143.994,68	622.681.308.926,00
2	Kabupaten Banyuwangi	69.009.556.469,00	86.977.565.944,72	917.129.052.658,00
3	Kabupaten Blitar	55.750.801.602,43	58.268.283.130,58	758.077.258.202,00
4	Kabupaten Bojonegoro	61.728.560.270,00	70.233.938.303,98	789.419.617.973,00
5	Kabupaten Bondowoso	39.566.376.641,47	40.121.861.293,00	535.674.337.407,00
6	Kabupaten Gresik	157.633.849.936,00	168.302.821.579,56	710.951.645.839,00
7	Kabupaten Jember	119.817.126.079,86	135.022.286.377,97	1.094.506.535.231,00
8	Kabupaten Jombang	83.553.261.780,45	90.214.137.927,09	712.635.849.237,00
9	Kabupaten Kediri	60.095.039.431,78	77.825.221.397,44	820.665.352.760,00
10	Kabupaten Lamongan	111.254.225.595,00	71.452.396.308,29	731.738.429.005,00
11	Kabupaten Lumajang	59.041.163.236,51	65.341.361.835,39	646.457.541.776,00
12	Kabupaten Madiun	31.590.306.400,00	30.112.862.499,21	557.337.554.851,00
13	Kabupaten Magetan	41.753.821.205,00	48.831.608.108,61	593.458.040.862,00
14	Kabupaten Malang	116.160.148.000,00	153.526.441.537,99	1.161.789.799.272,00
15	Kabupaten Mojokerto	56.901.098.700,00	59.633.358.366,84	639.608.198.890,00
16	Kabupaten Nganjuk	65.595.086.024,67	72.274.642.864,63	715.469.589.301,00
17	Kabupaten Ngawi	22.837.442.813,08	25.567.881.123,83	637.613.963.345,00

18	Kabupaten Pamekasan	39.454.414.587,99	40.220.358.249,32	580.248.564.733,00
19	Kabupaten Pasuruan	81.531.532.520,65	87.668.802.526,57	804.951.385.801,00
20	Kabupaten Ponorogo	46.045.310.942,67	48.046.560.260,05	683.288.939.358,00
21	Kabupaten Probolinggo	39.930.801.000,00	42.548.002.266,46	643.613.102.313,00
22	Kabupaten Sampang	28.202.689.203,58	37.026.235.941,13	574.914.791.817,00
23	Kabupaten Sidoarjo	258.422.578.156,98	284.660.711.556,09	928.002.831.058,00
24	Kabupaten Situbondo	29.206.333.151,36	33.913.027.881,34	533.935.868.350,00
25	Kabupaten Sumenep	41.449.540.277,00	44.292.310.516,41	724.555.071.084,00
26	Kabupaten Trenggalek	38.088.158.683,00	40.435.991.178,08	577.318.890.994,00
27	Kabupaten Tuban	87.663.646.549,64	103.952.860.251,42	680.822.145.908,00
28	Kabupaten Tulungagung	63.777.515.348,00	82.324.974.129,07	770.133.226.658,00
29	Kota Batu	22.581.000.000,00	17.386.741.568,44	285.344.171.420,00
30	Kota Kediri	83.420.679.281,00	88.849.647.034,61	519.568.288.310,00
31	Kota Madiun	25.402.795.000,00	43.880.880.252,97	334.527.412.777,00
32	Kota Malang	92.772.122.460,02	92.476.383.151,21	599.009.597.671,00
33	Kota Mojokerto	24.185.398.400,00	28.154.863.948,45	291.496.817.179,00
34	Kota Pasuruan	32.319.650.753,77	35.678.357.863,22	297.334.261.852,00
35	Kota Probolinggo	37.858.227.543,91	40.085.223.843,97	330.155.546.091,00
36	Kota Surabaya	882.616.888.643,00	809.795.526.042,20	1.448.259.536.803,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Kulon Progo	44.673.862.772,37	39.358.629.412,10	494.268.843.933,00
2	Kabupaten Bantul	77.286.936.022,00	88.691.362.690,38	668.488.989.539,00
3	Kabupaten Gunung Kidul	36.236.874.500,80	38.455.406.172,11	609.362.836.722,00
4	Kabupaten Sleman	128.918.153.263,99	157.231.267.811,84	717.703.169.280,00
5	Kota Yogyakarta	145.446.398.106,00	161.473.838.209,95	517.366.876.957,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Pandeglang	51.325.076.817,00	31.921.009.780,00	737.819.451.735,00
2	Kabupaten Lebak	74.268.196.396,00	58.021.746.576,00	688.615.574.665,00
3	Kabupaten Tangerang	344.992.634.719,00	372.841.974.479,00	1.376.748.937.820,00
4	Kabupaten Serang	115.253.909.058,00	118.585.763.408,00	726.108.533.550,00
5	Kota Tangerang	187.198.224.557,42	193.575.745.112,00	793.362.375.385,00
6	Kota Cilegon	134.204.104.988,00	135.537.939.538,00	438.140.629.157,00

Data Penelitian Tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bandung	192.971.977.423,00	198.650.518.839,00	1.436.030.033.073,00
2	Kabupaten Bekasi	243.005.087.400,00	258.671.098.123,00	1.147.007.099.045,00
3	Kabupaten Bogor	381.351.329.000,00	399.263.956.504,00	1.611.993.763.844,00
4	Kabupaten Ciamis	53.468.520.000,00	50.512.875.943,00	1.035.710.000.785,00
5	Kabupaten Cianjur	116.816.090.453,02	114.305.535.968,00	1.085.429.867.504,00
6	Kabupaten Cirebon	152.198.931.768,00	139.426.725.461,00	1.045.997.902.137,00
7	Kabupaten Garut	106.290.841.118,00	108.914.763.969,00	1.283.191.311.728,00
8	Kabupaten Indramayu	104.038.055.056,00	101.840.184.225,00	1.077.081.457.745,00
9	Kabupaten Kuningan	72.935.375.414,00	68.158.790.368,00	803.424.540.314,00
10	Kabupaten Majalengka	79.695.505.977,00	76.398.018.123,00	877.528.110.599,00
11	Kabupaten Karawang	174.471.325.848,00	210.282.788.665,00	1.121.038.108.120,00
12	Kabupaten Purwakarta	70.095.482.738,00	76.489.287.145,00	651.229.105.746,00
13	Kabupaten Subang	73.920.906.277,00	75.532.291.693,00	964.284.499.791,00
14	Kabupaten Sukabumi	95.684.769.000,00	98.442.632.628,00	1.109.665.959.724,00
15	Kabupaten Sumedang	120.039.975.404,25	108.646.803.911,20	816.535.938.682,00
16	Kabupaten Tasikmalaya	78.594.418.880,62	48.338.061.521,00	1.058.189.564.045,00
17	Kota Bandung	416.030.066.849,00	441.863.068.294,00	1.459.244.804.313,00
18	Kota Banjar	35.174.566.356,00	37.358.705.002,00	277.368.410.501,00
19	Kota Bekasi	310.210.590.344,00	296.046.878.711,90	916.219.421.376,00
20	Kota Bogor	125.766.337.107,00	127.488.089.831,00	584.537.928.387,00
21	Kota Cimahi	81.594.254.429,60	87.321.279.805,00	432.679.734.555,00
22	Kota Cirebon	99.730.336.762,00	90.795.674.571,00	486.326.699.207,00
23	Kota Depok	128.229.208.876,94	142.380.788.621,00	704.003.831.464,00
24	Kota Sukabumi	82.401.066.000,00	91.472.357.185,00	386.088.446.657,00
25	Kota Tasikmalaya	95.412.668.000,00	104.787.914.974,00	516.684.338.560,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Banjarnegara	61.741.597.000,00	62.486.768.063,00	615.050.728.641,00
2	Kabupaten Banyumas	146.862.991.826,00	164.892.425.633,60	877.104.741.864,00
3	Kabupaten Batang	50.526.539.851,00	45.421.689.588,00	503.871.858.542,00
4	Kabupaten Blora	56.500.000.000,00	47.087.584.059,00	656.795.452.845,00
5	Kabupaten Boyolali	79.625.590.000,00	86.485.635.223,00	689.906.462.945,00
6	Kabupaten Brebes	74.873.526.000,00	71.025.304.605,00	867.014.668.437,00
7	Kabupaten Cilacap	143.945.306.000,00	149.709.123.163,12	988.063.134.095,00
8	Kabupaten Demak	57.821.547.000,00	56.698.399.308,00	601.421.955.631,00
9	Kabupaten Grobogan	66.800.673.000,00	78.366.420.899,00	746.052.421.038,00
10	Kabupaten Jepara	76.832.316.000,00	84.734.935.696,00	670.274.785.673,00
11	Kabupaten Karanganyar	78.436.531.000,00	79.510.216.512,00	624.771.771.840,00
12	Kabupaten Kebumen	60.151.533.000,00	58.742.305.659,00	754.913.123.541,00

13	Kabupaten Kendal	84.442.085.137,00	86.235.293.510,00	643.064.281.301,00
14	Kabupaten Klaten	61.743.899.426,00	54.886.005.749,00	845.975.281.673,00
15	Kabupaten Kudus	92.241.864.000,00	94.032.742.826,00	623.439.210.189,00
16	Kabupaten Magelang	74.129.816.836,00	76.057.772.876,00	757.580.425.863,00
17	Kabupaten Pati	99.478.926.000,00	112.526.536.706,11	745.708.224.518,00
18	Kabupaten Pekalongan	73.663.467.250,00	67.580.239.029,00	639.100.011.167,00
19	Kabupaten Pemalang	70.610.736.000,00	76.441.045.221,00	728.760.540.210,00
20	Kabupaten Purbalingga	82.383.623.000,00	79.803.180.820,00	554.264.416.173,00
21	Kabupaten Purworedjo	66.325.412.769,00	69.609.314.290,00	628.258.498.087,00
22	Kabupaten Rembang	78.227.428.000,00	65.699.258.994,62	502.912.699.480,00
23	Kabupaten Semarang	103.084.175.000,00	98.831.140.360,00	611.256.406.778,00
24	Kabupaten Sragen	80.619.139.000,00	79.627.347.873,90	653.056.922.240,00
25	Kabupaten Sukoharjo	63.065.320.000,00	64.446.167.388,00	620.123.839.912,00
26	Kabupaten Tegal	77.683.104.000,00	73.062.775.368,00	748.836.579.376,00
27	Kabupaten Temanggung	56.931.558.308,00	55.211.017.361,00	522.185.893.892,00
28	Kabupaten Wonogiri	65.907.726.000,00	64.968.769.365,00	734.169.313.923,00
29	Kabupaten Wonosobo	63.597.324.980,00	52.079.016.939,00	540.908.241.528,00
30	Kota Magelang	53.469.958.000,00	59.548.102.100,00	298.383.144.888,00
31	Kota Semarang	314.653.496.600,00	327.992.258.750,00	967.153.006.791,00
32	Kota Surakarta	114.429.357.815,00	113.946.007.541,85	610.715.857.616,00
33	Kota Pekalongan	42.395.561.052,00	47.495.707.336,51	317.579.264.300,00
34	Kota Tegal	94.781.142.000,00	101.321.867.412,00	296.502.755.004,00
35	Kota Salatiga	52.284.327.000,00	51.549.747.508,00	285.798.621.729,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Bangkalan	40.563.076.123,71	40.975.170.911,35	674.381.334.704,00
2	Kabupaten Banyuwangi	87.091.140.847,23	90.656.905.526,29	927.297.552.851,00
3	Kabupaten Blitar	67.273.122.320,54	63.888.553.129,00	767.817.950.485,00
4	Kabupaten Bojonegoro	81.250.000.000,00	79.891.483.832,32	938.267.774.726,00
5	Kabupaten Bondowoso	45.781.983.200,00	49.663.941.019,39	586.797.254.365,00
6	Kabupaten Gresik	167.580.556.620,72	167.771.869.035,97	706.055.557.792,00
7	Kabupaten Jember	149.343.456.734,49	150.935.737.792,43	1.130.522.874.074,00
8	Kabupaten Jombang	101.264.900.929,73	109.154.035.427,86	729.721.735.088,00
9	Kabupaten Kediri	54.092.795.309,21	72.006.347.302,91	879.818.100.293,00
10	Kabupaten Lamongan	100.547.388.557,00	95.244.807.228,00	742.952.461.022,00
11	Kabupaten Lumajang	69.698.986.800,00	77.540.295.110,76	671.389.191.303,00
12	Kabupaten Madiun	37.321.534.950,00	45.034.305.944,66	575.419.421.647,00
13	Kabupaten Magetan	52.630.000.000,00	51.964.929.106,62	592.124.673.939,00
14	Kabupaten Malang	123.402.470.377,00	130.465.915.607,92	1.204.222.084.704,00
15	Kabupaten Mojokerto	66.927.904.375,00	69.719.357.059,17	657.493.370.183,00
16	Kabupaten Nganjuk	80.662.722.428,35	79.507.391.611,49	724.006.837.214,00
17	Kabupaten Ngawi	29.759.512.850,00	27.489.942.064,49	689.423.264.536,00

18	Kabupaten Pamekasan	43.586.039.854,45	49.313.077.417,73	607.892.296.714,00
19	Kabupaten Pasuruan	97.485.174.652,00	100.309.476.757,47	934.282.490.705,00
20	Kabupaten Ponorogo	52.109.723.975,00	48.664.624.186,31	688.864.798.003,00
21	Kabupaten Probolinggo	41.908.896.000,00	46.024.665.848,59	675.246.654.404,00
22	Kabupaten Sampang	35.798.141.697,00	36.396.342.480,50	592.023.897.869,00
23	Kabupaten Sidoarjo	310.343.872.396,04	356.161.848.548,24	969.298.842.540,00
24	Kabupaten Situbondo	43.033.091.813,37	46.579.946.273,78	535.931.914.989,00
25	Kabupaten Sumenep	38.797.114.248,00	46.702.756.751,92	787.554.530.823,00
26	Kabupaten Trenggalek	60.967.446.000,00	53.553.783.139,97	586.027.865.255,00
27	Kabupaten Tuban	94.432.461.095,79	106.369.268.224,67	703.437.728.362,00
28	Kabupaten Tulungagung	80.894.725.191,00	94.380.356.787,90	775.220.680.096,00
29	Kota Batu	30.000.000.000,00	17.735.602.953,95	308.784.465.486,00
30	Kota Kediri	85.088.486.177,41	92.787.297.150,64	516.442.210.171,00
31	Kota Madiun	34.518.740.000,00	41.757.000.273,53	327.818.740.630,00
32	Kota Malang	104.802.485.741,16	113.490.265.808,78	626.023.144.999,00
33	Kota Mojokerto	33.058.282.350,00	31.596.313.387,11	300.126.050.134,00
34	Kota Pasuruan	32.730.425.979,40	34.101.032.333,50	284.567.395.854,00
35	Kota Probolinggo	46.939.564.817,15	45.715.475.874,03	333.172.999.624,00
36	Kota Surabaya	1.059.891.415.591,00	908.647.775.730,37	1.445.514.314.692,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Kulon Progo	45.501.872.652,01	48.280.640.675,16	485.094.125.372,00
2	Kabupaten Bantul	89.015.027.964,59	81.637.099.293,07	688.676.566.702,00
3	Kabupaten Gunung Kidul	40.963.061.130,00	42.542.031.388,61	633.692.367.326,00
4	Kabupaten Sleman	163.530.209.690,15	163.056.459.137,93	909.887.128.872,00
5	Kota Yogyakarta	175.872.008.293,00	179.423.640.057,51	484.628.282.720,00

No	Kabupaten/Kota	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Dana Perimbangan
1	Kabupaten Pandeglang	45.624.337.143,00	31.855.280.016,00	832.302.075.068,00
2	Kabupaten Lebak	68.180.133.214,00	64.200.116.205,00	801.068.806.148,00
3	Kabupaten Tangerang	285.930.495.481,00	350.295.783.693,00	1.021.008.170.035,00
4	Kabupaten Serang	131.722.481.000,00	134.718.556.929,00	749.423.119.654,00
5	Kota Tangerang	188.408.038.570,50	230.634.138.004,00	823.213.829.019,00
6	Kota Cilegon	171.501.353.839,00	150.600.840.049,00	424.673.140.973,00

LAMPIRAN 3

Contoh Perhitungan Rasio Efektivitas

Rumus :

$$\begin{aligned} & \textit{Rasio Efektivitas} \\ & = \frac{\textit{Realisasi Penerimaan PAD}}{\textit{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil}} \end{aligned}$$

Kabupaten Bekasi

$$\begin{aligned} 2006 &= \frac{172.659.680.141,97}{153.960.320.641,00} \\ &= 7,03 \end{aligned}$$

Data penelitian X dan Y di dapat dari :

$$\textit{Data penelitian} = \frac{\textit{Nilai 2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010}}{5}$$

LAMPIRAN 4

DATA POPULASI TERJANGKAU 2006-2010

Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
1	Kab Bandung	14,55	1,01	15,20	0,97	11,33	1,04	14,44	1,01	14,36	1,03	13,98	1,01
2	Kab Bekasi	7,03	1,12	7,98	1,18	9,78	1,38	10,78	1,21	11,47	1,06	9,41	1,19
3	Kab Bogor	10,87	1,03	11,82	0,99	13,36	1,09	15,24	1,05	16,12	1,05	13,48	1,04
4	Kab Ciamis	8,63	1,17	9,01	1,05	10,15	1,11	10,30	0,95	10,36	0,94	9,60	0,94
5	Kab Cianjur	7,82	0,93	9,00	0,98	10,01	0,94	10,41	0,97	10,85	0,98	9,62	0,98
6	Kab Cirebon	8,36	1,04	8,02	0,88	8,74	0,85	9,91	1,02	10,46	0,92	9,10	0,94
7	Kab Garut	9,78	1,01	10,59	0,97	11,77	0,94	12,44	1,01	12,83	1,02	11,48	0,99
8	Kab Indramayu	7,98	1,13	7,84	1,03	8,66	0,85	9,24	1,00	10,77	0,98	8,90	1,00
9	Kab Kuningan	5,98	1,00	6,46	1,02	7,03	0,88	7,68	1,02	8,03	0,93	7,04	0,97
10	Kab Majalengka	6,11	1,07	6,83	0,99	7,30	1,00	7,74	1,01	8,78	0,96	7,30	1,01
11	Kab Karawang	7,46	1,41	8,41	1,22	9,24	1,11	10,26	1,09	11,21	1,21	9,40	1,11
12	Kab Purwakarta	4,49	1,01	4,66	0,93	5,07	0,96	5,91	0,99	6,51	1,09	5,20	1,00
13	Kab Subang	6,76	1,23	7,51	1,10	8,36	0,97	9,09	0,91	9,64	1,02	8,00	1,05
14	Kab Sukabumi	7,79	1,13	9,32	1,07	10,05	1,18	11,42	1,02	11,10	1,03	9,94	1,09
15	Kab Sumedang	6,20	1,16	6,42	0,94	7,04	1,02	7,36	0,95	8,17	0,91	7,04	0,99
16	Kab Tasikmalaya	8,01	1,55	8,39	1,19	9,13	1,25	9,48	1,06	10,58	0,62	9,12	1,13
17	Kota Bandung	11,40	1,07	10,97	1,02	13,60	0,93	14,49	0,98	14,59	1,06	13,01	1,01
18	Kota Banjar	2,25	1,26	3,36	1,03	2,66	0,97	2,86	0,99	2,77	1,06	2,70	1,16
19	Kota Bekasi	7,24	1,02	7,03	1,03	8,00	1,06	8,54	0,98	9,16	0,95	8,00	1,11
20	Kota Bogor	3,91	1,09	4,57	1,11	5,20	1,18	5,91	1,13	5,85	1,01	5,09	1,11
21	Kota Cimahi	2,82	0,98	3,34	1,00	3,85	1,05	4,40	0,98	4,33	1,07	3,60	1,01
22	Kota Cirebon	3,63	0,93	3,80	1,04	4,37	0,95	4,74	0,98	4,86	0,91	4,28	0,96
23	Kota Depok	4,28	0,98	5,15	1,14	5,93	1,16	6,56	1,19	7,04	1,11	5,79	1,12
24	Kota Sukabumi	2,84	1,08	3,34	1,12	3,41	1,23	3,78	1,05	3,86	1,11	3,45	1,12
25	Kota Tasikmalaya	4,21	1,04	4,37	1,04	4,87	1,12	5,36	1,10	5,17	1,10	4,80	1,08

Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
26	Kab Banjarnegara	5,09	1,26	5,34	1,09	5,88	1,09	6,10	1,03	6,15	1,01	5,71	1,05
27	Kab Banyumas	6,76	1,24	7,16	1,13	7,71	1,13	8,41	1,72	8,77	1,12	7,76	1,27
28	Kab Batang	3,84	1,23	4,38	1,09	4,92	1,14	5,21	1,06	5,04	0,90	4,60	1,19
29	Kab Blora	5,01	1,14	5,73	1,35	6,16	1,11	6,22	0,99	6,57	0,83	5,94	1,09
30	Kab Boyolali	5,68	1,13	6,02	1,10	6,72	1,09	6,97	1,03	6,90	1,09	6,46	1,09
31	Kab Brebes	6,66	1,11	7,17	1,47	5,81	1,20	8,07	1,08	8,67	0,95	7,28	1,16
32	Kab Cilacap	7,56	1,32	8,73	1,16	9,44	1,20	9,54	1,08	9,88	1,04	9,03	1,16

33	Kab Demak	4,64	1,14	5,24	1,22	5,81	1,20	6,08	1,07	6,01	0,98	5,56	1,12
34	Kab Grobogan	5,67	1,10	6,31	1,13	6,89	1,18	6,96	1,38	7,46	1,17	6,66	1,19
35	Kab Jepara	5,08	1,03	5,51	1,12	6,16	1,10	6,50	1,06	6,70	1,10	5,99	1,00
36	Kab Karanganyar	5,02	1,26	5,37	1,07	5,98	1,10	6,34	1,01	6,25	1,01	5,79	1,09
37	Kab Kebumen	6,21	2,19	6,73	1,03	7,20	0,99	7,51	0,96	7,55	0,98	7,10	1,13
38	Kab Kendal	5,09	1,11	5,33	1,07	5,85	1,11	6,42	1,02	6,43	1,02	5,83	1,07
39	Kab Klaten	6,92	0,95	7,29	0,94	8,52	0,87	8,41	0,71	8,46	0,89	7,92	0,87
40	Kab Kudus	4,76	0,96	5,22	1,00	5,91	1,21	6,00	1,13	6,23	1,02	5,62	1,10
41	Kab Magelang	6,01	1,16	6,34	1,09	6,80	1,14	7,81	1,08	7,58	1,03	6,91	1,10
42	Kab Pati	6,11	1,12	6,47	1,15	7,15	1,21	7,53	1,23	7,46	1,13	6,94	1,17
43	Kab Pekalongan	4,45	1,15	4,86	1,14	5,72	1,38	5,79	1,13	6,39	0,92	5,44	1,14
44	Kab Pemasang	5,51	1,10	5,79	1,07	6,31	1,24	6,86	1,17	7,29	1,08	6,35	1,13
45	Kab Purbalingga	4,38	1,12	4,88	1,02	5,46	1,05	5,53	1,05	5,54	0,97	5,16	1,04
46	Kab Purworedjo	4,85	0,88	5,46	1,05	6,09	1,19	6,34	1,13	6,28	1,05	5,80	1,06
47	Kab Rembang	4,36	1,10	4,37	1,06	4,86	0,96	5,02	0,98	5,03	0,84	4,73	1,09
48	Kab Semarang	4,69	1,10	5,30	1,07	5,94	1,04	6,19	0,98	6,11	0,96	5,65	1,03
49	Kab Sragen	5,66	1,17	5,90	1,21	6,38	1,10	6,36	1,13	6,53	0,99	6,17	1,12
50	Kab Sukoharjo	5,05	1,23	5,35	1,10	5,88	1,00	6,31	1,06	6,20	1,02	5,76	1,08
51	Kab Tegal	5,70	1,14	5,98	1,09	6,76	0,95	7,17	1,05	7,49	0,94	6,62	1,04
52	Kab Temanggung	4,24	0,82	4,55	0,97	4,98	0,98	5,15	1,00	5,22	0,97	4,83	0,95
53	Kab Wonogiri	6,09	1,06	6,42	1,16	7,06	1,25	7,24	1,01	7,34	0,99	6,83	1,05
54	Kab Wonosobo	4,30	1,20	4,66	1,14	5,18	1,03	5,39	0,90	5,41	0,82	4,99	1,02
55	Kota Magelang	2,54	1,26	2,77	1,16	3,02	1,06	3,07	1,06	2,98	1,11	2,88	1,13
56	Kota Semarang	7,96	1,04	7,74	1,07	8,86	1,13	10,07	1,05	9,67	1,04	8,86	1,07
57	Kota Surakarta	4,32	1,05	4,51	1,02	5,13	1,07	5,48	0,92	6,11	1,00	5,11	1,21
58	Kota Pekalongan	2,46	1,16	2,87	1,18	3,25	1,17	3,32	1,18	3,18	1,12	3,02	1,16
59	Kota Tegal	2,18	1,07	2,68	1,07	2,91	1,14	3,04	1,21	2,97	1,07	2,90	1,11
60	Kota Salatiga	2,40	1,09	2,53	1,13	2,77	1,23	2,94	1,06	2,86	0,99	2,70	1,20

Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
61	Kab Banyuwangi	7,52	1,35	8,11	1,25	8,88	1,18	9,17	1,26	9,27	1,04	8,59	1,12
62	Kab Blitar	6,27	1,19	6,92	1,12	7,48	1,08	7,58	1,05	7,68	0,95	7,30	1,08
63	Kab Bojonegoro	6,58	0,97	6,69	1,23	7,80	1,05	7,89	1,14	9,38	0,98	7,67	1,08
64	Kab Bondowoso	4,14	1,06	4,60	0,99	5,23	1,18	5,36	1,01	5,87	1,08	5,04	1,07
65	Kab Gresik	5,47	1,17	5,71	1,01	6,89	1,05	7,11	1,07	7,06	1,00	6,45	1,06
66	Kab Jember	8,75	1,27	9,83	1,13	10,71	1,20	10,95	1,13	11,31	1,01	10,31	1,15
67	Kab Jombang	5,54	1,18	5,97	1,16	6,73	1,31	7,13	1,08	7,30	1,08	6,60	1,16
68	Kab Kediri	6,77	1,22	7,00	1,16	7,54	1,27	8,21	1,30	8,80	1,33	7,66	1,16
69	Kab Lamongan	6,10	1,10	6,60	1,08	7,43	1,05	7,32	0,64	7,43	0,95	6,97	0,96
70	Kab Lumajang	4,92	1,21	5,58	1,11	6,32	0,99	6,46	1,11	6,71	1,11	6,00	1,11
71	Kab Madiun	4,67	1,11	4,94	1,04	5,87	0,93	5,57	0,95	5,75	1,21	5,36	1,05

72	Kab Magetan	5,00	1,11	5,27	1,09	5,78	1,03	5,93	1,17	5,92	0,99	5,58	1,08
73	Kab Malang	9,46	1,19	10,14	1,18	11,34	1,06	11,62	1,32	12,04	1,06	10,92	1,16
74	Kab Mojokerto	2,56	1,11	5,60	1,18	6,29	1,22	6,40	1,05	6,57	1,04	5,48	1,12
75	Kab Nganjuk	5,79	5,43	6,25	1,20	6,86	1,12	7,15	1,10	7,24	0,99	6,66	1,97
76	Kab Ngawi	5,28	1,26	5,59	0,98	6,40	1,28	6,38	1,12	6,89	0,92	6,11	1,11
77	Kab Pamekasan	4,54	1,16	4,98	1,09	5,46	1,08	5,80	1,02	6,08	1,13	5,37	1,10
78	Kab Pasuruan	5,92	1,09	6,54	1,20	7,52	1,52	8,05	1,08	9,34	1,03	7,47	1,18
79	Kab Ponorogo	5,32	1,18	5,82	1,09	6,51	1,07	6,83	1,04	6,89	0,93	6,27	1,06
80	Kab Probolinggo	5,31	1,45	5,83	1,31	6,32	1,18	6,44	1,07	6,75	1,10	6,13	1,22
81	Kab Sampang	4,18	1,50	4,65	1,40	5,25	1,39	5,75	1,31	5,92	1,02	5,10	1,32
82	Kab Sidoarjo	8,03	1,11	7,93	1,07	8,56	1,06	9,28	1,10	9,69	1,15	8,60	1,05
83	Kab Situbondo	4,24	1,29	4,55	1,29	5,12	1,12	5,34	1,16	5,36	1,08	4,80	1,19
84	Kab Sumenep	5,69	1,12	6,24	1,08	6,78	1,03	7,25	1,07	7,88	1,20	6,76	1,10
85	Kab Trenggalek	4,62	1,10	5,15	1,17	5,67	1,12	5,77	1,06	5,86	0,88	5,42	1,06
86	Kab Tuban	5,67	1,36	5,77	1,20	6,35	1,24	6,81	1,19	7,03	1,13	6,33	1,22
87	Kab Tulungagung	6,12	1,10	6,59	1,27	7,44	1,16	7,70	1,29	7,75	1,17	7,12	1,20
88	Kota Batu	2,13	1,00	2,38	1,04	2,74	0,73	2,85	0,77	3,09	0,59	2,64	0,83
89	Kota Kediri	4,28	1,07	4,06	1,07	4,70	0,94	5,20	1,07	5,16	1,09	4,68	1,05
90	Kota Madiun	2,69	1,05	2,86	1,15	3,22	1,18	3,35	1,73	3,28	1,21	3,08	1,26
91	Kota Malang	4,84	1,04	5,07	1,08	5,79	1,02	5,99	1,00	6,26	1,08	5,59	1,04
92	Kota Mojokerto	2,56	1,11	2,56	1,50	2,77	1,39	2,91	1,16	3,00	0,96	2,70	1,22
93	Kota Pasuruan	2,39	1,48	2,53	1,25	2,86	1,18	2,97	1,10	2,85	1,04	2,90	1,21
94	Kota Probolinggo	2,72	1,14	2,85	1,26	3,18	1,18	3,30	1,06	3,33	0,97	3,08	1,12
95	Kota Surabaya	11,74	1,03	11,74	1,04	12,89	0,95	14,48	0,92	14,46	0,86	13,06	0,96

DI Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
96	Kab Kulon Progo	3,95	1,17	4,41	1,09	4,79	1,06	4,94	0,88	4,85	1,06	4,59	1,05
97	Kab Bantul	5,56	1,38	6,03	1,24	6,79	1,18	6,68	1,15	6,89	0,92	6,39	1,17
98	Kab Gunung Kidul	4,97	0,99	5,33	1,30	5,91	1,17	6,09	1,06	6,34	1,04	5,73	1,11
99	Kab Sleman	5,61	1,20	6,22	1,27	6,89	1,32	7,18	1,22	9,10	1,00	7,00	1,15
100	Kota Yogyakarta	3,97	1,01	4,39	1,10	5,05	1,13	5,17	1,11	4,85	1,02	4,69	1,07

Banten

No	Kabupaten/Kota	2006		2007		2008		2009		2010		Rata-rata	
		X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
101	Kab Pandeglang	5,41	0,75	6,14	0,90	6,98	0,60	7,38	0,62	8,32	0,70	6,85	0,71
102	Kab Lebak	5,58	1,10	6,00	0,95	6,64	0,66	6,89	0,78	8,01	0,94	6,62	0,89
103	Kab Tangerang	10,26	0,94	11,05	1,19	12,56	1,14	13,77	1,08	10,21	1,23	11,57	1,12
104	Kab Serang	6,23	1,09	7,48	1,05	8,28	1,02	7,26	1,03	7,49	1,02	7,50	1,04
105	Kota Tangerang	4,94	1,08	6,16	1,17	7,29	1,25	7,93	1,03	8,23	1,22	6,91	1,15
106	Kota Cilegon	2,45	1,07	3,17	1,08	3,64	0,99	4,38	1,01	4,25	0,88	3,58	1,11

LAMPIRAN 5

**DAFTAR SAMPEL DANA PERIMBANGAN (DP)
DI KABUPATEN/KOTA PULAU JAWA
PERIODE 2006-2010**

NO	KABUPATEN / KOTA	DP
1	Kabupaten Bekasi	9,41
2	Kabupaten Ciamis	9,60
3	Kabupaten Cianjur	9,62
4	Kabupaten Cirebon	9,10
5	Kabupaten Indramayu	8,90
6	Kabupaten Kuningan	7,04
7	Kabupaten Majalengka	7,30
8	Kabupaten Karawang	9,40
9	Kabupaten Purwakarta	5,20
10	Kabupaten Subang	8,00
11	Kabupaten Sumedang	7,04
12	Kabupaten Tasikmalaya	9,12
13	Kota Banjar	2,70
14	Kota Bekasi	8,00
15	Kota Bogor	5,09
16	Kota Cimahi	3,60
17	Kota Cirebon	4,28
18	Kota Depok	5,79
19	Kota Sukabumi	3,45
20	Kota Tasikmalaya	4,80
21	Kabupaten Banjarnegara	5,71
22	Kabupaten Batang	4,60
23	Kabupaten Grobogan	6,66
24	Kabupaten Jepara	5,99
25	Kabupaten Karanganyar	5,79
26	Kabupaten Kebumen	7,10
27	Kabupaten Kendal	5,83
28	Kabupaten Kudus	5,62
29	Kabupaten Magelang	6,91
30	Kabupaten Pati	6,94
31	Kabupaten Pekalongan	5,44
32	Kabupaten Pemasang	6,35
33	Kabupaten Purbalingga	5,16
34	Kabupaten Purworedjo	5,80
35	Kabupaten Rembang	4,73
36	Kabupaten Semarang	5,65
37	Kabupaten Sragen	6,17
38	Kabupaten Sukoharjo	5,76
39	Kabupaten Tegal	6,62
40	Kabupaten Temanggung	4,83
41	Kabupaten Wonogiri	6,83

42	Kabupaten Wonosobo	4,99
43	Kota Semarang	8,86
44	Kota Surakarta	5,11
45	Kota Pekalongan	3,00
46	Kota Tegal	2,90
47	Kota Salatiga	2,70
48	Kabupaten Banyuwangi	8,59
49	Kabupaten Blitar	7,30
50	Kabupaten Bojonegoro	7,67
51	Kabupaten Bondowoso	5,00
52	Kabupaten Gresik	6,45
53	Kabupaten Jombang	6,60
54	Kabupaten Kediri	7,66
55	Kabupaten Lamongan	6,97
56	Kabupaten Lumajang	6,00
57	Kabupaten Madiun	5,36
58	Kabupaten Magetan	5,58
59	Kabupaten Ngawi	6,11
60	Kabupaten Pamekasan	5,37
61	Kabupaten Pasuruan	7,47
62	Kabupaten Ponorogo	6,27
63	Kabupaten Probolinggo	6,13
64	Kabupaten Sampang	5,10
65	Kabupaten Sidoarjo	8,60
66	Kabupaten Situbondo	4,80
67	Kabupaten Sumenep	6,76
68	Kabupaten Trenggalek	5,42
69	Kabupaten Tuban	6,33
70	Kabupaten Tulungagung	7,12
71	Kota Kediri	4,68
72	Kota Madiun	3,08
73	Kota Malang	5,59
74	Kota Mojokerto	2,70
75	Kota Pasuruan	2,90
76	Kabupaten Kulon Progo	4,59
77	Kabupaten Bantul	6,39
78	Kabupaten Gunung Kidul	5,73
79	Kabupaten Sleman	7,00
80	Kota Yogyakarta	4,69
81	Kabupaten Lebak	6,62
82	Kabupaten Serang	7,50
83	Kota Tangerang	6,91
84	Kota Cilegon	3,58

LAMPIRAN 6

**DAFTAR SAMPEL RASIO EFEKTIVITAS
DI KABUPATEN/KOTA PULAU JAWA
PERIODE 2006-2010**

NO	KABUPATEN/KOTA	RASIO
1	Kabupaten Bekasi	1,19
2	Kabupaten Ciamis	0,94
3	Kabupaten Cianjur	0,98
4	Kabupaten Cirebon	0,94
5	Kabupaten Indramayu	1,00
6	Kabupaten Kuningan	0,97
7	Kabupaten Majalengka	1,01
8	Kabupaten Karawang	1,11
9	Kabupaten Purwakarta	1,00
10	Kabupaten Subang	1,05
11	Kabupaten Sumedang	0,99
12	Kabupaten Tasikmalaya	1,13
13	Kota Banjar	1,16
14	Kota Bekasi	1,11
15	Kota Bogor	1,11
16	Kota Cimahi	1,01
17	Kota Cirebon	0,96
18	Kota Depok	1,12
19	Kota Sukabumi	1,12
20	Kota Tasikmalaya	1,08
21	Kabupaten Banjarnegara	1,05
22	Kabupaten Batang	1,19
23	Kabupaten Grobogan	1,19
24	Kabupaten Jepara	1,00
25	Kabupaten Karanganyar	1,09
26	Kabupaten Kebumen	1,13
27	Kabupaten Kendal	1,07
28	Kabupaten Kudus	1,10
29	Kabupaten Magelang	1,10
30	Kabupaten Pati	1,17
31	Kabupaten Pekalongan	1,14
32	Kabupaten Pemalang	1,13
33	Kabupaten Purbalingga	1,04
34	Kabupaten Purworedjo	1,06
35	Kabupaten Rembang	1,09
36	Kabupaten Semarang	1,03
37	Kabupaten Sragen	1,12
38	Kabupaten Sukoharjo	1,08
39	Kabupaten Tegal	1,04
40	Kabupaten Temanggung	0,95

41	Kabupaten Wonogiri	1,05
42	Kabupaten Wonosobo	1,02
43	Kota Semarang	1,07
44	Kota Surakarta	1,21
45	Kota Pekalongan	1,16
46	Kota Tegal	1,11
47	Kota Salatiga	1,20
48	Kabupaten Banyuwangi	1,12
49	Kabupaten Blitar	1,08
50	Kabupaten Bojonegoro	1,08
51	Kabupaten Bondowoso	1,07
52	Kabupaten Gresik	1,06
53	Kabupaten Jombang	1,16
54	Kabupaten Kediri	1,16
55	Kabupaten Lamongan	0,96
56	Kabupaten Lumajang	1,11
57	Kabupaten Madiun	1,05
58	Kabupaten Magetan	1,08
59	Kabupaten Ngawi	1,11
60	Kabupaten Pamekasan	1,10
61	Kabupaten Pasuruan	1,18
62	Kabupaten Ponorogo	1,06
63	Kabupaten Probolinggo	1,22
64	Kabupaten Sampang	1,32
65	Kabupaten Sidoarjo	1,05
66	Kabupaten Situbondo	1,19
67	Kabupaten Sumenep	1,10
68	Kabupaten Trenggalek	1,06
69	Kabupaten Tuban	1,22
70	Kabupaten Tulungagung	1,20
71	Kota Kediri	1,05
72	Kota Madiun	1,26
73	Kota Malang	1,04
74	Kota Mojokerto	1,22
75	Kota Pasuruan	1,21
76	Kabupaten Kulon Progo	1,05
77	Kabupaten Bantul	1,17
78	Kabupaten Gunung Kidul	1,11
79	Kabupaten Sleman	1,15
80	Kota Yogyakarta	1,07
81	Kabupaten Lebak	0,89
82	Kabupaten Serang	1,04
83	Kota Tangerang	1,15
84	Kota Cilegon	1,11

LAMPIRAN 7

**DAFTAR DP (X) DAN RASIO EFEKTIVITAS (Y)
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PULAU JAWA 2006-2010**

NO	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL	
		DP (X)	RASIO (Y)
1	Kabupaten Bekasi	9,41	1,19
2	Kabupaten Ciamis	9,60	0,94
3	Kabupaten Cianjur	9,62	0,98
4	Kabupaten Cirebon	9,10	0,94
5	Kabupaten Indramayu	8,90	1,00
6	Kabupaten Kuningan	7,04	0,97
7	Kabupaten Majalengka	7,30	1,01
8	Kabupaten Karawang	9,40	1,11
9	Kabupaten Purwakarta	5,20	1,00
10	Kabupaten Subang	8,00	1,05
11	Kabupaten Sumedang	7,04	0,99
12	Kabupaten Tasikmalaya	9,12	1,13
13	Kota Banjar	2,70	1,16
14	Kota Bekasi	8,00	1,11
15	Kota Bogor	5,09	1,11
16	Kota Cimahi	3,60	1,01
17	Kota Cirebon	4,28	0,96
18	Kota Depok	5,79	1,12
19	Kota Sukabumi	3,45	1,12
20	Kota Tasikmalaya	4,80	1,08
21	Kabupaten Banjarnegara	5,71	1,05
22	Kabupaten Batang	4,60	1,19
23	Kabupaten Grobogan	6,66	1,19
24	Kabupaten Jepara	5,99	1,00
25	Kabupaten Karanganyar	5,79	1,09
26	Kabupaten Kebumen	7,10	1,13
27	Kabupaten Kendal	5,83	1,07
28	Kabupaten Kudus	5,62	1,10
29	Kabupaten Magelang	6,91	1,10
30	Kabupaten Pati	6,94	1,17
31	Kabupaten Pekalongan	5,44	1,14
32	Kabupaten Pemalang	6,35	1,13
33	Kabupaten Purbalingga	5,16	1,04
34	Kabupaten Purworedjo	5,80	1,06
35	Kabupaten Rembang	4,73	1,09
36	Kabupaten Semarang	5,65	1,03
37	Kabupaten Sragen	6,17	1,12
38	Kabupaten Sukoharjo	5,76	1,08
39	Kabupaten Tegal	6,62	1,04

40	Kabupaten Temanggung	4,83	0,95
41	Kabupaten Wonogiri	6,83	1,05
42	Kabupaten Wonosobo	4,99	1,02
43	Kota Semarang	8,86	1,07
44	Kota Surakarta	5,11	1,21
45	Kota Pekalongan	3,00	1,16
46	Kota Tegal	2,90	1,11
47	Kota Salatiga	2,70	1,20
48	Kabupaten Banyuwangi	8,59	1,12
49	Kabupaten Blitar	7,30	1,08
50	Kabupaten Bojonegoro	7,67	1,08
51	Kabupaten Bondowoso	5,00	1,07
52	Kabupaten Gresik	6,45	1,06
53	Kabupaten Jombang	6,60	1,16
54	Kabupaten Kediri	7,66	1,16
55	Kabupaten Lamongan	6,97	0,96
56	Kabupaten Lumajang	6,00	1,11
57	Kabupaten Madiun	5,36	1,05
58	Kabupaten Magetan	5,58	1,08
59	Kabupaten Ngawi	6,11	1,11
60	Kabupaten Pamekasan	5,37	1,10
61	Kabupaten Pasuruan	7,47	1,18
62	Kabupaten Ponorogo	6,27	1,06
63	Kabupaten Probolinggo	6,13	1,22
64	Kabupaten Sampang	5,10	1,32
65	Kabupaten Sidoarjo	8,60	1,05
66	Kabupaten Situbondo	4,80	1,19
67	Kabupaten Sumenep	6,76	1,10
68	Kabupaten Trenggalek	5,42	1,06
69	Kabupaten Tuban	6,33	1,22
70	Kabupaten Tulungagung	7,12	1,20
71	Kota Kediri	4,68	1,05
72	Kota Madiun	3,08	1,26
73	Kota Malang	5,59	1,04
74	Kota Mojokerto	2,70	1,22
75	Kota Pasuruan	2,90	1,21
76	Kabupaten Kulon Progo	4,59	1,05
77	Kabupaten Bantul	6,39	1,17
78	Kabupaten Gunung Kidul	5,73	1,11
79	Kabupaten Sleman	7,00	1,15
80	Kota Yogyakarta	4,69	1,07
81	Kabupaten Lebak	6,62	0,89
82	Kabupaten Serang	7,50	1,04
83	Kota Tangerang	6,91	1,15
84	Kota Cilegon	3,58	1,11
Jumlah		510,08	91,85

LAMPIRAN 8

PERHITUNGAN UNTUK MEMBUAT GRAFIK HISTOGRAM VARIABEL X DAN VARIABEL Y

1. Dana Perimbangan (Variabel X)

$$\begin{aligned} \text{Range (R)} &= \text{Data terbesar} - \text{Data terkecil} \\ &= 9,62 - 2,70 \\ &= 6,92 \end{aligned}$$

Banyak kelas interval (dengan rumus strugres)

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,3 (\log n) \\ &= 1 + 3,3 (\log 84) \\ &= 1 + 3,3 (1,9243) \\ &= 1 + 6,3501 \\ &= 7,3501 = 7 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Panjang kelas interval

$$\begin{aligned} P &= \frac{R}{K} \\ &= \frac{6,92}{7} \\ &= 1,05 \end{aligned}$$

2. Rasio Efektivitas (Variabel Y)

$$\begin{aligned} \text{Range (R)} &= \text{Data terbesar} - \text{Data terkecil} \\ &= 1,32 - 0,89 \\ &= 0,43 \end{aligned}$$

Banyak kelas interval (dengan rumus strugres)

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,3 (\log n) \\ &= 1 + 3,3 (\log 84) \\ &= 1 + 3,3 (1,9243) \\ &= 1 + 6,3501 \\ &= 7,3501 = 7 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Panjang kelas interval

$$\begin{aligned} P &= \frac{R}{K} \\ &= \frac{0,43}{7} \\ &= 0,06 \end{aligned}$$

LAMPIRAN 9

**DAFTAR DISTRIBUSI FREKUENSI VARIABEL X DAN
VARIABEL Y**

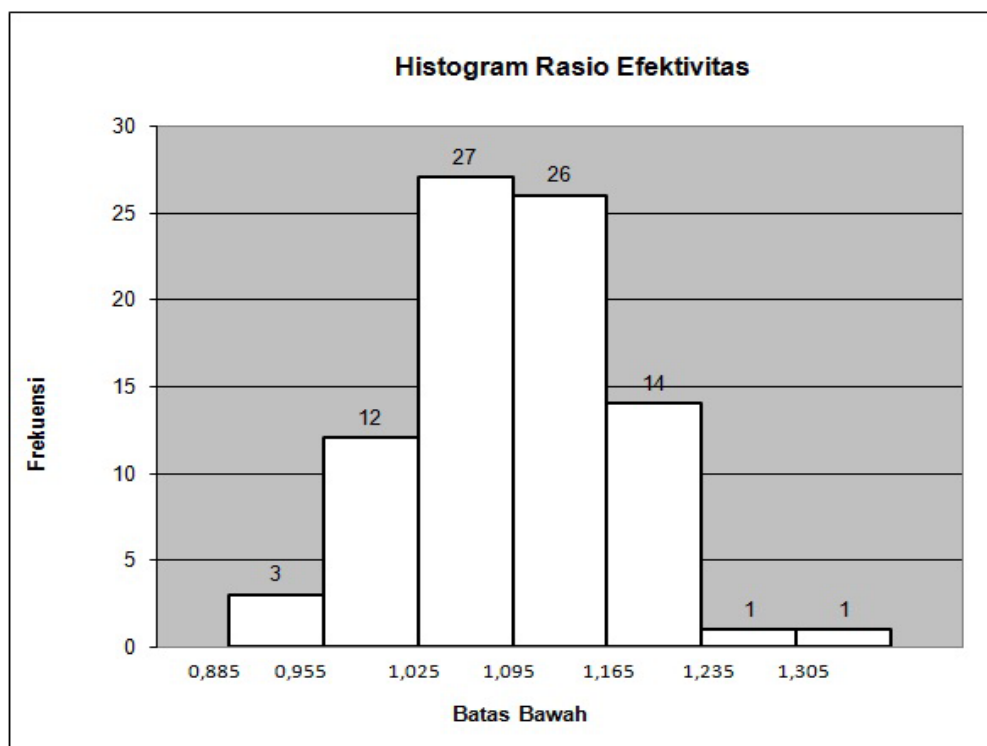
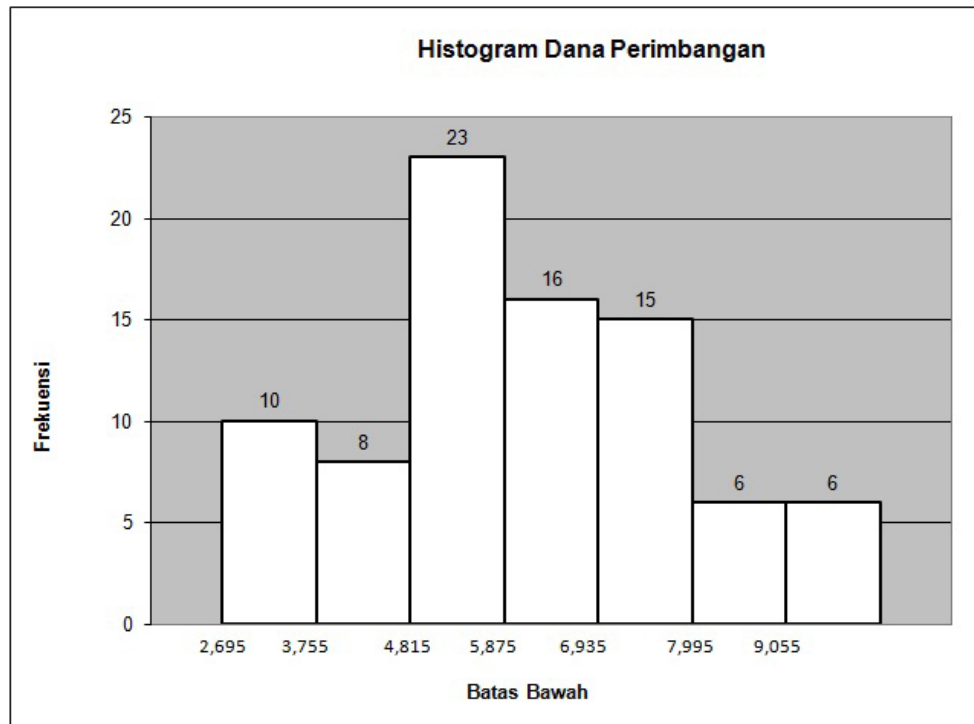
VARIABEL X – DANA PERIMBANGAN

No	Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi	Frek Relatif
1	2,70	-	3,75	2,695	3,755	10	11,90%
2	3,76	-	4,81	3,755	4,815	8	9,52%
3	4,82	-	5,87	4,815	5,875	23	27,38%
4	5,88	-	6,93	5,875	6,935	16	19,05%
5	6,94	-	7,99	6,935	7,995	15	17,86%
6	8,00	-	9,05	7,995	9,055	6	7,14%
7	9,06	-	10,11	9,055	10,115	6	7,14%
Jumlah						84	100%

VARIABEL Y – KINERJA KEUANGAN (RASIO EFEKTIVITAS)

No	Interval			Batas Bawah	Batas Atas	Frekuensi	Frek Relatif
1	0,89	-	0,95	0,885	0,955	3	3,57%
2	0,96	-	1,02	0,955	1,025	12	14,29%
3	1,03	-	1,09	1,025	1,095	27	32,14%
4	1,10	-	1,16	1,095	1,165	26	30,95%
5	1,17	-	1,23	1,165	1,235	14	16,67%
6	1,24	-	1,30	1,235	1,305	1	1,19%
7	1,31	-	1,38	1,305	1,385	1	1,19%
Jumlah						84	100%

LAMPIRAN 10



LAMPIRAN 11

**PERHITUNGAN RATA-RATA, VARIANS, DAN STANDAR DEVIASI
VARIABEL X (DANA PERIMBANGAN)**

n	X	$(X - \bar{X})$	$(X - \bar{X})^2$
1	2,70	-3,37	11,37
2	2,70	-3,37	11,37
3	2,70	-3,37	11,37
4	2,90	-3,17	10,06
5	2,90	-3,17	10,06
6	3,00	-3,07	9,44
7	3,08	-2,99	8,96
8	3,45	-2,62	6,89
9	3,58	-2,49	6,21
10	3,60	-2,47	6,11
11	4,28	-1,79	3,21
12	4,59	-1,48	2,20
13	4,60	-1,47	2,17
14	4,68	-1,39	1,94
15	4,69	-1,39	1,92
16	4,73	-1,35	1,81
17	4,80	-1,27	1,63
18	4,80	-1,27	1,62
19	4,83	-1,24	1,55
20	4,99	-1,08	1,17
21	5,00	-1,07	1,15
22	5,09	-0,99	0,97
23	5,10	-0,97	0,95
24	5,11	-0,96	0,92
25	5,16	-0,91	0,84
26	5,20	-0,87	0,76
27	5,36	-0,71	0,51
28	5,37	-0,70	0,49
29	5,42	-0,66	0,43
30	5,44	-0,63	0,40
31	5,58	-0,49	0,24
32	5,59	-0,48	0,23
33	5,62	-0,45	0,20
34	5,65	-0,43	0,18
35	5,71	-0,36	0,13
36	5,73	-0,35	0,12
37	5,76	-0,31	0,10
38	5,79	-0,28	0,08
39	5,79	-0,28	0,08
40	5,80	-0,27	0,07
41	5,83	-0,25	0,06
42	5,99	-0,08	0,01

A. Rata-Rata

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum X}{n} \\ &= \frac{510,08}{84} \\ &= \underline{\underline{6,07}}\end{aligned}$$

B. Varians

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1} \\ &= \frac{244,19}{84 - 1} \\ &= \underline{\underline{2,9420}}\end{aligned}$$

C. Standar Deviasi

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{\frac{\sum (X - \bar{X})^2}{n - 1}} \\ &= \sqrt{2,9420} \\ &= \underline{\underline{1,7152}}\end{aligned}$$

D. Median

$$\begin{aligned}\text{Md} &= \frac{5,99 + 6,00}{2} \\ &= \underline{\underline{5,99}}\end{aligned}$$

43	6,00	-0,07	0,01
44	6,11	0,03	0,00
45	6,13	0,06	0,00
46	6,17	0,09	0,01
47	6,27	0,20	0,04
48	6,33	0,26	0,07
49	6,35	0,28	0,08
50	6,39	0,32	0,10
51	6,45	0,38	0,14
52	6,60	0,53	0,28
53	6,62	0,55	0,30
54	6,62	0,55	0,30
55	6,66	0,58	0,34
56	6,76	0,69	0,48
57	6,83	0,76	0,57
58	6,91	0,84	0,70
59	6,91	0,84	0,70
60	6,94	0,87	0,75
61	6,97	0,90	0,81
62	7,00	0,93	0,86
63	7,04	0,96	0,93
64	7,04	0,97	0,93
65	7,10	1,03	1,06
66	7,12	1,05	1,10
67	7,30	1,23	1,51
68	7,30	1,23	1,51
69	7,47	1,40	1,96
70	7,50	1,43	2,04
71	7,66	1,59	2,53
72	7,67	1,60	2,55
73	8,00	1,92	3,70
74	8,00	1,93	3,72
75	8,59	2,52	6,35
76	8,60	2,53	6,39
77	8,86	2,79	7,77
78	8,90	2,82	7,98
79	9,10	3,03	9,16
80	9,12	3,05	9,27
81	9,40	3,33	11,07
82	9,41	3,34	11,12
83	9,60	3,53	12,44
84	9,62	3,55	12,58
Σ	510,08	0,00	244,19

LAMPIRAN 12

**PERHITUNGAN RATA-RATA, VARIANS, DAN STANDAR DEVIASI
VARIABEL Y (RASIO EFEKTIVITAS)**

n	Y	$(Y - \bar{Y})$	$(Y - \bar{Y})^2$
1	0,89	-0,21	0,04
2	0,94	-0,15	0,02
3	0,94	-0,15	0,02
4	0,95	-0,15	0,02
5	0,96	-0,13	0,02
6	0,96	-0,13	0,02
7	0,97	-0,12	0,02
8	0,98	-0,11	0,01
9	0,99	-0,10	0,01
10	1,00	-0,10	0,01
11	1,00	-0,09	0,01
12	1,00	-0,09	0,01
13	1,01	-0,09	0,01
14	1,01	-0,08	0,01
15	1,02	-0,07	0,01
16	1,03	-0,07	0,00
17	1,04	-0,06	0,00
18	1,04	-0,05	0,00
19	1,04	-0,05	0,00
20	1,04	-0,05	0,00
21	1,05	-0,05	0,00
22	1,05	-0,05	0,00
23	1,05	-0,05	0,00
24	1,05	-0,04	0,00
25	1,05	-0,04	0,00
26	1,05	-0,04	0,00
27	1,05	-0,04	0,00
28	1,06	-0,03	0,00
29	1,06	-0,03	0,00
30	1,06	-0,03	0,00
31	1,06	-0,03	0,00
32	1,07	-0,03	0,00
33	1,07	-0,03	0,00
34	1,07	-0,03	0,00
35	1,07	-0,02	0,00
36	1,08	-0,02	0,00
37	1,08	-0,02	0,00
38	1,08	-0,02	0,00
39	1,08	-0,01	0,00
40	1,08	-0,01	0,00
41	1,09	0,00	0,00
42	1,09	0,00	0,00
43	1,10	0,00	0,00
44	1,10	0,01	0,00
45	1,10	0,01	0,00

A. Rata-Rata

$$\begin{aligned}\bar{Y} &= \frac{\sum Y}{n} \\ &= \frac{91,85}{84} \\ &= \underline{\underline{1,09}}\end{aligned}$$

B. Varians

$$\begin{aligned}S^2 &= \frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n - 1} \\ &= \frac{0,54}{84 - 1} \\ &= \underline{\underline{0,0065}}\end{aligned}$$

C. Standar Deviasi

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{\frac{\sum (Y - \bar{Y})^2}{n - 1}} \\ S &= \sqrt{S^2} \\ &= \underline{\underline{0,0807}}\end{aligned}$$

D. Median

$$\begin{aligned}Md &= \frac{1,09 + 1,10}{2} \\ Md &= \underline{\underline{1,09}}\end{aligned}$$

46	1,10	0,01	0,00
47	1,11	0,01	0,00
48	1,11	0,01	0,00
49	1,11	0,02	0,00
50	1,11	0,02	0,00
51	1,11	0,02	0,00
52	1,11	0,02	0,00
53	1,11	0,02	0,00
54	1,11	0,02	0,00
55	1,12	0,02	0,00
56	1,12	0,02	0,00
57	1,12	0,03	0,00
58	1,12	0,03	0,00
59	1,13	0,04	0,00
60	1,13	0,04	0,00
61	1,13	0,04	0,00
62	1,14	0,05	0,00
63	1,15	0,06	0,00
64	1,15	0,06	0,00
65	1,16	0,07	0,00
66	1,16	0,07	0,00
67	1,16	0,07	0,00
68	1,16	0,07	0,00
69	1,17	0,08	0,01
70	1,17	0,08	0,01
71	1,18	0,09	0,01
72	1,19	0,09	0,01
73	1,19	0,10	0,01
74	1,19	0,10	0,01
75	1,19	0,10	0,01
76	1,20	0,10	0,01
77	1,20	0,11	0,01
78	1,21	0,12	0,01
79	1,21	0,12	0,01
80	1,22	0,13	0,02
81	1,22	0,13	0,02
82	1,22	0,13	0,02
83	1,26	0,17	0,03
84	1,32	0,23	0,05
Σ	91,85	0,00	0,54

LAMPIRAN 13

ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif Variabel X
Dana Perimbangan

Mean	6,07
Median	5,99
Standard Deviation	1,7152
Sample Variance	2,9420
Range	6,92
Minimum	2,70
Maximum	9,62
Sum	510,08
Count	84
Largest(1)	9,62
Smallest(1)	2,70

Statistik Deskriptif Variabel Y
Kinerja Keuangan Pemda (Rasio Efektivitas)

Mean	1,09
Median	1,09
Standard Deviation	0,0807
Sample Variance	0,0065
Range	0,43
Minimum	0,89
Maximum	1,32
Sum	91,85
Count	84
Largest(1)	1,32
Smallest(1)	0,89

LAMPIRAN 14

PERSAMAAN REGRESI

n	X	Y	X ²	XY	Ŷ
1	2,70	1,19	7,29	3,22	1,15
2	2,70	1,20	7,29	3,24	1,15
3	2,70	1,16	7,29	3,13	1,15
4	2,90	1,22	8,41	3,55	1,14
5	2,90	1,11	8,41	3,23	1,14
6	3,00	1,21	9,00	3,63	1,14
7	3,08	1,16	9,48	3,58	1,14
8	3,45	1,26	11,89	4,35	1,13
9	3,58	1,12	12,81	4,01	1,13
10	3,60	1,11	12,96	4,00	1,13
11	4,28	1,01	18,32	4,34	1,12
12	4,59	0,96	21,05	4,42	1,12
13	4,60	1,05	21,16	4,85	1,12
14	4,68	1,19	21,90	5,57	1,12
15	4,69	1,05	21,96	4,90	1,12
16	4,73	1,07	22,35	5,08	1,11
17	4,80	1,09	23,02	5,23	1,11
18	4,80	1,08	23,04	5,19	1,11
19	4,83	1,19	23,32	5,74	1,11
20	4,99	0,95	24,89	4,72	1,11
21	5,00	1,02	25,00	5,09	1,11
22	5,09	1,07	25,87	5,43	1,11
23	5,10	1,11	26,01	5,64	1,11
24	5,11	1,32	26,12	6,76	1,11
25	5,16	1,21	26,60	6,24	1,11
26	5,20	1,04	27,04	5,43	1,11
27	5,36	1,00	28,74	5,34	1,10
28	5,37	1,05	28,86	5,63	1,10
29	5,42	1,10	29,33	5,94	1,10
30	5,44	1,06	29,62	5,79	1,10
31	5,58	1,14	31,15	6,39	1,10
32	5,59	1,08	31,27	6,02	1,10
33	5,62	1,04	31,63	5,86	1,10
34	5,65	1,10	31,89	6,21	1,10
35	5,71	1,03	32,62	5,87	1,10
36	5,73	1,05	32,80	6,01	1,10
37	5,76	1,11	33,19	6,39	1,10
38	5,79	1,08	33,54	6,27	1,10
39	5,79	1,12	33,55	6,47	1,10
40	5,80	1,09	33,68	6,33	1,10

Rumus Persamaan Regresi:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Perhitungan untuk Mencari Nilai a:

$$a = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X \sum XY}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{24391,39}{20511,76}$$

$$a = \underline{\underline{1,19}}$$

Perhitungan untuk Mencari Nilai b:

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{-323,367}{20511,762}$$

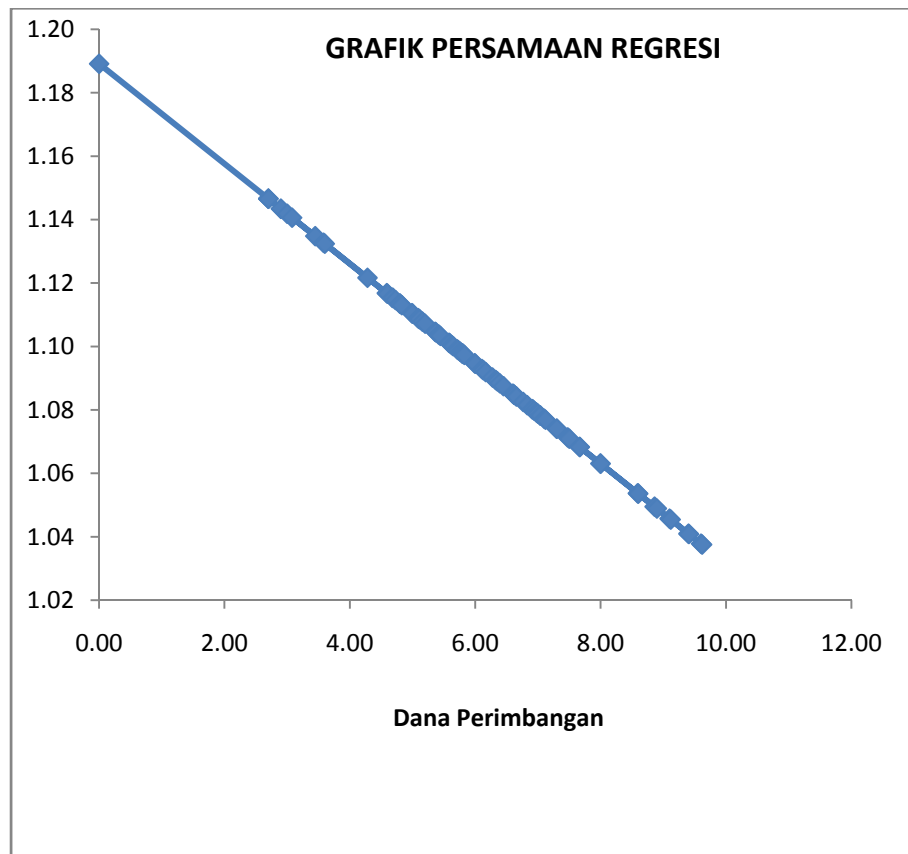
$$b = \underline{\underline{-0,02}}$$

Dengan demikian bentuk hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan dalam persamaan regresi:

$$\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$$

41	5,83	1,06	33,93	6,18	1,10
42	5,99	1,07	35,87	6,39	1,09
43	6,00	1,00	36,00	6,00	1,09
44	6,11	1,11	37,29	6,76	1,09
45	6,13	1,11	37,55	6,82	1,09
46	6,17	1,22	38,02	7,52	1,09
47	6,27	1,12	39,37	7,01	1,09
48	6,33	1,06	40,04	6,73	1,09
49	6,35	1,22	40,34	7,75	1,09
50	6,39	1,13	40,83	7,24	1,09
51	6,45	1,17	41,60	7,57	1,09
52	6,60	1,06	43,56	7,00	1,09
53	6,62	1,16	43,79	7,70	1,08
54	6,62	1,04	43,87	6,86	1,08
55	6,66	0,89	44,32	5,90	1,08
56	6,76	1,19	45,76	8,07	1,08
57	6,83	1,10	46,62	7,52	1,08
58	6,91	1,05	47,72	7,25	1,08
59	6,91	1,10	47,77	7,60	1,08
60	6,94	1,15	48,18	8,00	1,08
61	6,97	1,17	48,64	8,15	1,08
62	7,00	0,96	48,97	6,75	1,08
63	7,04	1,15	49,51	8,09	1,08
64	7,04	0,97	49,53	6,82	1,08
65	7,10	0,99	50,41	7,05	1,08
66	7,12	1,13	50,70	8,05	1,08
67	7,30	1,20	53,29	8,74	1,07
68	7,30	1,01	53,29	7,34	1,07
69	7,47	1,08	55,86	8,05	1,07
70	7,50	1,18	56,25	8,87	1,07
71	7,66	1,04	58,73	7,99	1,07
72	7,67	1,16	58,80	8,90	1,07
73	8,00	1,08	63,93	8,60	1,06
74	8,00	1,11	64,00	8,88	1,06
75	8,59	1,05	73,82	8,99	1,05
76	8,60	1,12	73,96	9,63	1,05
77	8,86	1,05	78,50	9,30	1,05
78	8,90	1,07	79,15	9,50	1,05
79	9,10	1,00	82,78	9,09	1,05
80	9,12	0,94	83,13	8,59	1,05
81	9,40	1,13	88,36	10,66	1,04
82	9,41	1,11	88,50	10,44	1,04
83	9,60	0,94	92,16	9,02	1,04
84	9,62	0,98	92,52	9,43	1,04
Σ	510,08	91,85	3341,58	553,88	91,85

LAMPIRAN 15



LAMPIRAN 16

UJI NORMALITAS GALAT TAKSIRAN

X= Dana Perimbangan

Y= Rasio Efektivitas

n	X	$\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$	Y	Y - \hat{Y}	X_i	$(X_i - \bar{X})^2$	$Z_i = (X_i - \bar{X}_i) / s$	Zt	F(Zi)	S(Zi)	$ F(Z_i) - S(Z_i) $
1	2,70	1,15	1,19	0,05	0,20	0,04	-2,60	0,4953	0,005	0,01	0,0072
2	2,70	1,15	1,20	0,05	0,16	0,03	-2,15	0,4842	0,016	0,02	0,0080
3	2,70	1,15	1,16	0,01	0,15	0,02	-2,01	0,4778	0,022	0,04	0,0135
4	2,90	1,14	1,22	0,08	0,11	0,01	-1,51	0,4332	0,067	0,05	0,0192
5	2,90	1,14	1,11	-0,03	0,11	0,01	-1,43	0,4236	0,076	0,06	0,0169
6	3,00	1,14	1,21	0,07	0,11	0,01	-1,43	0,4222	0,078	0,07	0,0064
7	3,08	1,14	1,16	0,02	0,11	0,01	-1,41	0,4207	0,079	0,08	0,0040
8	3,45	1,13	1,26	0,13	0,10	0,01	-1,36	0,4131	0,087	0,10	0,0083
9	3,58	1,13	1,12	-0,01	0,10	0,01	-1,29	0,3997	0,100	0,11	0,0068
10	3,60	1,13	1,11	-0,02	0,09	0,01	-1,24	0,3925	0,108	0,12	0,0115
11	4,28	1,12	1,01	-0,11	0,09	0,01	-1,21	0,3849	0,115	0,13	0,0159
12	4,59	1,12	0,96	-0,15	0,08	0,01	-1,10	0,3643	0,136	0,14	0,0072
13	4,60	1,12	1,05	-0,06	0,07	0,01	-0,94	0,3264	0,174	0,15	0,0188
14	4,68	1,12	1,19	0,07	0,07	0,00	-0,91	0,3186	0,181	0,17	0,0147
15	4,69	1,12	1,05	-0,07	0,07	0,00	-0,90	0,3159	0,184	0,18	0,0055
16	4,73	1,11	1,07	-0,04	0,06	0,00	-0,83	0,2967	0,203	0,19	0,0128
17	4,80	1,11	1,09	-0,02	0,06	0,00	-0,82	0,2939	0,206	0,20	0,0037
18	4,80	1,11	1,08	-0,03	0,06	0,00	-0,76	0,2764	0,224	0,21	0,0093
19	4,83	1,11	1,19	0,07	0,06	0,00	-0,76	0,2734	0,227	0,23	0,0004
20	4,99	1,11	0,95	-0,16	0,06	0,00	-0,75	0,2704	0,230	0,24	0,0085
21	5,00	1,11	1,02	-0,09	0,05	0,00	-0,65	0,2389	0,261	0,25	0,0111
22	5,09	1,11	1,07	-0,04	0,05	0,00	-0,64	0,2389	0,261	0,26	0,0008
23	5,10	1,11	1,11	0,00	0,05	0,00	-0,61	0,2291	0,271	0,27	0,0029
24	5,11	1,11	1,32	0,21	0,04	0,00	-0,55	0,2088	0,291	0,29	0,0055
25	5,16	1,11	1,21	0,10	0,04	0,00	-0,53	0,2019	0,298	0,30	0,0005
26	5,20	1,11	1,04	-0,06	0,04	0,00	-0,52	0,1950	0,305	0,31	0,0045
27	5,36	1,10	1,00	-0,11	0,04	0,00	-0,47	0,1808	0,319	0,32	0,0022

28	5,37	1,10	1,05	-0,06	-	0,03	0,00	-0,42	0,1628	0,337	0,33	0,0039
29	5,42	1,10	1,10	-0,01	-	0,03	0,00	-0,41	0,1554	0,345	0,35	0,0006
30	5,44	1,10	1,06	-0,04	-	0,03	0,00	-0,40	0,1517	0,348	0,36	0,0088
31	5,58	1,10	1,14	0,04	-	0,03	0,00	-0,37	0,1443	0,356	0,37	0,0133
32	5,59	1,10	1,08	-0,02	-	0,03	0,00	-0,35	0,1331	0,367	0,38	0,0141
33	5,62	1,10	1,04	-0,06	-	0,03	0,00	-0,34	0,1331	0,367	0,39	0,0260
34	5,65	1,10	1,10	0,00	-	0,02	0,00	-0,33	0,1255	0,375	0,40	0,0303
35	5,71	1,10	1,03	-0,07	-	0,02	0,00	-0,31	0,1217	0,378	0,42	0,0384
36	5,73	1,10	1,05	-0,05	-	0,02	0,00	-0,31	0,1179	0,382	0,43	0,0465
37	5,76	1,10	1,11	0,01	-	0,02	0,00	-0,29	0,1141	0,386	0,44	0,0546
38	5,79	1,10	1,08	-0,02	-	0,02	0,00	-0,20	0,0754	0,425	0,45	0,0278
39	5,79	1,10	1,12	0,02	-	0,01	0,00	-0,17	0,0675	0,433	0,46	0,0318
40	5,80	1,10	1,09	-0,01	-	0,01	0,00	-0,10	0,0359	0,464	0,48	0,0121
41	5,83	1,10	1,06	-0,04	-	0,01	0,00	-0,09	0,0359	0,464	0,49	0,0240
42	5,99	1,09	1,07	-0,03	-	0,01	0,00	-0,09	0,0359	0,464	0,50	0,0359
43	6,00	1,09	1,00	-0,09	-	0,00	0,00	-0,04	0,0120	0,488	0,51	0,0239
44	6,11	1,09	1,11	0,01	-	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,500	0,52	0,0238
45	6,13	1,09	1,11	0,02	-	0,00	0,00	0,01	0,0000	0,500	0,54	0,0357
46	6,17	1,09	1,22	0,13	-	0,01	0,00	0,07	0,0279	0,528	0,55	0,0197
47	6,27	1,09	1,12	0,03	-	0,01	0,00	0,15	0,0596	0,560	0,56	0,0001
48	6,33	1,09	1,06	-0,03	-	0,01	0,00	0,16	0,0636	0,564	0,57	0,0078
49	6,35	1,09	1,22	0,13	-	0,01	0,00	0,18	0,0675	0,568	0,58	0,0158
50	6,39	1,09	1,13	0,04	-	0,01	0,00	0,18	0,0675	0,568	0,60	0,0277
51	6,45	1,09	1,17	0,09	-	0,02	0,00	0,25	0,0948	0,595	0,61	0,0123
52	6,60	1,09	1,06	-0,02	-	0,02	0,00	0,25	0,0987	0,599	0,62	0,0203
53	6,62	1,08	1,16	0,08	-	0,02	0,00	0,25	0,0987	0,599	0,63	0,0323
54	6,62	1,08	1,04	-0,05	-	0,02	0,00	0,26	0,1026	0,603	0,64	0,0403
55	6,66	1,08	0,89	-0,20	-	0,02	0,00	0,28	0,1064	0,606	0,65	0,0484
56	6,76	1,08	1,19	0,11	-	0,02	0,00	0,30	0,1141	0,614	0,67	0,0526
57	6,83	1,08	1,10	0,02	-	0,03	0,00	0,35	0,1368	0,637	0,68	0,0418
58	6,91	1,08	1,05	-0,03	-	0,04	0,00	0,57	0,2123	0,712	0,69	0,0218
59	6,91	1,08	1,10	0,02	-	0,04	0,00	0,59	0,2190	0,719	0,70	0,0166
60	6,94	1,08	1,15	0,07	-	0,05	0,00	0,61	0,2291	0,729	0,71	0,0148
61	6,97	1,08	1,17	0,09	-	0,05	0,00	0,62	0,2291	0,729	0,73	0,0029
62	7,00	1,08	0,96	-0,11	-	0,05	0,00	0,70	0,2549	0,755	0,74	0,0168
63	7,04	1,08	1,15	0,07	-	0,05	0,00	0,70	0,2580	0,758	0,75	0,0080
64	7,04	1,08	0,97	-0,11	-	0,07	0,00	0,87	0,3078	0,808	0,76	0,0459
65	7,10	1,08	0,99	-0,08	-	0,07	0,00	0,90	0,3133	0,813	0,77	0,0395

66	7,12	1,08	1,13	0,05	0,07	0,00	0,91	0,3159	0,816	0,79	0,0302
67	7,30	1,07	1,20	0,12	0,07	0,01	0,94	0,3264	0,826	0,80	0,0288
68	7,30	1,07	1,01	-0,07	0,07	0,01	0,95	0,3289	0,829	0,81	0,0194
69	7,47	1,07	1,08	0,01	0,07	0,01	0,98	0,3365	0,837	0,82	0,0151
70	7,50	1,07	1,18	0,11	0,07	0,01	0,98	0,3365	0,837	0,83	0,0032
71	7,66	1,07	1,04	-0,03	0,08	0,01	1,03	0,3485	0,849	0,85	0,0033
72	7,67	1,07	1,16	0,09	0,08	0,01	1,06	0,3531	0,853	0,86	0,0040
73	8,00	1,06	1,08	0,01	0,09	0,01	1,13	0,3708	0,871	0,87	0,0018
74	8,00	1,06	1,11	0,05	0,09	0,01	1,18	0,3790	0,879	0,88	0,0020
75	8,59	1,05	1,05	-0,01	0,09	0,01	1,21	0,3849	0,885	0,89	0,0080
76	8,60	1,05	1,12	0,07	0,09	0,01	1,22	0,3869	0,887	0,90	0,0179
77	8,86	1,05	1,05	0,00	0,10	0,01	1,34	0,4099	0,910	0,92	0,0068
78	8,90	1,05	1,07	0,02	0,11	0,01	1,45	0,4251	0,925	0,93	0,0035
79	9,10	1,05	1,00	-0,05	0,11	0,01	1,47	0,4292	0,929	0,94	0,0113
80	9,12	1,05	0,94	-0,10	0,12	0,02	1,63	0,4474	0,947	0,95	0,0050
81	9,40	1,04	1,13	0,09	0,13	0,02	1,66	0,4515	0,952	0,96	0,0128
82	9,41	1,04	1,11	0,07	0,13	0,02	1,68	0,4525	0,953	0,98	0,0237
83	9,60	1,04	0,94	-0,10	0,13	0,02	1,72	0,4573	0,957	0,99	0,0308
84	9,62	1,04	0,98	-0,06	0,21	0,05	2,82	0,4975	0,998	1,00	0,0025
Σ	510,08	91,85	91,85	0,00	0,00	0,48	0,00	21,10	41,90	42,50	1,39

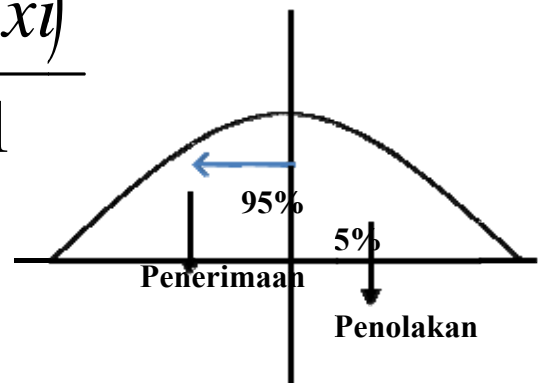
Rata-Rata	0,00
Standar Deviasi (s)	0,08

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

$$s = \sqrt{\frac{0,48}{(83)}}$$

s =

s = 0,076



Lh 0,0546

Lt 0,0967

Dari perhitungan, didapat nilai L_{hitung} terbesar = 0,0546

L_{tabel} $n = 84$ dengan taraf signifikan 0,05 adalah 0,0967

$L_{hitung} < L_{tabel}$.

**Maka, dapat disimpulkan bahwa
Data Berdistribusi Normal.**

LAMPIRAN 17

PERHITUNGAN UJI NORMALITAS GALAT TAKSIRAN REGRESI Y ATAS X DENGAN UJI LILIEFORS

1. Kolom X_i diurutkan dari nilai yang terkecil sampai terbesar (-0,20 sampai 0,21).
2. Kolom $(X_i - \bar{X}_i)^2$, Nilai X_i dikurang nilai rata-rata X_i .
Contoh kolom 1 = $(-0,20 - 0,00)^2 = 0,04$
3. Kolom $Z_i = (X_i - \bar{X}_i)/S$ Contoh Kolom 1 = $(-0,20)/0,08 = -2,60$
4. Kolom Z_{tabel} , dilihat dari Z_i , kemudian dikonsultasikan ke tabel Z kurva Normal.
Contoh : $Z_i = -2,60$ maka lihat didapat $Z_{tabel} = 0,4953$
5. Kolom $F(Z_i)$: Jika Z_i negatif, maka $0,5 - Z_{tabel}$. Jika Z_i positif, maka $0,5 + Z_{tabel}$.
Contoh : $F(Z_i) = 0,5 - 0,4953 = 0,005$
6. Kolom $S(Z_i)$: $S(Z_i) = \text{Nomor data} / \text{Jumlah data}$.
Contoh : $1/84 = 0,01$
7. Kolom **$|F(Z_i) - S(Z_i)|$** = harga mutlak $F(Z_i) - S(Z_i)$.
Contoh : $|F(Z_i) - S(Z_i)| = 0,005 - 0,01 = 0,0072$

LAMPIRAN 18

KESIMPULAN UJI NORMALITAS DATA VARIABEL X DAN Y

Hipotesis :

Ho : Model regresi berdistribusi normal

Ha : Model regresi tidak berdistribusi normal

Kriteria Pengujian :

Terima Ho, jika $L_h < L_t$ maka Model regresi berdistribusi normal

Tolak Ho, Jika $L_h > L_t$ maka Model regresi tidak berdistribusi normal

Hasil Perhitungan :

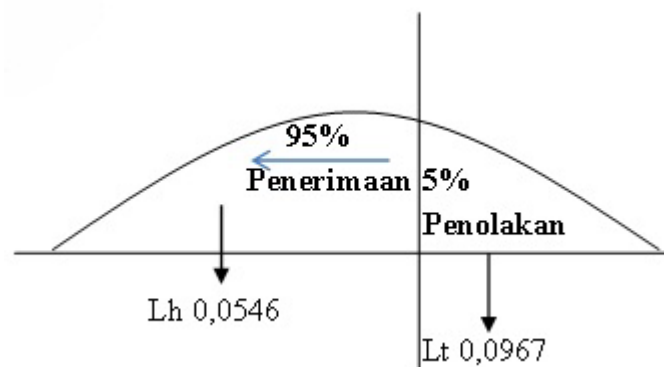
$L_h = 0,0546$ dari perhitungan didapat perhitungan L_h terbesar

$L_t = \frac{0,886}{\sqrt{n}}$ (taraf signifikan $\alpha = 0,05$ untuk sampel > 30)

Kesimpulan :

Karena $0,0546 < 0,0967$, berarti $L_h < L_t$

Artinya model regresi berdistribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa galat taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal



LAMPIRAN 19

UJI LINIERITAS REGRESI & UJI KEBERARTIAN REGRESI

X = Dana Perimbangan

Y = Rasio Efektivitas

n	k	X	Y	X ²	XY	Y ²
1	1	2,70	1,19	7,29	3,22	1,42
2		2,70	1,20	7,29	3,24	1,44
3		2,70	1,16	7,29	3,13	1,35
4	2	2,90	1,22	8,41	3,55	1,50
5		2,90	1,11	8,41	3,23	1,24
6	3	3,00	1,21	9,00	3,63	1,46
7	4	3,08	1,16	9,48	3,58	1,35
8	5	3,45	1,26	11,89	4,35	1,59
9	6	3,58	1,12	12,81	4,01	1,25
10	7	3,60	1,11	12,96	4,00	1,23
11	8	4,28	1,01	18,32	4,34	1,03
12	9	4,59	0,96	21,05	4,42	0,93
13	10	4,60	1,05	21,16	4,85	1,11
14	11	4,68	1,19	21,90	5,57	1,42
15	12	4,69	1,05	21,96	4,90	1,09
16	13	4,73	1,07	22,35	5,08	1,15
17	14	4,80	1,09	23,02	5,23	1,19
18		4,80	1,08	23,04	5,19	1,17
19	15	4,83	1,19	23,32	5,74	1,41
20	16	4,99	0,95	24,89	4,72	0,90
21	17	5,00	1,02	25,00	5,09	1,04
22	18	5,09	1,07	25,87	5,43	1,14
23	19	5,10	1,11	26,01	5,64	1,22
24	20	5,11	1,32	26,12	6,76	1,75
25	21	5,16	1,21	26,60	6,24	1,46
26	22	5,20	1,04	27,04	5,43	1,09
27	23	5,36	1,00	28,74	5,34	0,99
28	24	5,37	1,05	28,86	5,63	1,10
29	25	5,42	1,10	29,33	5,94	1,20
30	26	5,44	1,06	29,62	5,79	1,13
31	27	5,58	1,14	31,15	6,39	1,31
32	28	5,59	1,08	31,27	6,02	1,16
33	29	5,62	1,04	31,63	5,86	1,09
34	30	5,65	1,10	31,89	6,21	1,21
35	31	5,71	1,03	32,62	5,87	1,06
36	32	5,73	1,05	32,80	6,01	1,10
37	33	5,76	1,11	33,19	6,39	1,23
38	34	5,79	1,08	33,54	6,27	1,17
39		5,79	1,12	33,55	6,47	1,25
40	35	5,80	1,09	33,68	6,33	1,19
41	36	5,83	1,06	33,93	6,18	1,13
42	37	5,99	1,07	35,87	6,39	1,14
43	38	6,00	1,00	36,00	6,00	1,00

a = 1,19

b = -0,02

$\hat{Y} = 1,19 - 0,02X$

44	39	6,11	1,11	37,29	6,76	1,22
45	40	6,13	1,11	37,55	6,82	1,24
46	41	6,17	1,22	38,02	7,52	1,49
47	42	6,27	1,12	39,37	7,01	1,25
48	43	6,33	1,06	40,04	6,73	1,13
49	44	6,35	1,22	40,34	7,75	1,49
50	45	6,39	1,13	40,83	7,24	1,28
51	46	6,45	1,17	41,60	7,57	1,38
52	47	6,60	1,06	43,56	7,00	1,12
53	48	6,62	1,16	43,79	7,70	1,35
54		6,62	1,04	43,87	6,86	1,07
55	49	6,66	0,89	44,32	5,90	0,79
56	50	6,76	1,19	45,76	8,07	1,42
57	51	6,83	1,10	46,62	7,52	1,21
58	52	6,91	1,05	47,72	7,25	1,10
59		6,91	1,10	47,77	7,60	1,21
60	53	6,94	1,15	48,18	8,00	1,33
61	54	6,97	1,17	48,64	8,15	1,37
62	55	7,00	0,96	48,97	6,75	0,93
63	56	7,04	1,15	49,51	8,09	1,32
64		7,04	0,97	49,53	6,82	0,94
65	57	7,10	0,99	50,41	7,05	0,99
66	58	7,12	1,13	50,70	8,05	1,28
67	59	7,30	1,20	53,29	8,74	1,43
68		7,30	1,01	53,29	7,34	1,01
69	60	7,47	1,08	55,86	8,05	1,16
70	61	7,50	1,18	56,25	8,87	1,40
71	62	7,66	1,04	58,73	7,99	1,09
72	63	7,67	1,16	58,80	8,90	1,35
73	64	8,00	1,08	63,93	8,60	1,16
74		8,00	1,11	64,00	8,88	1,23
75	65	8,59	1,05	73,82	8,99	1,10
76	66	8,60	1,12	73,96	9,63	1,25
77	67	8,86	1,05	78,50	9,30	1,10
78	68	8,90	1,07	79,15	9,50	1,14
79	69	9,10	1,00	82,78	9,09	1,00
80	70	9,12	0,94	83,13	8,59	0,89
81	71	9,40	1,13	88,36	10,66	1,29
82	72	9,41	1,11	88,50	10,44	1,23
83	73	9,60	0,94	92,16	9,02	0,88
84	74	9,62	0,98	92,52	9,43	0,96
		510,08	91,85	3.341,58	553,88	100,97
		6,07	1,09	39,78	6,59	1,20

LAMPIRAN 20

ANOVA LINIER						
Sumber Variasi	dk	JK	KT	F H	F Tabel	
Total	84					
Regresi (a)	1	100,43	100,43			
Regresi (b/a)	1	0,06	0,06			<i>Ho harus ditolak</i>
Residu	n-2 =(84-2=82)	0,48	0,01	10,37	3,96	Regresi berarti
Tuna Cocok	k-2 =(74-2=72)	0,42	0,01			<i>Ho tidak harus ditolak</i>
Kekeliruan (e)	n-k =(84-74=10)	0,06	0,01	0,97	2,61	Regresi linier

$$JKa = \frac{(\sum Y)^2}{n}$$

$$JKa = \underline{\underline{100,43}}$$

$$JK(b/a) = b \left\{ \sum XY - \frac{\sum X \sum Y}{n} \right\}$$

$$JK(b/a) = \underline{\underline{0,06}}$$

$$JK_{res} = \sum Y^2 - JKa - JK(b/a)$$

$$JK_{res} = \underline{\underline{0,48}}$$

$$JK_e = \sum \left(Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_n^2 - \left(\frac{(Y_1 + Y_2 + \dots + Y_n)^2}{n} \right) \right)$$

$$JK_e = 0,001 + 0,006 + 0,00004 + 0,001$$

$$= 0,02 + 0,02 + 0,02 + 0,001$$

$$JK_e = 0,06$$

$$JK_{tc} = JK_{res} - JK_e$$

$$JK_{tc} = \underline{\underline{0,42}}$$

Kesimpulan Uji Linieritas Regresi:

Berdasarkan hasil perhitungan $F_{hitung} = 0,97$; dan $F_{tabel} (0,05;72/10) = 2,61$

sehingga $F_{hitung} < F_{tabel}$

Maka, dapat disimpulkan bahwa

Model Persamaan Regresi adalah Linier

Kesimpulan Uji Keberartian Regresi:

Berdasarkan hasil perhitungan $F_{hitung} = 10,37$; dan $F_{tabel} (0,05;1/84) = 3,96$

sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$

Maka, dapat disimpulkan bahwa

Model Persamaan Regresi adalah Berarti

LAMPIRAN 21

KESIMPULAN UJI LINIERITAS REGRESI & UJI KEBERARTIAN REGRESI

ANOVA LINIER						
Sumber Variasi	dk	JK	KT	F H	F Tabel	
Total	84					
Regresi (a)	1	100,43	100,43			
Regresi (b/a)	1	0,06	0,06			<i>Ho harus ditolak</i>
Residu	$n-2=(84-2=82)$	0,48	0,01	10,37	3,96	Regresi berarti
Tuna Cocok	$k-2=(74-2=72)$	0,42	0,01			<i>Ho tidak harus ditolak</i>
Kekeliruan (e)	$n-k=(84-74=10)$	0,06	0,01	0,97	2,61	Regresi linier

Uji Keberartian Regresi

Hipotesis :

H_0 = Model regresi tidak berarti

H_a = Model regresi berarti

Kriteria Pengujian :

Terima H_0 jika $F_h < F_t$, maka model regresi tidak berarti

Tolak H_0 jika $F_h > F_t$, maka model regresi berarti

Hasil Perhitungan :

$F_h = 10,37$ $F_t = 3,96$

Kesimpulan :

Karena $10,37 > 3,96$ berarti $F_h > F_t$, berarti H_0 ditolak, yang artinya model regresi adalah berarti

Uji Linieritas Regresi

Hipotesis :

H_0 = Bentuk regresi linier

H_a = Bentuk regresi tidak linier

Kriteria Pengujian :

Terima H_0 jika $F_h < F_t$, maka model regresi linier

Tolak H_0 jika $F_h > F_t$, maka model regresi tidak linier

Hasil Perhitungan :

$F_h = 0,97$ $F_t = 2,61$

Kesimpulan :

Karena $0,97 < 2,61$ berarti $F_h < F_t$, berarti H_0 diterima, yang artinya model regresi dinyatakan linier

LAMPIRAN 22

UJI KOEFISIEN RELASI PRODUCT MOMENT

X = Dana Perimbangan
Rasio

Y = Efektivitas

n	X	Y	X ²	XY	Y ²
1	2,70	1,19	7,29	3,22	1,42
2	2,70	1,20	7,29	3,24	1,44
3	2,70	1,16	7,29	3,13	1,35
4	2,90	1,22	8,41	3,55	1,50
5	2,90	1,11	8,41	3,23	1,24
6	3,00	1,21	9,00	3,63	1,46
7	3,08	1,16	9,48	3,58	1,35
8	3,45	1,26	11,89	4,35	1,59
9	3,58	1,12	12,81	4,01	1,25
10	3,60	1,11	12,96	4,00	1,23
11	4,28	1,01	18,32	4,34	1,03
12	4,59	0,96	21,05	4,42	0,93
13	4,60	1,05	21,16	4,85	1,11
14	4,68	1,19	21,90	5,57	1,42
15	4,69	1,05	21,96	4,90	1,09
16	4,73	1,07	22,35	5,08	1,15
17	4,80	1,09	23,02	5,23	1,19
18	4,80	1,08	23,04	5,19	1,17
19	4,83	1,19	23,32	5,74	1,41
20	4,99	0,95	24,89	4,72	0,90
21	5,00	1,02	25,00	5,09	1,04
22	5,09	1,07	25,87	5,43	1,14
23	5,10	1,11	26,01	5,64	1,22
24	5,11	1,32	26,12	6,76	1,75
25	5,16	1,21	26,60	6,24	1,46
26	5,20	1,04	27,04	5,43	1,09
27	5,36	1,00	28,74	5,34	0,99
28	5,37	1,05	28,86	5,63	1,10
29	5,42	1,10	29,33	5,94	1,20
30	5,44	1,06	29,62	5,79	1,13
31	5,58	1,14	31,15	6,39	1,31
32	5,59	1,08	31,27	6,02	1,16
33	5,62	1,04	31,63	5,86	1,09
34	5,65	1,10	31,89	6,21	1,21
35	5,71	1,03	32,62	5,87	1,06
36	5,73	1,05	32,80	6,01	1,10
37	5,76	1,11	33,19	6,39	1,23
38	5,79	1,08	33,54	6,27	1,17
39	5,79	1,12	33,55	6,47	1,25
40	5,80	1,09	33,68	6,33	1,19

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

$$r_{xy} = \underline{\underline{-0,34}}$$

Dari hasil perhitungan,

< 0,220

-0,34 (rh < rt)

sehingga Ho diterima.

Maka, terdapat hubungan negatif antara kedua variabel.

41	5,83	1,06	33,93	6,18	1,13
42	5,99	1,07	35,87	6,39	1,14
43	6,00	1,00	36,00	6,00	1,00
44	6,11	1,11	37,29	6,76	1,22
45	6,13	1,11	37,55	6,82	1,24
46	6,17	1,22	38,02	7,52	1,49
47	6,27	1,12	39,37	7,01	1,25
48	6,33	1,06	40,04	6,73	1,13
49	6,35	1,22	40,34	7,75	1,49
50	6,39	1,13	40,83	7,24	1,28
51	6,45	1,17	41,60	7,57	1,38
52	6,60	1,06	43,56	7,00	1,12
53	6,62	1,16	43,79	7,70	1,35
54	6,62	1,04	43,87	6,86	1,07
55	6,66	0,89	44,32	5,90	0,79
56	6,76	1,19	45,76	8,07	1,42
57	6,83	1,10	46,62	7,52	1,21
58	6,91	1,05	47,72	7,25	1,10
59	6,91	1,10	47,77	7,60	1,21
60	6,94	1,15	48,18	8,00	1,33
61	6,97	1,17	48,64	8,15	1,37
62	7,00	0,96	48,97	6,75	0,93
63	7,04	1,15	49,51	8,09	1,32
64	7,04	0,97	49,53	6,82	0,94
65	7,10	0,99	50,41	7,05	0,99
66	7,12	1,13	50,70	8,05	1,28
67	7,30	1,20	53,29	8,74	1,43
68	7,30	1,01	53,29	7,34	1,01
69	7,47	1,08	55,86	8,05	1,16
70	7,50	1,18	56,25	8,87	1,40
71	7,66	1,04	58,73	7,99	1,09
72	7,67	1,16	58,80	8,90	1,35
73	8,00	1,08	63,93	8,60	1,16
74	8,00	1,11	64,00	8,88	1,23
75	8,59	1,05	73,82	8,99	1,10
76	8,60	1,12	73,96	9,63	1,25
77	8,86	1,05	78,50	9,30	1,10
78	8,90	1,07	79,15	9,50	1,14
79	9,10	1,00	82,78	9,09	1,00
80	9,12	0,94	83,13	8,59	0,89
81	9,40	1,13	88,36	10,66	1,29
82	9,41	1,11	88,50	10,44	1,23
83	9,60	0,94	92,16	9,02	0,88
84	9,62	0,98	92,52	9,43	0,96
Σ	510,08	91,85	3.341,58	553,88	100,97

LAMPIRAN 23

UJI KEBERARTIAN KOEFISIEN KORELASI

$$n = 84$$

$$r = -0,34$$

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

$$t = \frac{-3,03}{0,94218191}$$

$$t = 3,22$$

Kriteria pengujian :

Ho : ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Ho : diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$.

t tabel pada n-2 (84-2)

1,67

Karena Ho jatuh di daerah penolakan

Maka, terdapat hubungan signifikan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Pemda (Rasio Efektivitas)

LAMPIRAN 24

KOEFISIEN DETERMINASI

$$r_{xy} = -0,34$$

$$r_{xy}^2 = 0,1123$$

$$\begin{aligned} \mathbf{KD} &= r_{xy}^2 \\ &= \underline{\underline{11,23\%}} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut di interpretasikan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ditentukan oleh Dana Perimbangan sebesar 11,23%

LAMPIRAN 25

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

LAMPIRAN 26

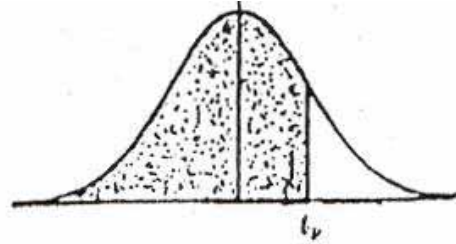
Nilai Kritis L untuk Uji Lilliefors

Ukuran Sampel	Taraf Nyata (α)				
	0,01	0,05	0,10	0,15	0,20
n = 4	0,417	0,381	0,352	0,319	0,300
5	0,405	0,337	0,315	0,299	0,285
6	0,364	0,319	0,294	0,277	0,265
7	0,348	0,300	0,276	0,258	0,247
8	0,331	0,285	0,261	0,244	0,233
9	0,311	0,271	0,249	0,233	0,223
10	0,294	0,258	0,239	0,224	0,215
11	0,284	0,249	0,230	0,217	0,206
12	0,275	0,242	0,223	0,212	0,199
13	0,268	0,234	0,214	0,202	0,190
14	0,261	0,227	0,207	0,194	0,183
15	0,257	0,220	0,201	0,187	0,177
16	0,250	0,213	0,195	0,182	0,173
17	0,245	0,206	0,189	0,177	0,169
18	0,239	0,200	0,184	0,173	0,166
19	0,235	0,195	0,179	0,169	0,163
20	0,231	0,190	0,174	0,166	0,160
25	0,200	0,173	0,158	0,147	0,142
30	0,187	0,161	0,144	0,136	0,131
n > 30	1,031	0,886	0,805	0,768	0,736
	$\sqrt{\frac{1,031}{n}}$	$\sqrt{\frac{0,886}{n}}$	$\sqrt{\frac{0,805}{n}}$	$\sqrt{\frac{0,768}{n}}$	$\sqrt{\frac{0,736}{N}}$

LAMPIRAN 28

DAFTAR G

Nilai Percentil
Untuk Distribusi t
 $\nu = dk$
(Bilangan Dalam Badan Daftar
Menyatakan t_p)



ν	$t_{0.995}$	$t_{0.99}$	$t_{0.975}$	$t_{0.95}$	$t_{0.90}$	$t_{0.80}$	$t_{0.75}$	$t_{0.70}$	$t_{0.60}$	$t_{0.55}$
1	63,66	31,82	12,71	6,31	3,08	1,376	1,000	0,727	0,525	0,158
2	9,92	6,96	4,30	2,92	1,89	1,061	0,816	0,617	0,289	0,142
3	5,84	4,64	3,18	2,35	1,64	0,978	0,765	0,581	0,277	0,137
4	4,60	3,75	2,78	2,13	1,53	0,941	0,711	0,569	0,271	0,131
5	4,03	3,36	2,57	2,02	1,48	0,920	0,727	0,559	0,267	0,132
6	3,71	3,14	2,45	1,94	1,44	0,906	0,718	0,553	0,265	0,131
7	3,50	3,00	2,36	1,90	1,42	0,896	0,711	0,549	0,263	0,130
8	3,36	2,90	2,31	1,86	1,40	0,889	0,706	0,546	0,262	0,130
9	3,25	2,82	2,26	1,83	1,38	0,883	0,703	0,543	0,261	0,129
10	3,17	2,76	2,23	1,81	1,37	0,879	0,700	0,542	0,260	0,129
11	3,11	2,72	2,20	1,80	1,36	0,876	0,697	0,540	0,260	0,129
12	3,06	2,68	2,18	1,78	1,36	0,873	0,695	0,539	0,259	0,128
13	3,01	2,66	2,16	1,77	1,35	0,870	0,694	0,538	0,259	0,128
14	2,98	2,62	2,14	1,76	1,34	0,868	0,692	0,537	0,258	0,128
15	2,95	2,60	2,13	1,75	1,34	0,866	0,691	0,536	0,258	0,128
16	2,92	2,58	2,12	1,75	1,34	0,865	0,690	0,535	0,258	0,128
17	2,90	2,57	2,11	1,74	1,33	0,863	0,689	0,534	0,257	0,128
18	2,88	2,55	2,10	1,73	1,33	0,862	0,688	0,534	0,257	0,127
19	2,86	2,54	2,09	1,73	1,33	0,861	0,688	0,533	0,257	0,127
20	2,84	2,53	2,09	1,72	1,32	0,860	0,687	0,533	0,257	0,127
21	2,83	2,52	2,08	1,72	1,32	0,859	0,686	0,532	0,257	0,127
22	2,82	2,51	2,07	1,72	1,32	0,858	0,686	0,532	0,256	0,127
23	2,81	2,50	2,07	1,71	1,32	0,858	0,685	0,532	0,256	0,127
24	2,80	2,49	2,06	1,71	1,32	0,857	0,685	0,531	0,256	0,127
25	2,79	2,48	2,06	1,71	1,32	0,856	0,684	0,531	0,256	0,127
26	2,78	2,48	2,06	1,71	1,32	0,856	0,684	0,531	0,256	0,127
27	2,77	2,47	2,05	1,70	1,31	0,855	0,684	0,531	0,256	0,127
28	2,76	2,47	2,05	1,70	1,31	0,855	0,683	0,530	0,256	0,127
29	2,76	2,46	2,04	1,70	1,31	0,854	0,683	0,530	0,256	0,127
30	2,75	2,46	2,04	1,70	1,31	0,854	0,683	0,530	0,256	0,127
40	2,70	2,42	2,02	1,68	1,30	0,851	0,681	0,529	0,255	0,126
60	2,66	2,39	2,00	1,67	1,30	0,848	0,679	0,527	0,254	0,126
120	2,62	2,36	1,98	1,66	1,29	0,845	0,677	0,526	0,254	0,126
∞	2,58	2,33	1,96	1,646	1,28	0,842	0,674	0,524	0,253	0,126

LAMPIRAN 29



DAFTAR 1
 Nilai Persentil
 Untuk Distribusi F
 (Bilangan Dalam Badan Daftar
 Menyatakan F_p | Berdasarkan Untuk
 $p = 0,05$ dan Berla-Berlah Untuk $p = 0,01$)

$V_2 = dk$ penyebut	$V_1 = dk$ pembilang																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	20	24	30	40	60	100	200	500	∞	
1	151	200	216	226	230	234	237	239	241	242	243	244	245	246	248	248	249	250	251	252	253	254	254	254
2	4052	4989	5403	5628	5764	5859	5923	5981	6022	6056	6082	6104	6123	6139	6156	6174	6188	6204	6218	6232	6245	6258	6264	
3	18,81	19,00	19,16	19,26	19,30	19,33	19,36	19,37	19,38	19,39	19,40	19,41	19,42	19,43	19,44	19,45	19,46	19,47	19,48	19,48	19,49	19,50	19,50	
4	98,49	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,34	99,36	99,38	99,40	99,41	99,42	99,43	99,44	99,44	99,45	99,46	99,47	99,48	99,48	99,49	99,49	99,50	
5	10,13	9,56	9,28	9,12	9,01	8,94	8,88	8,84	8,81	8,78	8,76	8,74	8,71	8,69	8,66	8,64	8,63	8,61	8,60	8,59	8,58	8,58	8,58	
6	34,12	30,85	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,34	27,23	27,13	27,05	26,97	26,89	26,82	26,76	26,70	26,64	26,59	26,54	26,50	26,46	26,42	
7	7,71	6,94	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,93	5,91	5,89	5,87	5,84	5,83	5,81	5,79	5,77	5,74	5,71	5,70	5,68	5,64	
8	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,23	14,98	14,80	14,66	14,54	14,45	14,37	14,31	14,25	14,20	14,15	14,10	14,05	14,00	13,95	13,91	13,87	13,82	
9	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,78	4,74	4,70	4,68	4,64	4,60	4,56	4,53	4,50	4,46	4,44	4,42	4,40	4,38	4,37	
10	26,26	22,27	20,96	19,97	19,37	19,03	18,75	18,53	18,35	18,20	18,06	17,93	17,81	17,70	17,60	17,52	17,44	17,36	17,29	17,24	17,19	17,14	17,09	
11	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00	3,96	3,92	3,87	3,84	3,81	3,77	3,75	3,72	3,71	3,69	3,68	
12	33,16	28,52	26,78	25,15	24,15	23,42	22,96	22,61	22,34	22,14	21,98	21,84	21,71	21,59	21,48	21,38	21,29	21,20	21,12	21,05	20,99	20,94	20,89	
13	5,69	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,63	3,60	3,57	3,52	3,49	3,44	3,41	3,38	3,34	3,32	3,29	3,28	3,26	3,23	
14	38,25	32,53	30,45	28,51	27,18	26,00	25,00	24,24	23,68	23,28	22,94	22,64	22,38	22,14	21,91	21,69	21,48	21,28	21,08	20,88	20,68	20,48	20,28	
15	5,52	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,34	3,31	3,28	3,23	3,20	3,15	3,12	3,08	3,05	3,02	3,00	2,98	2,96	2,94	
16	41,26	34,65	32,19	30,01	28,38	27,00	25,82	24,82	24,06	23,40	22,90	22,56	22,24	21,94	21,66	21,40	21,14	20,88	20,62	20,36	20,10	19,84	19,58	
17	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,13	3,10	3,07	3,02	2,98	2,93	2,90	2,86	2,82	2,80	2,77	2,76	2,73	2,71	
18	44,16	36,62	33,89	31,41	29,50	27,88	26,50	25,32	24,32	23,56	22,90	22,38	21,86	21,34	20,82	20,30	19,78	19,26	18,74	18,22	17,70	17,18	16,66	

DAFTAR 1 (lanjutan)

No	V ₁ × 10 ³ meter	V ₂ × 10 ³ pembilang																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
10	4,26	4,10	3,71	3,48	3,23	3,07	2,74	2,87	2,82	2,87	2,94	2,91	2,86	2,82	2,77	2,74	2,70	2,67	2,64	2,61	2,59	2,56	2,54
	10,24	7,56	6,15	5,90	5,64	5,37	5,21	5,06	4,91	4,85	4,78	4,71	4,60	4,57	4,41	4,33	4,13	4,11	4,00	4,01	3,96	3,93	3,91
11	4,84	3,98	3,19	3,26	3,20	3,45	3,81	3,95	3,99	3,86	3,82	3,79	3,74	3,70	3,63	3,61	3,57	3,53	3,49	3,47	3,43	3,42	3,40
	9,65	7,20	6,12	5,67	5,32	5,45	4,85	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40	4,29	4,21	4,10	4,02	3,94	3,86	3,81	3,74	3,76	3,65	3,60
12	4,76	2,88	3,19	3,26	3,11	3,60	3,87	3,85	3,89	3,76	3,72	3,69	3,64	3,60	3,54	3,50	3,46	3,43	3,40	3,38	3,34	3,32	3,30
	9,33	6,33	5,55	5,41	5,06	4,82	4,65	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16	4,05	3,98	3,86	3,78	3,70	3,61	3,54	3,48	3,45	3,41	3,38
13	4,67	3,80	3,11	3,19	3,22	3,27	3,24	3,77	3,71	3,67	3,63	3,60	3,55	3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,32	3,28	3,25	3,24	3,21
	9,67	6,70	5,74	5,39	4,96	4,62	4,44	4,28	4,19	4,10	4,02	3,86	3,85	3,78	3,67	3,60	3,53	3,47	3,42	3,37	3,34	3,31	3,28
14	4,60	2,74	3,14	3,11	2,96	2,85	3,17	3,70	3,63	3,59	3,56	3,52	3,48	3,44	3,39	3,35	3,31	3,27	3,24	3,21	3,19	3,18	3,15
	8,86	6,31	5,16	5,13	4,59	4,16	4,14	4,01	3,94	3,86	3,80	3,70	3,67	3,51	3,43	3,34	3,26	3,21	3,14	3,14	3,11	3,06	3,02
15	4,54	2,68	3,19	3,06	2,90	3,19	3,10	2,64	2,89	3,35	3,51	2,48	2,73	3,19	3,23	3,29	3,25	3,21	3,18	3,15	3,12	3,10	3,08
	8,68	6,36	5,12	4,19	4,56	4,32	4,14	4,00	3,91	3,80	3,73	3,67	3,56	3,48	3,36	3,29	3,20	3,13	3,07	3,06	2,97	2,92	2,89
16	4,49	2,60	3,14	3,11	2,35	3,14	3,56	3,39	3,51	2,49	2,65	2,42	3,17	3,31	3,28	3,24	3,20	3,16	3,13	3,09	3,07	3,04	3,02
	8,33	6,22	5,19	4,11	4,44	4,20	4,03	3,89	3,71	3,69	3,61	3,55	3,45	3,37	3,28	3,18	3,10	3,01	2,94	2,89	2,84	2,80	2,77
17	4,45	2,59	3,10	2,90	2,81	2,70	2,72	2,85	2,80	2,45	2,41	2,37	2,24	3,29	3,23	3,19	3,15	3,11	3,07	3,04	3,00	2,98	2,97
	8,40	6,11	5,18	4,47	4,24	4,10	3,93	3,79	3,64	3,59	3,52	3,46	3,35	3,27	3,18	3,08	3,00	2,92	2,86	2,79	2,74	2,70	2,67
18	4,41	2,55	3,10	2,93	2,77	2,86	2,81	2,45	2,41	2,37	2,24	3,29	3,23	3,19	3,15	3,11	3,07	3,04	3,00	2,98	2,94	2,91	2,88
	8,28	6,01	5,09	4,38	4,25	4,01	3,85	3,71	3,60	3,51	3,44	3,37	3,27	3,19	3,07	3,00	2,91	2,83	2,78	2,71	2,64	2,61	2,57
19	4,38	2,52	3,13	2,90	2,74	2,83	2,85	2,48	2,43	2,35	2,54	2,31	2,26	3,21	3,18	3,14	3,07	3,03	3,00	2,96	2,94	2,91	2,88
	8,18	5,55	5,01	4,50	4,37	3,94	3,77	3,63	3,51	3,43	3,36	3,30	3,19	3,12	3,00	2,92	2,84	2,76	2,71	2,64	2,60	2,54	2,51
20	4,25	2,40	3,10	2,77	2,71	2,60	2,63	2,43	2,40	2,35	2,31	2,26	2,23	3,18	3,12	3,08	3,04	3,00	2,97	2,93	2,89	2,87	2,84
	7,10	5,85	4,94	4,43	4,30	3,71	3,56	3,41	3,37	3,30	3,23	3,13	3,05	2,94	2,86	2,77	2,69	2,63	2,56	2,53	2,47	2,44	2,42
21	4,22	2,47	3,07	2,84	2,66	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32	2,28	2,25	2,20	3,15	3,09	2,95	2,90	2,86	2,83	2,81	2,77	2,74	2,71
	6,92	5,78	4,57	4,37	4,04	3,81	3,65	3,51	3,40	3,33	3,24	3,17	3,07	2,99	2,88	2,80	2,72	2,63	2,58	2,51	2,47	2,42	2,38
22	4,20	2,44	3,06	2,87	2,66	2,55	2,47	2,40	2,35	2,30	2,26	2,23	2,18	3,13	3,07	2,93	2,88	2,83	2,81	2,77	2,74	2,71	2,68
	7,94	5,72	4,82	4,31	3,99	3,76	3,59	3,45	3,35	3,26	3,18	3,12	3,02	2,94	2,83	2,75	2,67	2,58	2,46	2,42	2,37	2,33	2,31
23	4,28	2,42	3,03	2,89	2,64	2,53	2,45	2,38	2,32	2,28	2,24	2,20	2,14	3,10	3,04	2,90	2,86	2,81	2,81	2,79	2,74	2,71	2,68
	7,38	5,66	4,76	4,26	3,84	3,71	3,54	3,41	3,30	3,23	3,14	3,07	2,97	2,89	2,78	2,70	2,62	2,53	2,46	2,41	2,37	2,32	2,28

LAMPIRAN 30



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180
Bag. UHTP : Telp. 4893726, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536, HUMAS : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **1785/UN39.12/KM/2013** **5 April 2013**
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Yth. Humas Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI)
di tempat

Kami mohon kesediaan Saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a : **Ela Marlina**
Nomor Registrasi : **8105092788**
Program Studi : **Pendidikan Ekonomi**
Fakultas : **Ekonomi**
Untuk Mengadakan : **Observasi**

Di : **Badan Pemeriksa Keuangan RI**


Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka Oservasi Sebagai Berikut:
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dari Beberapa Wilayah/Provinsi)

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Biro Administrasi
Akademik dan Kemahasiswaan
Drs. Syaifulah
NIP 19570216 198403 1 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog / Jurusan Pendidikan Ekonomi

LAMPIRAN 31



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
 Telepon 021-25549000 Ext. 3912, Faksimili 021-57950288

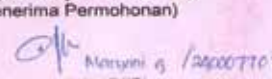
**Formulir Permohonan Informasi Publik
(Rangkap Dua)**

Nomor : 177/PI/PIKI.05/2013
 Tanggal : 8 Mei 2013

Unit kerja tujuan	: PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Cara Penyampaian	: LANGSUNG
DATA PEMOHON INFORMASI	
Nama	ELA MARINA
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Alamat Rumah	JL. BONDONG TERHAJI RAYA 820 NO.15 BEKASI
Pekerjaan/Instansi	MAHASISWA / UND
Alamat Kantor	Jl. RAUW MANGUN MUKA JAK-TIM
Email	elamarina90@yahoo.com
NO. KTP	329 5034211 900013
NO. TELP	089980205326
JENIS PENGAJUAN PERMINTAAN INFORMASI	
Jenis Permintaan Informasi	<input checked="" type="checkbox"/> Pemeriksaan <input type="checkbox"/> Non Pemeriksaan
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	LHP Kabupaten / Kota di Pulau Jawa (Metengropi)
Tujuan Penggunaan Informasi	Penelitian (sampel) skripsi
Sumber Informasi**	<input checked="" type="checkbox"/> Pubaket (Database) <input type="checkbox"/> Unit
Cara Memperoleh Informasi*	1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat 2. Mendapat salinan informasi (hardcopy/softcopy)
Cara Mengirimkan Informasi**	1. <input checked="" type="checkbox"/> Diambil Langsung 2. <input type="checkbox"/> Kurir 3. <input type="checkbox"/> Pos 4. <input type="checkbox"/> E-mail 5. <input type="checkbox"/> Faksimili
Tanggal Pengeluaran Informasi	8 Mei 2013


Informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)



(Nama Jelas/NIP)


Pemohon Informasi



(Nama Jelas sesuai KTP)

Keterangan :
 * Coret yang tidak perlu
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda ✓

LAMPIRAN 32


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA**

TANDA TERIMA PENYERAHAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK
 (Rangkap Dua)
 Nomor : 177 /PI-PD/PIK/001/2015

Telah terima informasi berupa :

I. Jenis Data/Informasi : LHR Revisi Laporan Tahunan di Bursa Saham (Mekongasah)

II. Tujuan Penggunaan Data/Informasi : Penelitian (Sampel) Peringkat

III. Bentuk Data/ Informasi : Soft Copy
 Hard Copy

IV. Pemohon Data/Informasi

a. Nama : ELA MARINA

b. Jabatan : Mahasiswa

c. Lembaga : UNS


d. Alamat : Jl. Bopung Kramat Raya No. 1012, Bekasi


e. No. Telp. /HP : 08228028286

Telah menerima dan menyatakan bahwa data/informasi ini tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan tersebut di atas. Segala akibat hukum dari perlakuan data/informasi ini setelah keluar dari kantor BPK menjadi tanggung jawab pemohon/pengguna informasi

Jember, 8 April 2015

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,


 Elana Marina


 Elana Marina

Catatan:

1. Tanda terima yang telah ditandatangani dikirimkan melalui faksimili ke 021-57950288
2. Apabila membutuhkan konfirmasi, silakan menghubungi nomor 021-25549000 ext. 3912

LAMPIRAN 33

BUKU I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2010**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**Nomor : 38.A/LHP/XVIII.BDG/07/2011
Tanggal : 22 Juli 2011**



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2010

URAIAN	Reff	Anggaran 2010	Realisasi 2010 (Audited)	Realisasi 2009
PENDAPATAN	3.4			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.4.1			
Pendapatan Pajak Daerah	3.4.1.1	124.800.000.000,00	116.873.915.640,00	107.813.509.242,00
Pendapatan Retribusi Daerah	3.4.1.2	64.932.216.400,00	68.033.758.376,00	75.069.249.864,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.4.1.3	23.966.000.000,00	24.248.217.129,00	26.991.350.363,00
Lain-lain PAD yang sah	3.4.1.4	29.306.871.000,00	49.515.206.978,00	76.825.389.926,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		243.005.087.400,00	258.671.098.123,00	287.199.807.395,00
PENDAPATAN TRANSFER	3.4.2			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	3.4.2.1			
Dana Bagi Hasil Pajak	3.4.2.1.1	394.220.838.000,00	481.878.239.191,00	398.943.301.038,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	3.4.2.1.2	49.512.860.000,00	44.642.703.854,00	32.172.793.631,00
Dana Alokasi Umum	3.4.2.1.3	536.786.256.000,00	536.786.256.000,00	618.237.958.000,00
Dana Alokasi Khusus	3.4.2.1.4	83.699.900.000,00	83.699.900.000,00	28.437.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		1.064.219.844.000,00	1.147.007.099.045,00	1.077.791.052.669,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	3.4.2.2			
Dana Otonomi Khusus		-	-	-
Dana Penyesuaian		77.576.941.007,00	66.275.198.577,00	48.597.388.373,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		77.576.941.007,00	66.275.198.577,00	48.597.388.373,00
TRANSFER PEMERINTAH	3.4.2.3			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	3.4.2.3.a	155.263.544.478,00	157.993.465.850,00	146.525.256.807,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.4.2.3.b	416.457.522,00	786.209.150,00	-
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		155.680.002.000,00	158.779.675.000,00	146.525.256.807,00
Jumlah Pendapatan Transfer		1.297.476.787.007,00	1.372.061.972.622,00	1.272.913.697.849,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.4.2.4			
Pendapatan Hibah	3.4.2.4.a	3.000.000.000,00	2.999.965.000,00	-
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-
Pendapatan Lainnya	3.4.2.4.b	115.343.747.500,00	101.526.397.000,00	63.440.104.270,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		118.343.747.500,00	104.526.362.000,00	63.440.104.270,00
Jumlah Pendapatan		1.658.825.621.907,00	1.734.259.432.745,00	1.623.653.309.514,00
BELANJA	3.5			
BELANJA OPERASI	3.5.1			
Belanja Pegawai	3.5.1.1	863.049.188.590,00	792.124.428.390,00	676.601.038.728,00
Belanja Barang	3.5.1.2	366.034.625.508,00	299.040.675.655,00	267.030.571.497,00
Bunga		-	-	-
Subsidi		-	-	-
Belanja Hibah	3.5.1.3	122.660.791.770,00	100.803.372.645,00	98.974.293.692,00
Belanja Bantuan Sosial	3.5.1.4	64.101.730.700,00	55.554.715.700,00	140.772.071.300,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.5.1.5	47.001.602.500,00	42.868.136.000,00	44.922.773.000,00
Jumlah Belanja Operasi		1.462.847.939.068,00	1.290.391.328.390,00	1.228.306.748.217,00
BELANJA MODAL	3.5.2			
Belanja Tanah	3.5.2.a	8.479.991.500,00	5.368.075.960,00	1.921.580.750,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.5.2.b	132.147.703.399,00	68.085.118.098,00	73.728.123.729,00
Belanja Gedung dan Bangunan	3.5.2.c	190.465.949.814,00	132.801.237.187,00	168.139.817.780,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.5.2.d	266.776.648.003,00	183.706.002.165,00	417.097.479.446,00
Belanja Asas Tetap Lainnya	3.5.2.a	21.861.642.800,00	1.329.809.600,00	3.513.163.675,00
Belanja Asas Lainnya		-	-	-
Jumlah Belanja Modal		619.731.935.516,00	391.290.243.010,00	664.800.165.300,00
BELANJA TAK TERDUGA	3.5.3			
Belanja Tak Terduga	3.5.3	21.587.309.201,00	349.952.100,00	1.991.445.100,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		21.587.309.201,00	349.952.100,00	1.991.445.100,00
Jumlah Belanja		2.104.167.183.785,00	1.682.031.523.500,00	1.895.092.358.697,00
TRANSFER	3.5.4			
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	3.5.4.a	10.023.756.000,00	10.023.756.000,00	8.703.195.000,00
Bagi Hasil Retribusi	3.5.4.b	8.827.234.000,00	8.827.234.000,00	6.929.960.000,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	-
Jumlah Transfer		18.850.990.000,00	18.850.990.000,00	15.633.164.000,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		2.123.018.173.785,00	1.700.882.513.500,00	1.910.725.522.697,00
SURPLUS / (DEFISIT)	3.6	(464.192.551.878,00)	34.376.919.245,00	(287.072.213.183,00)
PEMBIAYAAN	3.7			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.7.a			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		478.992.551.878,00	478.992.551.878,00	773.808.017.061,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-	-
Penerimaan Kembali dari Investasi Daerah		-	-	2.610.000.000,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		478.992.551.878,00	478.992.551.878,00	776.418.017.061,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.7.b			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		14.800.000.000,00	14.800.000.000,00	10.353.252.000,00
PEMBIAYAAN NETTO SILPA	3.8	464.192.551.878,00	464.192.551.878,00	766.064.765.061,00


 Kabupaten Puncak Jaya, Juli 2011
 BUPATI PUNKAJAYA,
 DR. H. SA'UDDIN, MM

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ELA MARINA, lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1990, anak pertama dari dua bersaudara, berjenis kelamin perempuan dari Gunawan dan Mulyanah. Beralamat rumah Jalan Bojong Permai Raya E20/15, Bekasi Timur. Peneliti memulai pendidikannya dari Taman Kanak-Kanak (TK) An-Nur, pada tahun 1997 dan dilanjutkan sekolah dasar di SDN Bojong Rawa Lumbu XII dilingkungan yang sama dan lulus pada tahun 2003.

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 16 Bekasi dan lulus pada tahun 2006. Setelah lulus peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Yadika 8 Bekasi jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2009.

Pada tahun yang sama, peneliti mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru melalui jalur SNMPTN, dan terdaftar sebagai mahasiswa Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Selama perkuliahan, peneliti mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Sekretariat DPRD Kota Bekasi di bagian keuangan dan melakukan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMKN 44 Jakarta.

Contact person: elamarina90@yahoo.com